



UNIVERSITAS INDONESIA

PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT
Studi Kasus: Komunitas Dusun Bogoran, Wonosobo

SKRIPSI

INTAN SILVIA DALE

0706285556

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI SOSIAL

DEPOK

JUNI 2012



UNIVERSITAS INDONESIA

PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT
Studi Kasus: Komunitas Dusun Bogoran, Wonosobo

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial

INTAN SILVIA DALE

0706285556

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI SOSIAL

DEPOK

JUNI 2012

ii

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Intan Silvia Dale

NPM : 0706285556

Tanda Tangan : 

Tanggal : 12 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Intan Silvia Dale

NPM : 0706285556

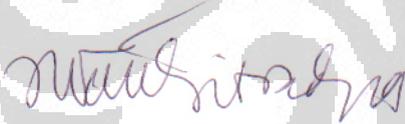
Program Studi : Antropologi Sosial

Judul : Pengelolaan Hutan Rakyat: Studi Kasus Komunitas Bogoran,
Wonosobo

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia

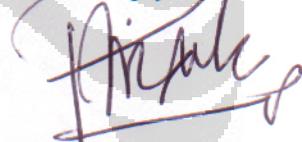
DEWAN PENGUJI

Pembimbing



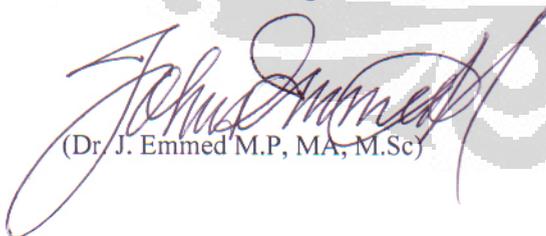
(Iwan Tjitradjaja, Ph. D)

Penguji



(Dr. Prihandoko Sanjatmiko)

Ketua Sidang



(Dr. J. Emmed M.P, MA, M.Sc)

Sekretaris Sidang



(Drs. Ezra M. Choesin, MA)

(.....)

Ditetapkan di : FISIP UI Depok

Tanggal : 12 Juni 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kemudahan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Berkat kemudahan dan petunjuk-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Salah satu motivasi pembuatan skripsi ini ialah ketertarikan saya akan teknik pengelolaan hutan rakyat. Pengelolaan hutan rakyat yang dilakukan oleh petani dapat memberikan banyak manfaat yaitu manfaat dari sisi ekonomi, ekologi, maupun sosial. Ketika saat ini banyak aktivis yang mencanangkan untuk menjaga kelestarian alam demi menjaga bumi agar tidak rusak maka petani hutan di Bogor sejak dahulu sudah menjaga alam mereka dengan baik sehingga tetap lestari dan terjaga.

Saya berharap hasil studi ini dapat bermanfaat kepada pihak-pihak yang tertarik untuk mengkaji pengelolaan hutan rakyat. Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun saya terima dengan terbuka.

Jakarta, 12 Juni 2012

Intan Silvia Dale

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat berupa kemudahan dan kelancaran sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Saya sangat bersyukur telah melewati fase turun naiknya proses pengerjaan skripsi ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Iwan Tjitradjaja, Ph. D, yang sudah sangat baik dan sabar dalam membimbing saya sehingga skripsi saya dapat selesai. Bapak Iwan selalu menyemangati saya ketika saya sedang merasa terpuruk dalam proses pengerjaan skripsi ini. Bapak selalu memberikan perhatian dan semangat yang tidak bisa saya lupakan sampai saat ini. Terima kasih ya pak, Pak Iwan adalah pembimbing terbaik yang pernah saya temui.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini. Mereka adalah: Dr. Prihandoko Sanjatmiko sebagai penguji ahli yang memberikan banyak masukan dan kritik terhadap skripsi saya, Dr. J. Emmed Prioharyono, MA, selaku ketua sidang dan ketua Program S1 Antropologi, Drs. Ezra M. Choesin, MA selaku sekretaris sidang, dan juga Dra. Endang P Gularso, MA sebagai pembimbing akademik.

Terima kasih kepada pihak Mahalum (Mahasiswa dan Alumni) FISIP khususnya Mas Pri, Mas Abud, Kak Dadan, Anis, Ayu, Kak Awi, Pak Komar. Kalian dari awal sangat membantu saya untuk mendapatkan keringanan dan beberapa beasiswa dalam kuliah saya. Alhamdulillah saya diberikan kepercayaan untuk mendapatkan beberapa beasiswa yaitu KSE, BUMN, Supersemar, dan BBM FISIP.

Terima kasih juga yang sebesar-besarnya untuk para warga Bogor yang banyak membantu saya dan dengan ramah menyambut saya di lingkungan Bogor. Terima kasih untuk segala informasi yang kalian sampaikan kepada saya sehingga dapat membantu saya dalam melakukan penelitian ini. Saya sudah merasa menjadi anggota keluarga besar Bogor. Saya pasti akan selalu merindukan suasana lingkungan asri dan ketenangan di Bogor.

Terima kasih terbesar saya juga saya ucapkan kepada keluarga besar saya. Meskipun pada awalnya saya tidak disetujui untuk kuliah karena alasan ekonomi tetapi pada akhirnya mereka mendukung saya karena melihat kegigihan saya memperjuangkan kuliah saya hingga sampai saat ini. Terutama untuk mamaku tersayang, makasih ya ma buat semua kasih sayang mama yang tidak pernah lekang oleh waktu meskipun mama membesarkan saya seorang diri semenjak saya lahir, terima kasih untuk pengorbanan dan kesabaran mama mendidik saya. Gelar sarjana saya nantinya akan saya persembahkan spesial untuk mama.

Terima kasih untuk belahan jiwaku, Pramudita Aulia yang telah memberikan kasih sayang tulus dan kesabaran dalam mendampingi saya. Terima kasih untuk dukungamu selama ini. Aku bahagia menjalani semuanya denganmu.

Terima kasih untuk semua sahabatku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sahabat yang paling berkesan di bangku kuliah ini adalah Wanda. Wanda adalah sahabat pertama yang saya temui di kampus ini, sampai saat ini kamipun masih menjadi sahabat yang baik. Terima kasih sudah menemani saya dalam suka duka proses kehidupan ini. Terima kasih juga untuk Salmah, Salmah adalah sahabat paling tulus yang pernah saya temui selama ini. Terima kasih juga untuk Chorni, Lia, dan Nurul yang telah membantu saya dalam proses revisi skripsi ini. Terima kasih untuk kebaikan kalian semua.

Terima kasih untuk semua anak antropologi khususnya angkatan 2007 yaitu Nurul, Lia, Syah, Riva, Salmah, Anin Tia, Anin Pipit, Manda, Nisa, Dinda, Mama Loren, Senyo, Rio, Febi, Inka, Fikri, Edo, Bgenk, Defina, Rendi, Riri, Mey, Jaman, Fahru, Abah, Audra, Rijo, Sora, Riris, Ngayomi, Ucok, dan lain-lain. Terima kasih untuk semua teman-teman saya di FISIP dan seluruh UI yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Terima kasih kalian telah menjadi keluarga besar dalam hidupku.

Terima kasih juga untuk semua pihak baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam memberikan dukungan dan doa sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Jasa kalian semua tidak akan saya lupakan sebagai bagian kenangan manis dalam hidup ini.

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Silvia Dale
NPM : 07062855556
Program Studi: Antropologi Sosial
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT: Studi Kasus Komunitas Bogor, Wonosobo

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 12 Juni 2012

Yang Menyatakan



(Intan Silvia Dale)

ABSTRAK

Nama : Intan Silvia Dale
Program Studi : Antropologi Sosial
Judul : Pengelolaan Hutan Rakyat: Studi Kasus: Komunitas Dusun Bogor, Wonosobo

Penelitian ini membahas tentang pengelolaan hutan rakyat yang dilakukan oleh warga di Dusun Bogor, Wonosobo. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan terlibat, wawancara, dan studi kepustakaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hutan rakyat merupakan salah satu bentuk guna lahan yang dominan di Bogor. Dalam hutan tersebut terdiri dari berbagai jenis tanaman. Hutan rakyat sudah sejak lama dikelola oleh warga Bogor. Ini disebabkan karena wanatani adalah bidang pekerjaan utama warganya sejak dahulu. Hutan rakyat ini menjadi sumber produksi, penghasilan warganya, dan juga sumber pakan ternak. Warga Bogor menyadari pentingnya arti hutan secara ekonomi dan ekologis bagi kehidupan mereka. Petani hutan di Bogor memiliki pola pikir yang sederhana terhadap hutan rakyat yaitu mereka hidup dari hutan sehingga hutan harus dikelola dengan baik agar hutan dapat terus menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Warga Bogor melihat hutan sebagai kehidupannya.

Kata Kunci : pengelolaan, manfaat, hutan rakyat

ABSTRACT

Name : Intan Silvia Dale
Study Program : Social Anthropology
Title : Forest management based on local community: Case Study Community of Bogoran Hamlet, Wonosobo

This study focuses on forest management based on local community in Bogoran Hamlet, Wonosobo. The research was conducted by using qualitative research approach through observation, interview, and literature study method. The result of this study showed that forest management based on local community is one of the dominant land use in Bogoran. This is because agroforestry is community's main occupation since old times. Forest community becomes product resources, community's income, and also the source of livestock feed. Bogoran community not only recognize the importance of forest on economy value, but also the importance of forest ecological value for their lives. Farmers in Bogoran have simple mindset, they live in forest so the forest must be managed properly for making money to fulfill their needs. Bogoran community seeing forest as their lives.

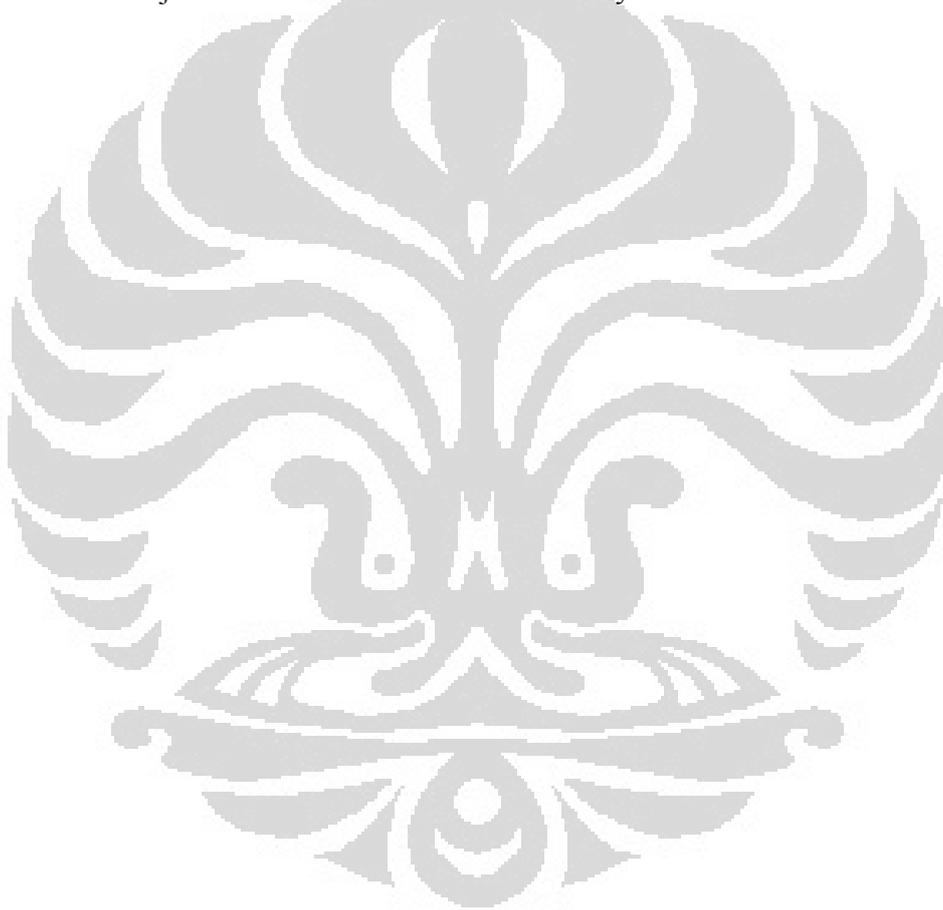
Keywords: management, benefits, forest management based on local community

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Orisinalitas	iii
Halaman Pengesahan	iv
Kata Pengantar	v
Halaman Persetujuan Publikasi Akademis	viii
Abstrak.....	ix
Abstract	x
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Masalah Penelitian.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Signifikansi Penelitian	9
1.5. Konsep Pemikiran	9
1.6. Penelitian Lapangan	16
1.7. Sistematika Penulisan	24
BAB II LINGKUNGAN DAN KOMUNITAS DESA BOGORAN.....	27
2.1. Lingkungan Desa	27
2.1.1. Wilayah Desa	27
2.1.2. Tata Guna Lahan	29
2.1.3. Fasilitas Publik, Sarana Transportasi dan Komunikasi.....	32
2.2. Kependudukan	37
2.3. Mata Pencaharian Hidup	47
2.3.1. Wanatani dan Sawah	48
2.3.2. Nonpertanian	49
2.4. Sistem Pemerintahan Desa	51
2.5. Pendidikan, Agama dan Kepercayaan	58
BAB III HUTAN RAKYAT BOGORAN	65
3.1. Sejarah Hutan Rakyat	65
3.2. Keanekaragaman Tanaman Hutan Rakyat	68
3.3. Ekonomi dan Rantai Produksi Hutan Rakyat	71
BAB IV PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT BOGORAN	77
4.1. Pola Penguasaan Hutan Rakyat	77
4.2. Sistem Wanatani Hutan Rakyat	82
4.3. Keterpaduan Wanatani, Pertanian. Dan Peternakan	88
BAB V KESIMPULAN	93
DAFTAR PUSTAKA	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Populasi 7 jenis pohon yang ditanam di hutan rakyat (batang).....	3
Tabel 2.1. Luas hutan rakyat Desa Bogoran.....	29
Tabel 2.2. Pemilikan Tanah Desa Bogoran.....	30
Tabel 2.3. Pemanfaatan Lahan di Desa Bogoran.....	30
Tabel 2.4. Jenis Pekerjaan di Desa Bogoran.....	47
Tabel 2.5. Bagan Perangkat Desa Bogoran.....	57
Tabel 3.1. Jenis Tanaman Berdasarkan Ketinggian Tajuk.....	70
Tabel 3.2. Jenis Tanaman Berdasarkan Jangka Waktu Panen.....	71
Tabel 3.3. Jenis Tanaman Berdasarkan Periode Panen.....	71
Tabel 3.4. Pola Penjualan Produk Tanaman Hutan Rakyat.....	74



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kegiatan keluarga Mbah Karto.....	19
Gambar 1.2. Kegiatan keluarga Pak Emboh.....	20
Gambar 1.3. Kegiatan keluarga Mbak Sulis.....	20
Gambar 1.4. Kegiatan keluarga Mbah Manten.....	21
Gambar 1.5. Kegiatan keluarga Ibu Parsi.....	21
Gambar 2.1 Suasana wilayah Desa Bogoran.....	29
Gambar 2.2. Kegiatan para petani Bogoran.....	49
Gambar 2.3. Ternak yang ada di Bogoran.....	51
Gambar 2.4. Perangkat Desa di Bogoran.....	58
Gambar 2.5. Masjid dan kegiatan pengajian rutin di Bogoran.....	64
Gambar 4.1. Sketsa sistem penggunaan lahan di Bogoran.....	85
Gambar 4.2. Kegiatan Pak Yanto ketika menjemur padi.....	88

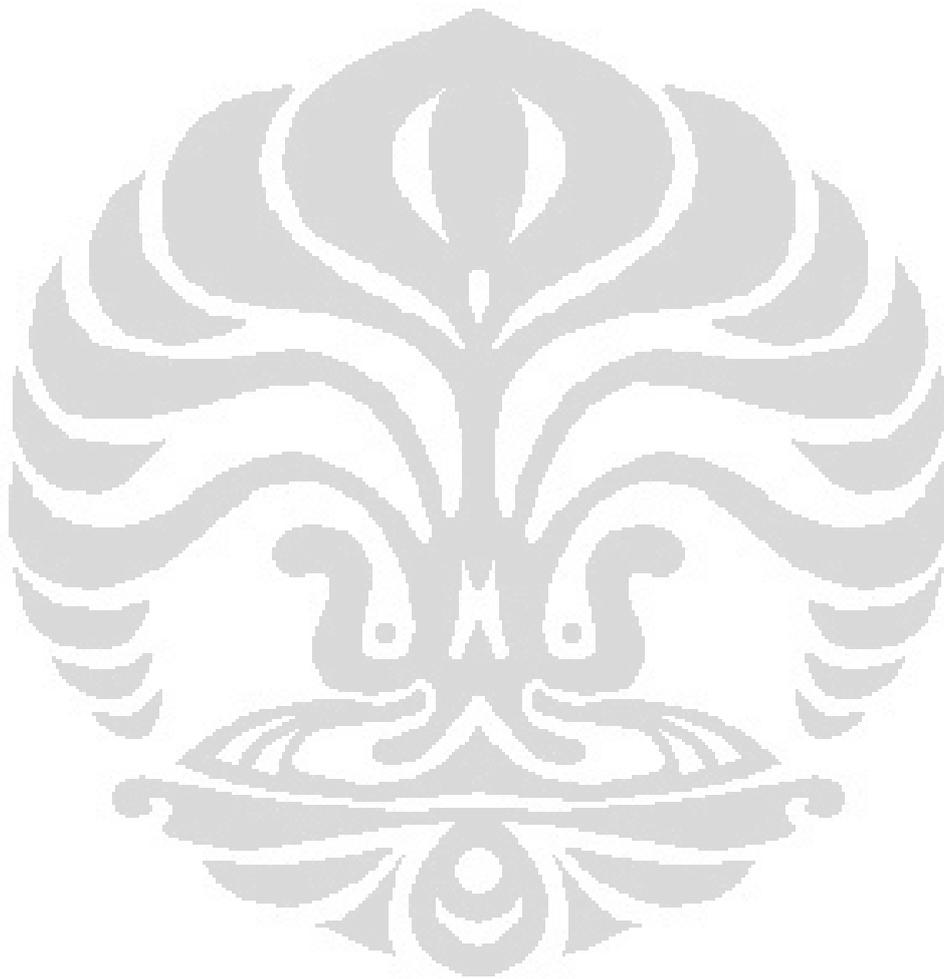


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Peta Administrasi Provinsi Jawa Tengah

Lampiran II. Peta Kabupaten Wonosobo

Lampiran III. Potensi Hutan Rakyat Indonesia Tahun 2003



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang besar peranannya dalam berbagai aspek kehidupan seperti aspek ekonomi, sosial, dan ekologi dengan keanekaragaman flora dan fauna yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Hutan sebagai pengatur tata air telah banyak dipahami orang sehingga kelestarian hutan menjadi kepentingan setiap manusia yang hidup di bumi ini. Menurut Reksohadiprodjo (1994), pentingnya hutan bagi kehidupan sosial ekonomi suatu masyarakat kini dirasakan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan kesadaran untuk mengelola sumber daya hutan yang tidak hanya dari segi finansial saja namun diperluas menjadi pengelolaan sumber daya hutan secara utuh.

Salah satu upaya untuk menunjang keseimbangan ekosistem alam dan kebutuhan ekonomi adalah pembentukan hutan rakyat. Hutan rakyat sudah berkembang sejak lama di kalangan masyarakat Indonesia meskipun dilakukan secara tradisional. Hutan rakyat merupakan salah satu model pengelolaan sumber daya alam yang berdasarkan inisiatif masyarakat. Hutan rakyat ini dibangun secara swadaya oleh masyarakat, ditujukan untuk menghasilkan kayu atau komoditas lainnya yang secara ekonomis bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari adanya hutan rakyat tradisional yang diusahakan masyarakat sendiri tanpa campur tangan pemerintah (swadaya murni), baik berupa tanaman satu jenis (hutan rakyat mini) maupun dengan pola tanaman campuran (agroforestri) (Awang, 2005).

Pengembangan hutan rakyat erat kaitannya dengan program pemerintah khususnya program penghijauan. Menurut laporan studi yang dilakukan Wartaputra (1990), pengembangan hutan rakyat di Jawa dimulai pada tahun 1930 oleh pemerintah kolonial. Kemudian pemerintah Indonesia pada tahun 1950-an

mengembangkan hutan rakyat melalui program ‘Karang Kitri’ dan program penghijauan pada awal tahun 60-an. Pada awal pengembangannya, sasaran pengembangan hutan rakyat adalah pada lahan-lahan kritis yang berjurang, dekat mata air, lahan terlantar dan tidak lagi dipergunakan untuk budidaya tanaman semusim. Tujuan pengembangan hutan rakyat adalah untuk meningkatkan produktivitas lahan kritis, memperbaiki tata air dan lingkungan, juga membantu masyarakat dalam penyediaan kayu bangunan, bahan perabotan rumah tangga dan sumber kayu bakar. Salah satu faktor yang mendukung tingginya minat masyarakat di daerah – daerah hutan rakyat yang berkembang, hal ini dapat mengembangkan hutan rakyat yang berkaitan dengan jaminan/kepastian atas pemanfaatan hasil hutan. Pemilik lahan juga memiliki kebebasan untuk menentukan jenis dan pola tanam sesuai kebutuhannya. Pada lahan miliknya yang terdiri dari beberapa macam kategori seperti pekarangan, tegalan, kebun, bahkan sawah, masyarakat menanam berbagai macam tanaman kayu seperti jati, sengon, akasia, mahoni. Tanam-tanaman tersebut ditanam bercampur dengan tanaman berkayu yang menghasilkan buah-buahan seperti nangka, mangga, petai, durian, duku, dan lain-lainnya. Untuk tanaman-tanaman semusim yang biasanya dipungut hasilnya untuk kebutuhan pangan yang bersifat harian (jangka pendek) ada beberapa jenis seperti cabai, kapulaga. Bahkan pada beberapa tempat atau pada musim hujan, padi juga ditanam di bawah tegakan kayu.

Pada 10 tahun terakhir ini penanaman pohon-pohonan oleh masyarakat di desa-desa Jawa, khususnya di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah, semakin meningkat jumlah batang dan luasannya (Arupa, 2010). Hal ini karena adanya dorongan menanam dari pihak pemerintah dan dari masyarakat sendiri. Masyarakat menanam pohon kayu dan pohon buah-buahan di area lahan kering pekarangan dan tegalan. Pada umumnya pengembangan lahan kering seperti ini terjadi di kawasan lahan kurang produktif, kurang subur, dan kritis. Masyarakat pedesaan di Indonesia, khususnya di Jawa sangat menyadari bahwa mereka harus segera memulihkan kesuburan dan produktivitas lahan-lahan kritis agar dapat memberikan manfaat pada keseimbangan lingkungan dan membantu pendapatan masyarakat. Pola pemanfaatan lahan masyarakat yang memadukan tanaman kayu dengan tanaman pertanian (*agroforestry*) terus

Universitas Indonesia

berkembang. Berdasarkan data Ditjen RLPS, Departemen Kehutanan (2009) dinyatakan bahwa total luas hutan di seluruh Indonesia yang kini tercatat seluas 137,09 juta ha, sedangkan luas total hutan rakyat di seluruh Indonesia mencapai 3.589.343 ha. Berdasarkan luas hutan rakyat di Indonesia di atas, ternyata 2.799.181 ha atau 77,98% diantaranya terdapat di Pulau Jawa. Sementara areal hutan rakyat di Sumatera menempati urutan kedua terluas yang mencapai 220.404 ha atau 6,14% dari keseluruhan luas hutan rakyat. Luasan hutan rakyat di Sulawesi mencapai 208.511 ha atau 5,81%. Wilayah yang memiliki luasan hutan rakyat paling rendah adalah Papua dan Papua Barat yang hanya mencapai 14.165 ha atau 0,39%.

Berikut disajikan potensi hutan rakyat yang terdiri dari populasi 7 jenis tanaman yang dikembangkan di hutan rakyat dan tersebar di pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa (Tabel 1.1).

Tabel 1.1 Populasi tujuh jenis pohon yang ditanam di hutan rakyat (dalam batang)

No.	Jenis Pohon	Potensi di daerah Jawa	Potensi di daerah Luar Jawa	Jumlah	Siap Tebang
1	Akasia	22.611.068	9.409.011	32.020.079	12.069.695
2	Bambu	29.139.388	8.786.890	37.926.278	6.721.780
3	Jati	50.119.621	29.592.858	79.712.479	18.446.024
4	Mahoni	39.990.730	5.268.811	45.259.541	9.497.192
5	Pinus	3.521.107	2.302.757	5.823.864	2.715.576
6	Sengon	50.075.525	9.758.776	59.834.301	24.613.228
7	Senokeling	2.008.272	344.379	2.352.651	742.513
	Jumlah	197.465.711	65.463.482	262.929.193	74.806.038

Sumber : Data diolah berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2003¹

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jenis pohon yang banyak ditanam di hutan rakyat adalah jati, yaitu sebanyak 79,7 juta batang. Pohon jati ini banyak ditanam di Pulau Jawa, yaitu sebanyak 50,1 juta batang (sebanyak 26,5% berada di Provinsi Jawa Tengah) dan di luar Jawa sebanyak 29,6 juta batang. Untuk pohon sengon, pohon ini juga banyak ditanam di Pulau Jawa, yaitu sebanyak 50 juta batang, sedang di luar Pulau Jawa jumlahnya sekitar 9,8 juta

¹ Lihat lampiran 2 untuk melihat data lengkapnya

batang (Tabel 1.1). Secara keseluruhan jenis pohon sengon menempati urutan ke 2 setelah jati. Di Pulau Jawa, pohon sengon banyak terkonsentrasi di Provinsi Jawa Tengah. Jumlah pohon sengon keseluruhan yang ditanam di hutan rakyat adalah sebesar 59,8 juta batang dan dari jumlah tersebut pohon sengon yang siap ditebang sebanyak 24,6 juta batang.

Jumlah pohon akasia yang tumbuh di Pulau Jawa ada sekitar 22,6 juta batang, sedangkan yang di luar Pulau Jawa sebanyak 9,4 juta batang. Di Jawa, pohon akasia banyak ditanam di Sumatera Selatan (7,2%) dan Lampung (5,04%). Untuk jumlah pohon mahoni yang ditanam di lahan rakyat sebesar 45,3 juta batang dan sebanyak 9,5 juta batang siap dipanen. Untuk penyebaran pohon mahoni banyak ditanam di Pulau Jawa dibanding di luar Pulau Jawa, yaitu masing-masing sebesar 40 juta batang dan 5,3 juta batang. Di Pulau Jawa sendiri, pohon mahoni banyak ditemukan di provinsi Jawa Tengah (39%). Sementara itu untuk jenis pohon pinus dan sonokeling masing-masing berjumlah 5,8 juta batang dan 2,4 juta batang. Dari jumlah tersebut, pohon yang sudah siap ditebang masing-masing berjumlah 2,7 juta batang dan 742 ribu batang. Seperti halnya jenis-jenis yang lainnya, jenis pohon pinus dan sonokeling ini banyak ditanam di hutan rakyat di Pulau Jawa. Pohon pinus dan sonokeling masing-masing banyak ditemukan di provinsi Jawa Timur (21,1%) dan Jawa Tengah (34,3%). Untuk tanaman bambu, tanaman ini banyak tersebar di Pulau Jawa yaitu 29,1 juta batang, sedangkan di luar Pulau Jawa berjumlah 8,8 juta batang. Bambu yang siap dipanen ada sekitar 20.425 batang. Di Pulau Jawa terdapat 28% bambu yang tersebar di Jawa Barat.

Dari Tabel 1.1 diatas terlihat bahwa potensi hutan rakyat sebanyak 262.929.193 batang yang terdiri dari jenis pohon jati, sengon, mahoni, bambu, akasia, pinus, dan sonokeling. Jumlah pohon yang siap ditebang sebanyak 74.806.038 batang. Potensi hutan rakyat yang cukup besar tersebut mampu mendukung pasokan bahan baku industri kehutanan seperti untuk industri mebel dan bangunan (Sukardayati, 2006).

Salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki hutan rakyat adalah Kabupaten Wonosobo. Wonosobo merupakan satu dari 35 daerah tingkat II di propinsi Jawa Tengah yang terletak hampir tepat di tengah Pulau Jawa di kaki

Universitas Indonesia

Gunung Sindoro dan Sumbing (Chehafudin, 2010). Nama Wonosobo berasal dari dua kata yaitu “Wono” dan “Sobo”. Wono yang berarti alas atau hutan dan Sobo berarti mengunjungi, sehingga Wonosobo bisa diartikan kawasan hutan yang banyak dikunjungi². Hutan rakyat merupakan budaya pertanian turun temurun di desa-desa Wonosobo. Hutan rakyat dalam pemahaman mereka berarti sumber daya yang bisa berguna bagi pertanian, peternakan, dan kebutuhan hidup lainnya. Itu sebabnya dalam konteks pertanian mereka tidak dikenal sistem tanaman monokultur atau tanaman satu lapis (Arupa, 2002).

Wilayah Wonosobo masuk dalam Kawasan Dataran Tinggi Dieng (2.088 m dpl) yang terletak pada ketinggian 270-2.250 meter di atas permukaan laut dan memiliki curah hujan yang tinggi (2270-4835 mm/th). Topografi umum Wonosobo yaitu berbukit dan bergunung. Lebih dari 27% lahan di Wonosobo memiliki kemiringan di atas 40% dan lebih dari 50% lahan memiliki kemiringan 15-40%. Kondisi fisik wilayah ini menggambarkan Wonosobo sangat rentan terhadap bahaya longsor dan erosi. Hutan rakyat di Wonosobo, pada saat ini luasnya mencapai 19.492 ha, dan luas ini adalah 10% dari luas hutan rakyat di seluruh Jawa Tengah (Wonosobo dalam angka, 1999). Keberadaan hutan rakyat tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga sangat penting sebagai sistem pendukung pertanian desa, penyangga ekosistem, penjaga stabilitas ekologi, dan pengatur tata air wilayah. Kabupaten Wonosobo memang memiliki peranan strategis dalam keseimbangan ekosistem beberapa daerah bawahnya terutama Kabupaten Purworejo, Kebumen, Banjarnegara, Banyumas hingga Cilacap. Hal ini berkaitan dengan posisi Wonosobo yang merupakan hulu dari beberapa sungai besar yaitu: Serayu, Opak-Oyo, Luk Ulo, dan Bogowonto. Di Wonosobo juga terdapat Waduk Wadaslintang yang memiliki luas muka air sebesar 1.320 ha dengan volume air sebesar 443 juta m³. Waduk ini sangat berperan dalam memenuhi kebutuhan air bagi ribuan lahan pertanian di daerah bawahnya (Arupa, 2004).

Produksi pertanian yang naik dan produksi kayu rakyat yang juga meningkat akan semakin menggairahkan roda perekonomian di desa. Sejauh ini kayu albasia sebagai tanaman pokok di hutan rakyat masih menjanjikan pasar

² Sarwanto Priadi, 2002. Wonosobo yang Aku Banggakan

yang prospektif. Masyarakat desa tetap yakin akan potensi pasar kayu albasia. (Suprpto, 2010). Kayu albasia yang paling banyak ditanam di hutan rakyat, merupakan tanaman cepat tumbuh (*fast growing*) dan bisa dipanen dalam jangka waktu 5 atau 6 tahun. Orientasi ekspor dengan peluang pasar yang sangat terbuka membuat permintaan akan kayu jenis ini tetap besar, sehingga nilai ekonomisnya sangat baik. Di sisi lain, untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek masyarakat dapat mengandalkan kopi, kapulaga, salak dan beraneka tanaman lain yang ada di hutan rakyat.

Keberadaan hutan rakyat tidaklah semata-mata akibat interaksi alami antara komponen botani, mikro organisme, mineral tanah, air, dan udara, melainkan juga adanya peran manusia dan kebudayaannya. Kreasi budaya yang dikembangkan dalam interaksinya dengan hutan, berbeda-beda antar kelompok masyarakat (Awang, 2005). Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian tentang potensi dan kondisi hutan rakyat sehingga hutan rakyat dapat dikelola secara lestari (BPS, 2006). Berdasarkan uraian di atas, maka saya tertarik melakukan kajian tentang sistem hutan rakyat di Dusun Bogoran, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.

1.2. Masalah Penelitian

Hutan rakyat merupakan hutan yang dimiliki oleh masyarakat yang dinyatakan dalam kepemilikan lahan. Di dalam hutan rakyat, para petani telah lama mengembangkan pola tanam dengan memiliki keberagaman yang tinggi. Tanaman produktif yang menyusun hutan rakyat di sebuah desa bisa mencapai ratusan jenis. Areal hutan rakyat berisi pohon-pohon kayu, buah-buahan, tanaman musiman, pakan ternak, dan berbagai jenis tumbuhan lainnya (Adi, dkk, 2010).

Berdasarkan data Ditjen RLPS, Departemen Kehutanan (2009) dinyatakan bahwa total luas hutan di seluruh Indonesia yang kini tercatat seluas 137,09 juta ha, sedangkan luas total hutan rakyat di seluruh Indonesia mencapai 3.589.343 ha. Berdasarkan luas hutan rakyat di Indonesia di atas, ternyata 2.799.181 ha atau 77,98% di antaranya terdapat di Pulau Jawa. Pengembangan pengelolaan hutan rakyat yang sudah ada sejak lama terus dilakukan oleh masyarakat. Hal ini terkait

adanya prospek yang cerah akan keberadaan hutan rakyat untuk mendukung pasokan bahan baku industri tanpa mengabaikan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan pemilik lahan khususnya. Di Gunungkidul (Provinsi DIY), misalnya, selama tahun 2005 mampu mengirimkan kayu yang berasal dari hutan rakyat ke daerah Klaten, Jepara, Pekalongan dan industri mebel lain di Jawa Tengah sebanyak 96.636,373 m³ kayu glondongan. Dari jumlah kayu yang dikirim tersebut, 83.215,875 m³ berupa kayu jati, 6.933,120 m³ kayu mahoni, 3.834,502 m³ kayu sonokeling, sisanya berupa kayu akasia dan campuran. Lahan di Gunungkidul yang dulu dikenal gundul dan gersang sekarang mampu memasok kayu untuk kebutuhan industri mebel yang diambil dari hutan rakyat.

Hutan rakyat memiliki beberapa sifat yang mencirikan sistem wanatani intensif, beberapa di antaranya adalah keragaman dan kelestarian ekologis, serta stabilitas ekonomi yang lebih tinggi (Arupa, 2010). Dalam menjaga kestabilan ekologi, para petani di hutan rakyat memiliki cara dalam pemanenan sengon yaitu mereka tidak menebangnya pada waktu yang sama sehingga lahan hutan rakyat hanya sedikit mengalami gangguan dan pada saat yang sama tanaman lain masih terus berproduksi (Arupa, 2010). Praktik seperti ini bertujuan untuk memberi kesempatan pada pohon-pohon yang usianya tidak seragam agar terlebih dahulu masak tebang sebelum akhirnya dipanen. Alasan lainnya, para petani melihat bahwa tebang habis di hutan negara telah menyebabkan menurunnya kesuburan tanah. Prinsip kelestarian juga terlihat dari mekanisme permudaan hutan. Setiap tegakan sengon yang ditebang, petani menggantinya dengan tiga buah tanaman baru. Bibit tanaman ini berasal dari permudaan alami yang kemudian dipindahkan tempatnya. Para petani menanam pohon di lereng-lereng perbukitan agar sawah mereka tidak kekeringan, agar desa mereka tidak tertimpa longsor, dan agar mereka tetap mendapat cukup air (Arupa, 2002).

Adanya berbagai jenis tanaman dalam satu lahan di hutan rakyat, dapat memberikan manfaat ekonomi bagi kebutuhan sehari-hari para petani. Rumput, tanaman polong-polongan (*legum*), dan rambahan jagung dapat juga digunakan untuk pakan sapi dan kambing. Para petani juga memandang pemeliharaan tanaman kayu sebagai cara untuk menabung. Dengan demikian, penghasilan tunai

yang didapatkan dari lahan lebih stabil dan bagi warga nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan lahan yang ditanami sedikit jenis tanaman. Selain itu, menanam di hutan rakyat merupakan cara untuk menjaga stabilitas penghasilan ketika harga-harga produk pertanian anjlok di pasaran. Jika salah satu harga produk anjlok, para petani masih memiliki produk lain yang harganya relatif baik.

Dari studi yang telah saya paparkan tentang hutan rakyat dapat dilihat bahwa hutan rakyat memiliki banyak manfaat baik dari sisi produksi, ekonomi, maupun ekologi. Namun studi tersebut belum memuat hal yang lebih rinci tentang komunitas lokal. Oleh karena itu, saya terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang konteks pengelolaan hutan rakyat di tingkat lokal. Berkaitan dengan masalah di atas, timbul beberapa pertanyaan yang merupakan ruang lingkup pertanyaan dalam penelitian, yaitu :

1. Bagaimana kegiatan pengelolaan hutan rakyat yang dilakukan di Dusun Bogoran;
2. Berapa besar potensi hutan rakyat di Dusun Bogoran;
3. Bagaimana kaitan antara pengelolaan hutan dengan pandangan hidup dan relasi sosial warga Dusun Bogoran.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gambaran deskriptif dengan melakukan sebuah etnografi tentang pengelolaan hutan rakyat di Dusun Bogoran, Wonosobo.

Berdasarkan perumusan masalah maka tujuan penelitian dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan kegiatan pengelolaan hutan rakyat di Dusun Bogoran;
2. Mengetahui potensi hutan rakyat di Dusun Bogoran;
3. Mengetahui kaitan antara pengelolaan hutan dengan pandangan hidup relasi sosial warga Dusun Bogoran.

1.4. Signifikansi Penelitian

Secara teoritis skripsi ini dapat memberikan sumbangan akademis yakni menambah literatur di bidang Antropologi, khususnya mengenai kegiatan pengelolaan hutan rakyat dalam hubungannya dengan pemberdayaan masyarakat dan perubahan pendapatan warga yang bersangkutan. Penelitian ini lebih jauh diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif terkait dengan pengaruh pengelolaan hutan rakyat pada warga tingkat lokal.

Secara praktis skripsi ini diharapkan menjadi tambahan informasi bagi instansi-instansi terkait serta pihak lainnya untuk penelitian selanjutnya. Di dalam skripsi ini juga tersedia informasi penting terkait sumber daya hutan rakyat yang berguna dalam mendukung kegiatan operasional dan perencanaan strategis pengelolaan hutan rakyat yang terintegrasi dan lestari. Selain itu juga dapat sebagai bahan masukan kepada pemerintah daerah, *stake holders*, dan berbagai pihak pengelola yang terlibat di dalam pengembangan pengelolaan hutan rakyat di Dusun Bogoran.

1.5. Konsep Pemikiran

Hutan Rakyat dalam pengertian UU No.41/1999 tentang kehutanan adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik. Definisi ini diberikan untuk membedakannya dari hutan negara, yaitu hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak milik atau tanah negara. Hutan rakyat atau hutan milik adalah semua hutan yang ada di Indonesia yang tidak berada di atas tanah yang dikuasai oleh pemerintah, dimiliki oleh masyarakat, proses terjadinya dapat dibuat oleh manusia, dapat juga terjadi secara alami, dan dapat juga karena rehabilitasi lahan kritis. (Jaffar, 1993).

Luas kawasan hutan Indonesia mencapai 120 juta ha atau sekitar 62% luas daratan Indonesia. Namun meningkatnya laju konversi hutan yang diperkirakan mencapai 2 juta ha per tahun untuk lahan pertanian, pemukiman serta pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat disadari telah mengurangi luasan serta fungsi hutan yang pada gilirannya menimbulkan banyak masalah seperti kerusakan sistem ekologi, kepunahan flora dan fauna, banjir, kekeringan bahkan perubahan iklim global (Tubur, 2008). Berbagai upaya untuk menjaga hutan agar tetap lestari

terus dilakukan baik itu dari segi kebijakan ataupun rekomendasi teknis. Salah satu sistem yang kini tengah dikembangkan adalah sistem agroforestri. Hairiah, et al., (2003) menjelaskan bahwa agroforestri adalah cabang ilmu pengetahuan yang berupaya mengenali praktik petani yang telah sejak dahulu dilakukan dan mengembangkan keberadaan sistem agroforestri baik itu pada aspek teknik, biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya yang selalu berubah dari waktu ke waktu. Dalam bahasa Indonesia, kata *agroforestry* dikenal dengan istilah wanatani.

Krstansky mengatakan bahwa agroforestri adalah program manajemen hutan yang mempertemukan hutan (pohon hutan) dengan tanaman pertanian (Udawatta dkk. 2002:1214). Foresta mendefinisikan agroforestri sebagai nama bagi sistem-sistem dan teknologi penggunaan lahan dimana pepohonan berumur panjang (termasuk semak, palem, bambu, kayu, dll.) dan tanaman pangan atau pakan ternak berumur pendek diusahakan pada petak lahan yang sama dalam suatu pengaturan ruang atau waktu (de Foresta dkk. 2000:1).

Praktik agroforestri telah dilakukan dalam bentuk hutan rakyat di beberapa daerah dengan istilah lokal yang berbeda, di Jawa dikenal dengan sebutan *Talun* atau pekarangan, *Leuweung* (Sunda), *Mamar* (NTT), *Tembawang* (Kalimantan Barat), *Lembo* (Kalimantan Timur), dan *Repong* (Lampung) (Soendjoto, dkk, 2008). Penerapan sistem agroforestri telah berkembang di masyarakat dengan variasi jenis tanaman di setiap daerah berbeda-beda. Masyarakat di Jawa Barat dan Jawa Tengah misalnya, banyak mengusahakan jenis sengon/jeunjing (*Paraserianthes falcataria*) (Haeruman et al., 1986; Wahyuningsih, 1993), di Gunung Kidul dan Kulonprogo-Yogyakarta banyak mengembangkan jenis jati (*Tectona grandis*) (Hardjanto, 2001), dan di Bangkalan-Madura masyarakat mengusahakan jenis *Acacia auriculiformis* (Widjayanto, 1992).

Di Kabupaten Wonosobo diketahui terdapat empat pola sistem agroforestri. Pola 1 adalah tanaman kayu (sengon, mahoni, suren), tanaman semusim (ubi kayu, pisang, cabai), dan tanaman perkebunan (kopi, kelapa); pola 2 adalah tanaman kayu (sengon, mahoni), tanaman semusim (ubi kayu, pisang), tanaman buah-buahan (durian, nangka, jambu, jengkol, petai), dan tanaman perkebunan (kopi, kelapa); pola 3 terdiri atas tanaman kayu (sengon) dan tanaman perkebunan (kopi, kelapa, cengkeh); pola 4 adalah tanaman kayu (sengon,

Universitas Indonesia

mahoni, suren), tanaman buah-buahan (durian, nangka, jengkol, pete, melinjo), dan tanaman perkebunan (kopi, kelapa, cengkeh, kapulaga) (Andayani, 2002).

Dwiprabowo dan Prahasto (2002) melaporkan bahwa di Sukabumi komoditas tanaman yang diusahakan di hutan rakyat terdiri atas tanaman kayu dan tanaman semusim yang ditumpang-sarikan. Tanaman kayu mencakup sengon, jati, mahoni, mindi (*Melia sp.*), dan tanaman buah penghasil kayu, seperti durian, nangka (*Artocarpus communis*), mangga, sawo, dan rambutan. Tanaman semusim bervariasi, tetapi paling banyak adalah pisang. Di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, hutan rakyat berupa tanaman pohon Akasia yang terdiri dua jenis (daun kecil dan daun lebar), rambutan yang terdiri atas empat varietas (garuda, antalagi, sitimbul, sibatuk), dan kelapa yang tergolong kelapa dalam, kelapa genjah dan kelapa hibrida (Soendjoto, dkk., 2008). Di Kabupaten Tana Toraja dikenal Hutan Rakyat Tongkonan, yaitu hutan rakyat campuran. Jenis tanaman yang diusahakan antara lain: Cemara Gunung/Buangin (*Casuarina junghuhniana*), Aren (*Arenga pinata*), Uru (*Elmerilia sp.*), Sengon (*Paraserianthes falcataria*), Bambu (*Bambusa sp.*), Suren (*Toona sureni*). Untuk tanaman perkebunan yaitu langsung (*Lancium domesticum*), durian (*Durio zibethinus*), cengkeh, kopi (*Coffea robusta*), coklat (*Theobroma cacao*), vanili (*Vanilla fragrans*), dan untuk tanaman pekarangan adalah ubi jalar (*Ipomoea batatas (L) Lamb*), talas, mangga, nangka, jeruk sementara jenis bambu yang diusahakan adalah *pattung*, *parrin*, *tallang*, *bulo* dan bambu Ao'/Aur (*Hadijah*). Di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, pengelolaan hutan rakyat selalu berkaitan dengan hutan adat. Pengelolaan hutan adat sendiri masih mengandalkan hutan alam sementara hutan tanaman masih dalam tahap pengenalan. Pengelolaan hutan adat mulai digalakkan ketika dikeluarkan surat keputusan Gubernur Papua No. 522.2/3386/SET/2002 tentang hak pemungutan hasil hutan kayu oleh masyarakat adat (IPK-MA) melalui wadah KOPERMAS (koperasi masyarakat) (Tokede et al, 2005), sementara praktek pengelolaan hutan tanaman umumnya masih terbatas dilakukan oleh masyarakat transmigrasi dan beberapa masyarakat lokal asli Papua dengan menanam kombinasi tanaman Gamal (*Gliricida sp*) dengan tanaman kakao (*Theobroma cacao L.*) ataupun kopi (*Coffea sp*).

Beberapa produk yang dihasilkan dari tanaman hutan rakyat antara lain kayu (sengon, akasia daun kecil), getah (kemenyan *Styrax benzoin*, damar *Shorea javanica*), buah (kemiri, pala *Myristica fragrans*), dan bambu (Suharjito et al., 2000). Hutan rakyat semakin dibutuhkan karena mampu menyumbang 30% dari kebutuhan kayu nasional, baik untuk pertukangan, bahan baku industri, maupun kayu bakar. Secara khusus di Pulau Jawa 70% konsumsi kayu dipenuhi dari hutan rakyat (RJHR, 2001; Suhardono, 2003).

Pengelolaan lahan kebun dengan sistem agroforestri berperan penting bagi petani dan lingkungan. De Foresta dan Michon mengatakan bahwa peranan sistem ini bagi petani di antaranya ialah untuk perbaikan gizi, peningkatan pendapatan, dan cadangan sumber daya saat ekonomi sulit (de Foresta dkk. 2000: 12). Di samping memberikan kontribusi pada petani, sistem agroforestri juga berkontribusi bagi lingkungan, yakni dalam konservasi biodiversitas. Praktik pertanian agroforestri memberikan keuntungan ganda dengan menyertakan produktivitas tinggi dan pendapatan tambahan di samping menjaga kesuburan tanah (Dawson dkk. 2009:30). Agroforestri menawarkan keuntungan untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi degradasi tanah, serta merupakan sarana ekosistem pada negara industri (Nair, 2007:25). Sistem ini berperan dalam penganeekaragaman pangan yang memiliki potensi untuk mengatasi kelaparan dan kemiskinan, yakni dalam peran menjamin ketahanan pangan terutama di negara-negara berkembang (Nair, 2007).

Ada beberapa penelitian tentang hutan rakyat yang telah dilakukan di antaranya ditulis oleh San Afri Awang yang merupakan salah satu anggota AruPa (Awang, 2002) yang menceritakan tentang masyarakat yang membangun hutan rakyat di lahan milik untuk memperbaiki kondisi lingkungan hidup. Salah satu kasus yang diperlihatkannya adalah di kawasan Kapur Selatan (pegunungan kapur di bagian selatan Jawa yang membentang dari Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah sampai Kabupaten Jember, Jawa Timur). Pembangunan hutan rakyat yang didominasi jati dan mahoni telah mengubah kondisi wilayah yang kering, panas, dan gersang menjadi kawasan hijau, subur, dan sejuk. Hutan rakyat di Pegunungan Menoreh juga cukup berdampak pada penurunan jumlah bencana alam dan tanah longsor. Bahkan beberapa kawasan di Wonosobo, Temanggung,

Universitas Indonesia

Magelang menjadi bergantung pada keberadaan hutan rakyat untuk tangkapan air sebagai akibat cepatnya kerusakan hutan negara dan perluasan area pengembangan kota.

Selanjutnya adalah penelitian hutan rakyat yang dilakukan oleh Awang dkk di Desa Ngalian (Awang, dkk 2007). Desa Ngalian berada di wilayah Kecamatan Wadas Lintang Kabupaten Wonosobo. Desa ini memiliki tujuh dusun yaitu Dusun Sabrangwetan, Larangan, Sigigil, Lemiring, Blawong, Gedongan, dan Pukiran. Luas Desa Ngalian 789.91 ha dengan topografi bergelombang dan berbukit-bukit. Ketinggiannya sekitar 300-525 mdpl. Jumlah penduduk berjumlah 1.132 KK atau 5.335 jiwa. Hutan rakyat di Ngalian merupakan sumber penghidupan bagi warga desanya. Luas hutan rakyatnya 350.03 ha atau 44,31% dari keseluruhan luas wilayah desa. Hubungan erat antara warga dan hutan terlihat dari aktifitas keseharian warganya terutama dalam hal mata pencaharian yang berasal dari hutan rakyat seperti penderes, pedagang kayu, pedagang buah-buahan, dan pertukangan. Budaya berhutan dari generasi ke generasi melahirkan sebuah tradisi yang bijaksana dari sisi ekonomi dan lingkungan. Tradisi yang khas dalam kehidupan sehari-hari adalah menderes³. Hasil gula kelapa ini dapat dikatakan sebagai penyangga kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya, Awang juga menceritakan bahwa warga Ngalian menandai batas-batas kepemilikan lahan di hutan rakyat dengan parit, sungai, atau pepohonan tertentu. Mereka membagi beberapa blok di satu kawasan desa atau dusun. Satu blok hutan rakyat terdapat 5-15 pemilik tergantung luas blok. Warga membangun hutan rakyatnya atas inisiatif sendiri. Keterbatasan tenaga kerja untuk menggarap tanah pertanian membuat hutan rakyat menjadi pilihan. Sekarang mereka merasakan dampak keberhasilan hutan rakyat dengan semakin membaiknya lingkungan yang dulunya kritis dan susah air. Mereka mengelola sumber daya alam dengan membaginya dalam berbagai bentuk tata guna lahan. Mereka menanam jenis tanaman campuran di lahan hutan rakyat dalam jangka waktu yang panjang. Pola tanam tersebut berdasarkan pada kemiringan lahan. Lahan datar biasanya ditanami tanaman kayu, perkebunan dan pangan. Warga menerapkan pola tanam campuran tanaman kayu, pertanian dan tanaman buah-

³ Menderes yaitu mengambil air nila kelapa dan kemudian mengolahnya menjadi gula kelapa.

buah di lahan miring atau “perengan”. Tanaman kayu berfungsi sebagai tanaman penguat teras di lahan miring. Tanaman buah-buahan yang sering dijumpai di lahan miring adalah kelapa. Warga Ngalian mengelola hutan rakyat dalam beberapa tahapan yaitu pemilihan jenis, persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, perlindungan, dan penebangan atau pemanenan. Pemilihan jenis tanaman dipengaruhi beberapa faktor kesesuaian lahan, pertumbuhan, tenaga kerja, harga jual, dan kemudahan pemeliharaan. Jenis tanaman kayu yang banyak digemari warga adalah sengon, mahoni, dan jati. Selain itu jenis tanaman seperti suren, senokeling, dan akasia kurang diminati oleh masyarakat. Pencurian kayu di hutan rakyat hampir tidak pernah terjadi. Antar pemilik lahan saling menjaga lahan hutan rakyat dengan menandai batas antar lahan dengan tanaman suren atau nanas. Setelah tanaman cukup besar, masyarakat akan melakukan penebangan yang dilakukan dengan sistem tebang pilih atau tebang habis. Di Desa Ngalian, warga biasanya menjual kayu masih dalam bentuk tegakan kayu berdiri. Mereka lebih banyak menjualnya kepada para tengkulak dengan cara ditebas atau borongan. Ada yang menjual para pada penebas, namun tidak langsung ditebang pada saat itu juga. Biasanya penebas akan menebangnya menunggu satu bulan atau lebih. Aktor-aktor yang terlibat dalam perdagangan ini adalah petani, penebas, pengepul, dan pemilik *bandsaw*⁴.

Penelitian tentang pengelolaan hutan rakyat tidak bisa terlepas dari kajian tentang petani karena petani merupakan aktor yang melakukan pengelolaan hutan rakyat tersebut. Salah satu konsep mengenai petani seperti yang dikemukakan oleh Kroeber (1948: 284). Menurut Kroeber, petani adalah suatu masyarakat terbagi (*part societies*) dengan kebudayaan terbagi (*part culture*). Mereka hidup di daerah pedesaan dan berdekatan dengan kota-kota pasar. Petani membentuk sebuah bagian kelas dari sebuah populasi yang lebih besar, yang biasanya juga mengandung pusat-pusat kota. Bila dibandingkan dengan masyarakat yang masih sederhana, petani tidaklah terisolasi dan tidak memenuhi kebutuhannya sendiri (*self sufficient*).

⁴ gergaji pembelah kayu menjadi papan, bentuknya melingkar seperti pita dan digerakkan dengan listrik atau mesin generator diesel

Dari segi perilaku ekonominya, petani memiliki orientasi yang dominan kepada subsistensi (Scott, 1981:19). Mereka lebih mengutamakan apa yang dianggap aman dan dapat diandalkan daripada keuntungan yang dapat diperoleh dalam jangka panjang. Prinsip “dahulukan selamat” (*safety first*) adalah hal yang utama. Persoalan-persoalan seperti keuntungan yang dapat diperoleh dari investasi, hasil tiap unit lahan, produktivitas kerja, pada hakikatnya merupakan persoalan nomor dua. Petani lebih mementingkan kegiatan-kegiatan subsistensi yang rutin sudah terbukti memadai di waktu lampau, daripada berusaha mencari keuntungan. Dalam menjelaskan mekanisme masyarakat petani, Scott memberikan sebuah model normatif yang menggambarkan kehidupan ekonomi petani yang dekat dengan pola hubungan sosial yang pantas, wajar, dan adil. Menurut Scott, prinsip “*norm of reciprocity*” dan jaminan subsistensi berada dalam pola hubungan itu. Redfield (1985:88) melukiskannya sebagai suatu “kehidupan yang baik” dari nilai-nilai petani yang berlaku.

Menurut George Stuart, seperti dikutip Redfield (1985:90), salah satu pola hubungan itu adalah sikap intim dan hormat terhadap tanah yang menganggap pekerjaan pertanian sebagai pekerjaan yang baik dan kegiatan komersialisasi sebagai pekerjaan yang tidak terlalu baik. Ia menyebutnya sebagai “rasa samar-samar tentang sesuatu yang pantas dihormati di dalam tanah dan kegiatan pertanian”. Bagi petani yang seluruh hidupnya tergantung dari hasil tanah garapan, tanah dianggap sebagai tanah pusaka (*heirloom land*) dan tidak sekadar simbol apalagi mata dagangan (*commodity*). Dilihat dari cara-cara penguasaan dan perlakuan petani atas tanah – dan bukan dari kepemilikan tanah – terlihat adanya kedekatan hubungan petani dengan tanah sebagai aset hidupnya. Pola relasi antara tanah dan kehidupan petani tersebut oleh Redfield digambarkan sebagai suatu dunia yang dipenuhi sikap hidup tipikal, dalam arti, tanah adalah sumber penghidupan petani yang utama walaupun bukan berarti pemilikan tanah kemudian menjadi sesuatu yang secara khusus menjadi tuntutan.

1.6. Penelitian Lapangan

Penelitian yang saya lakukan berlangsung dalam waktu Februari hingga Mei 2011. Penelitian dilaksanakan di Dusun Bogor, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Saya tinggal di rumah Kepala Desa Bogor yang rumahnya berada di Dusun Bogor sehingga saya bisa mengambil data dan mengikuti keseharian masyarakatnya. Alasan saya memilih Bogor sebagai tempat penelitian saya karena hutan rakyat merupakan budaya turun temurun mereka dalam mengoptimalkan lahan di sekitarnya dan juga pada tahun 1998 Dusun Bogor pernah memperoleh juara nasional pengelolaan hutan rakyat tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Departemen Kehutanan (Awang, dkk, 2002).

Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini saya melakukan metode observasi partisipatif yaitu dengan melakukan pengamatan dan mengikuti kehidupan sehari-hari para informan saya. Saya juga melakukan pengumpulan *life history* dari lima warga petani Bogor. Dalam penelitian ini saya mencoba fokus mencari keterangan mengenai pengetahuan lokal, pengalaman hidup, serta akibat yang dimunculkan oleh pengelolaan hutan rakyat di Bogor. Saya menggunakan instrumen wawancara mendalam (*depth interview*) dengan informan 5 keluarga petani. Informan-informan ini saya temukan seiring penelusuran saya mengenai fenomena-fenomena yang timbul sebagai poin penting dari pengelolaan hutan rakyat di Bogor. Informan saya adalah keluarga Mbah Karto, Pak Emboh, Mbak Sulis, Mbah Manten, dan Ibu Parsi.

Mbah Karto merupakan gambaran keluarga petani yang memiliki keluarga besar dan keluarga ini merupakan warga yang memiliki lahan paling luas di Bogor. Mbah Manten merupakan gambaran tentang keluarga yang sudah berusia tua. Mbah Manten adalah salah satu tokoh yang dihormati karena ia adalah lurah pertama di Bogor. Mbak Sulis merupakan gambaran tentang keluarga muda yang ada di Bogor. Keluarga Pak Emboh merupakan gambaran petani yang tidak memiliki lahan, ia dan ayahnya menjadi petani pembuat arang. Keluarga Ibu Parsi menggambarkan tentang keluarga yang memiliki lahan yang kecil di Bogor.

Proses penelitian yang saya lakukan melibatkan pengamatan yang cukup panjang terhadap suatu kelompok, dimana dalam pengamatan tersebut saya terlibat dalam keseharian hidup informannya atau melalui wawancara satu per satu dengan anggota komunitas tersebut. Saya mempelajari arti atau makna dari setiap perilaku, bahasa, dan interaksi dalam komunitas. Aktifitas yang saya lakukan yaitu saya masuk ke dalam sebuah *setting* sosial dan mengenal orang-orang yang terlibat di dalamnya, dan *setting* tersebut tidak saya ketahui secara mendalam sebelumnya. Saya berpartisipasi dalam rutinitas sehari-hari di *setting*/tempat penelitian ini, lalu mengembangkan secara terus menerus relasi dengan masyarakat di dalamnya, dan mengamati semua yang terjadi. Aktifitas saya lainnya yaitu menulis secara rutin dan sistemik apa yang saya observasi dan pelajari sewaktu berpartisipasi dalam rentetan kehidupan sehari-hari dengan *the others*. Jadi, saya menciptakan sebuah pengakumulasian rekaman tulisan dari observasi dan pengalaman-pengalaman ini. Aktifitas yang saya lakukan sama seperti metode etnografi yang dituliskan oleh Emerson (1995).

Saya melakukan pendekatan pada aktifitas-aktifitas dan pengalaman sehari-hari dari *the others*, yaitu kelompok masyarakat yang saya teliti. Pendekatan yang saya lakukan memerlukan pendekatan secara fisik dan sosial pada kegiatan kehidupan sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu saya berada di tengah-tengah masyarakat Bogor dan berusaha mengikuti setiap adegan kunci dari kehidupan mereka untuk mengobservasi dan memahami mereka. Akan tetapi untuk melakukan pendekatan, ada komponen yang jauh lebih signifikan yaitu saya melihat dengan lebih dalam dengan cara imersi/membraur di dunia *the others* untuk memahami pengalaman apa yang berarti dan penting di hidup mereka. Saya melihat dari dalam tentang bagaimana warga petani Dusun Bogor menjalani hidupnya dan bagaimana mereka menjalankan aktifitas mereka sehari-hari. Kegiatan inilah yang disebut imersi. Dalam penelitian ini saya juga melibatkan dua hal dimana saya berada dengan masyarakat untuk melihat bagaimana mereka merespon kejadian yang mereka hadapi dan mengalami sendiri kejadian dan keadaan yang memberikan perkembangan bagi mereka. Inilah imersi menurut Emerson. 1995:2).

Saat awal melakukan penelitian ini, saya banyak dibantu oleh Bapak Kades. Ia memberikan saya banyak informasi tentang gambaran umum penduduk Bogor dan kebiasaan mereka. Saya juga dipersilahkan untuk menginap di rumahnya dan diperlakukan dengan ramah oleh Pak Kades dan istrinya serta anaknya yang masih kecil. Ketika penelitian berlangsung, saya banyak dibantu oleh keluarga Mbah Karto, terutama anaknya yang bernama Ibu Parti. Kedekatan saya dengan keluarga Mbah Karto juga merupakan kedekatan yang tidak disengaja karena ternyata Mbah Karto merupakan teman lama saudara saya yang tinggal di Kertek, Wonosobo. Saya mendapat informasi khusus tentang warga Bogor terutama gambaran tentang keluarga Mbah Karto dari keseharian mereka dan juga obrolan yang mereka ceritakan kepada saya. Saya diajak oleh Tia, anak Ibu Parti, untuk berkenalan secara langsung dan melihat keseharian warga Bogor. Selain itu, saya mengenal Mbah Manten ketika ia datang menjenguk istri Mbah Karto yang sedang sakit. Ibu Parti memperkenalkan saya kepadanya sebagai mahasiswi yang sedang melakukan penelitian tentang warga Bogor untuk penyusunan skripsi.

Untuk informan saya lainnya, yaitu Mbak Sulis, Pak Emboh, dan Ibu Parsi memang saya sudah mengenal secara tidak sengaja seiring dengan proses penelitian saya di Bogor. Awal mengenal Mbak Sulis karena ia pernah main ke rumah Pak Kades bersama anaknya, Fani. Mbak Sulis adalah adik kandung dari Pak Kades. Selain itu, awal cerita saya bertemu Pak Emboh yaitu ketika saya meminta izin ke Kantor Kepala Desa untuk melakukan penelitian di Bogor. Saya bermaksud mencari Pak Kades tetapi ia sedang tidak ada di tempat dan yang ada di sana hanya perangkat desa. Saya dipersilahkan menunggu oleh mereka. Saat menunggu, saya berpamitan kepada perangkat desa untuk jalan-jalan sekitar kantor Kepala Desa. Kantor ini sangat dekat dengan perkampungan Dusun Bogor yang memiliki tipe mengelompok. Ketika sedang berjalan, saya menuju seorang warga yang terlihat sedang sibuk memindahkan arang dan dibantu oleh anaknya yang masih berusia sekitar lima tahun. Saya menghampirinya dan mencoba mengobrol dengannya. Ia mengajak saya untuk berkunjung ke rumahnya. Ketika sampai ke rumahnya, ia memberikan saya teh dan kami sudah mulai tidak kaku mengobrolnya. Saat itu adalah hari Jum'at, maka ia berpamitan

Universitas Indonesia

untuk melaksanakan shalat Jum'at. Saya langsung diantar oleh Pak Emboh ke rumah Pak Kades. Untuk Ibu Parsi, saya mengenal beliau ketika ia membantu mengerjakan pekerjaan rumah Pak Lurah seperti mengepel, menyapu, menggosok, dan mencuci baju. Ketika ia sedang istirahat maka kami mengobrol untuk mengenalnya lebih dekat.

Dari perkenalan kepada lima informan saya ini, saya menjadi mengenal anggota keluarga mereka dan kerabat yang berhubungan dengan mereka sehingga saya dapat lebih dikenal oleh warga Bogor sebagai mahasiswi yang sedang melaksanakan penelitian di dusun mereka. Pada awalnya saya merasakan ada batas antara saya dan mereka. Saya mencoba mengembangkan peranan saya selama melakukan penelitian ini dan meresosialisasikan diri saya agar mendapatkan tempat yang strategis di tengah-tengah mereka hingga akhirnya mereka menerima saya dan mampu berbagi secara terbuka kepada saya. Berikut foto yang menggambarkan saya melakukan imersi. Foto ini menunjukkan bahwa saya mengikuti kegiatan sehari-hari mereka. Di keluarga Mbah Karto, saya mengikuti aktifitas keluarga mereka seperti menggiling kopi, menjemur padi, mengantar makanan untuk pekerja di ladang, pengajian, hingga bersantai-santai.



Gambar 1.1. Kegiatan keluarga Mbah Karto

Di keluarga Pak Emboh, saya mengikuti aktifitas keluarganya dari pagi hingga malam hari. Saya mengikutinya saat ia dan ayahnya pergi memotong batang pohon untuk membuat arang, lalu menemani ibunya Pak Emboh di rumah yang melakukan berbagai aktifitas seperti menyapu, memasak, hingga menyirih. Saya juga bergabung dengan anak-anak dan keponakannya Pak Emboh.



Gambar 1.2. Kegiatan keluarga Pak Emboh

Di keluarga Mbak Sulis, saya juga mengikuti kegiatan keluarganya dari pagi hingga malam hari. Saya menemaninya memasak, menjemur pakaian, mengepel rumah, hingga menjemur kopi. Saya juga menemani Mbak Sulis dan anaknya, Fani, bermain dan menonton TV dan berkumpul bersama dengan keluarga.



Gambar 1.3. Kegiatan keluarga Mbak Sulis

Untuk keluarga Mbah Manten, saya mengikuti kegiatannya sehari-hari. Beliau dan istrinya banyak berbagi cerita kepada saya. Kami mengobrol sambil meminum teh dan disajikan makanan.



Gambar 1.4. Kegiatan keluarga Mbah Manten

Untuk keluarga Ibu Parsi, saya mengikuti keluarganya dari pagi hingga malam hari. Saya menemani Ibu Parsi memasak, berkumpul bersama suami dan anaknya. Saya juga menemani suami Ibu Parsi berladang dan mengambil daun-daunan untuk makanan kambing



Gambar 1.5. Kegiatan Keluarga Ibu Parsi

Setelah merasakan beberapa lama tinggal di Dusun Bogor untuk mengamati secara terlibat dalam keseharian warga Bogor terkait dengan pengelolaan hutan rakyat. Kemudian saya menjauhkan diri dari *setting*/ lapangan penelitian dan mulai menuliskan apa yang saya amati dan saya alami selama penelitian. Tulisan tersebut dituangkan dalam bentuk catatan-catatan lapangan (*fieldnotes*).

Catatan lapangan yang saya buat merupakan catatan/laporan yang menggambarkan pengalaman dan pengamatan saya sewaktu berpartisipasi secara intens dan terlibat dalam kehidupan masyarakat. *Fieldnotes* yang saya tulis berupa deskripsi yang melibatkan isu-isu berupa persepsi dan interpretasi. Ketika saya menulis deskripsi catatan lapangan, saya menyalin fakta tentang apa yang terjadi di lapangan. Saya menulis dengan melibatkan proses interpretasi dan pemikiran yang aktif yaitu dengan mencatat dan menulis beberapa hal signifikan yang berkaitan dengan permasalahan dan mengacuhkan yang lainnya yang tidak begitu signifikan. Dalam hal ini, penting untuk mengakui bahwa catatan lapangan adalah inskripsi tentang kehidupan dan wacana sosial seperti yang dikemukakan oleh Geertz (1973) yang mengkarakteristikan proses etnografi yang utama adalah menuliskan wacana sosial, berupa kejadian-kejadian yang dialami dan momennya sendiri terhadap kejadian tersebut, ke dalam sebuah catatan, yang mana berada dalam inskripsi dan dapat dipertanyakan kembali (Emerson, 1995: 8)

Dalam proses menulis catatan lapangan yang saya buat, saya membuat proses produksi dan merefleksikan dengan mengubah/mentransformasikan kejadian, orang, dan tempat yang disaksikan ke dalam kata-kata. Perubahan ini mencakup proses seleksi dimana saya menulis tentang hal-hal tertentu yang penting. Penyajian ini merefleksikan dan menggabungkan sensitifitas, makna, dan pemahaman saya sebagai peneliti yang dikumpulkan dari pendekatan dan partisipasi dalam menggambarkan kejadiannya.

Saya menyadari bahwa catatan lapangan yang saya buat merupakan sebuah metode menangkap dan menyimpan pengetahuan dan pemahaman secara khusus distimulasi oleh kedekatan dan pengalaman jangka panjang. Catatan lapangan yang saya buat kadang menuliskan pemahaman dan pengetahuan yang belum lengkap dengan memusatkan diri untuk imersi ke dunia lain. Tentu saja, diperlukan imersi yang mendalam – dan perasaan terhadap tempat mengasumsikan kekuatan imersi – yang memungkinkan saya menuliskan secara detail, konteks yang sensitif, dan informasi lokal dalam catatan lapangan yang Geertz (1973) sebut sebagai “*thick description*”. Untuk data sekunder, saya mendapatkan dari wawancara mendalam saya dengan Pak Kades dan juga data

Universitas Indonesia

monografi dari kantor Desa Bogor.

Dalam melakukan penelitian ini saya menemukan beberapa kendala. Sebagai orang yang asli berasal dari Jakarta dan belum pernah tinggal lama di luar Jakarta maka ketika pertama kali melakukan penelitian, saya agak bingung dengan mayoritas warga Bogor yang berbahasa Jawa karena saya memang tidak begitu mengerti bahasa Jawa. Saat awal penelitian saya melihat bahwa semua anak kecil terutama yang berusia dua hingga tujuh tahun tidak bisa berkomunikasi dengan Bahasa Indonesia, mereka hanya bisa mengerti tetapi mereka tidak bisa berbicara Bahasa Indonesia. Ada juga beberapa orang tua dan kakek nenek yang tidak bisa berbicara Bahasa Indonesia. Bahkan ada beberapa kakek nenek yang sama sekali tidak mengerti, baik berbicara maupun mendengar Bahasa Indonesia. Ketika saya kebetulan sedang berhadapan dengan mereka, maka sebisa mungkin saya berbicara Bahasa Jawa yang saya mengerti dan biasanya para kerabatnya akan memberikan pengertian bahwa saya kurang begitu memahami Bahasa Jawa. Ataupun jika saya tidak tahu apa yang harus saya ucapkan dalam Bahasa Jawa maka saya meminta bantuan kerabatnya yang mengerti Bahasa Indonesia untuk menterjemahkan ke dalam Bahasa Jawa begitupun sebaliknya.

Terkadang saya bingung dalam situasi perkumpulan para warga misalnya saat pengajian yang melantunkan Tembang Jawa maupun kumpul keluarga yang mayoritas menggunakan Bahasa Jawa sebagai media komunikasi mereka. Saya berusaha sedikit demi sedikit mengerti dengan cara bertanya kepada warga yang bisa berkomunikasi dengan Bahasa Indonesia. Misalnya saja saat di rumah keluarga Mbah Karto. Ia dan istrinya tidak begitu bisa Bahasa Indonesia. Jika saya ingin mengobrol dengan mereka, saya akan meminta bantuan anak atau cucunya yang bisa menterjemahkan dan menjadi perantara kami untuk berkomunikasi. Saya juga mengalami hal yang serupa ketika berada di rumah Mbah Manten. Istrinya tidak bisa ber-Bahasa Indonesia tetapi ia mengerti jika saya bicara Bahasa Indonesia. Ketika saya berada di antara mereka, saya lebih banyak berbicara dengan Mbah Manten yang sudah lancar ber-Bahasa Indonesia. Apabila saya ingin mengobrol dengan istrinya, Mbah Manten akan menjadi perantara di antara kami. Selain itu, di rumah Pak Emboh, anggota keluarganya yang tidak bisa Bahasa Indonesia hanya ibunya Pak Emboh sedangkan yang lain

sudah lancar ber-Bahasa Indonesia. Ketika ingin berbicara dengan ibunya Pak Emboh, saya meminta bantuan Pak Emboh ataupun cucunya untuk menjadi perantara kami karena ibunya Pak Emboh sama sekali tidak mengerti Bahasa Indonesia. Walau banyak warga yang tidak mengerti Bahasa Indonesia, saya merasa mereka tetap bersikap sangat ramah. Ketika mereka tidak tahu bahwa saya datang dari Jakarta, mereka awalnya mengajak saya mengobrol dengan Bahasa Jawa, tetapi ketika saya jelaskan bahwa saya datang dari Jakarta mereka langsung mengajak saya untuk mengobrol dengan Bahasa Indonesia semampu mereka. Mereka selalu mempersilahkan saya untuk mampir ke rumah mereka. Mereka juga selalu mengajak saya untuk makan dan minum di tempat mereka.

Ketika berada di lapangan, saya juga terkadang bingung dengan apa lagi yang akan saya tanyakan dan saya cari saat penelitian. Jika kebingungan itu mulai terjadi maka saya melihat permasalahan penelitian saya dan mengecek catatan lapangan saya sehingga saya bisa merefleksikan lagi kekurangan apa lagi yang belum saya dapatkan di penelitian saya sehingga membantu saya untuk bersikap lagi saat penelitian keesokan harinya.

1.7. Sistematika Penulisan

Skripsi ini ditulis dalam lima bab, yaitu:

Bab 1 berisi pendahuluan tulisan terdiri dari : latar belakang, masalah penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, konsep pemikiran, penelitian lapangan, sistematika tulisan. Latar belakang dan masalah penelitian menggambarkan bagaimana timbulnya masalah penelitian dan pokok permasalahan yang ada. Tujuan dan signifikansi penelitian menyangkut kelompok sasaran, lokasi, dan manfaat penelitian itu sendiri. Konsep pemikiran berisikan konsep-konsep pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian. Penelitian lapangan pada dasarnya menghubungkan dengan teknik-teknik yang dipergunakan untuk meneliti. Adapun sistematika tulisan ini adalah mengandung urutan-urutan yang ada dalam penulisan ini.

Bab 2 berisi deskripsi tentang keadaan lingkungan Desa Bogoran secara umum. Kemudian, gambaran lingkungan ini dijelaskan semakin khusus mengenai Dusun Bogoran yang menjadi fokus lokasi penelitian ini. Kondisi desa dijelaskan dengan

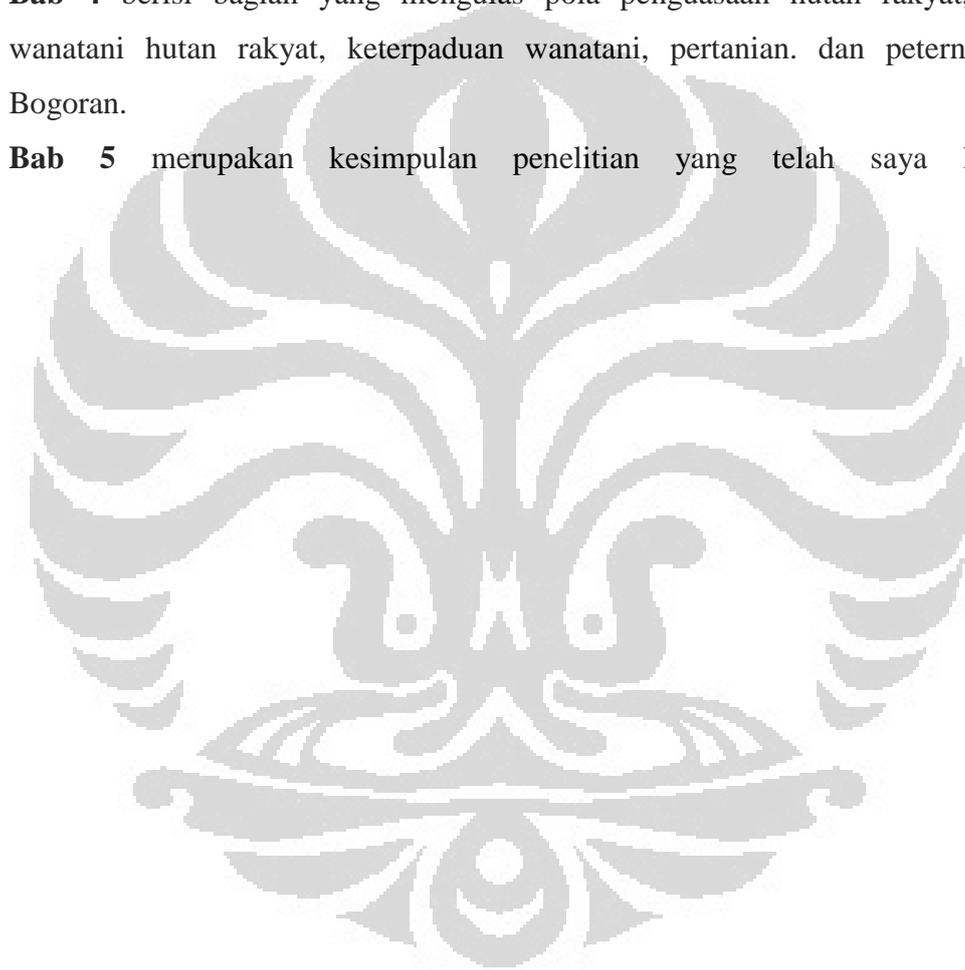
Universitas Indonesia

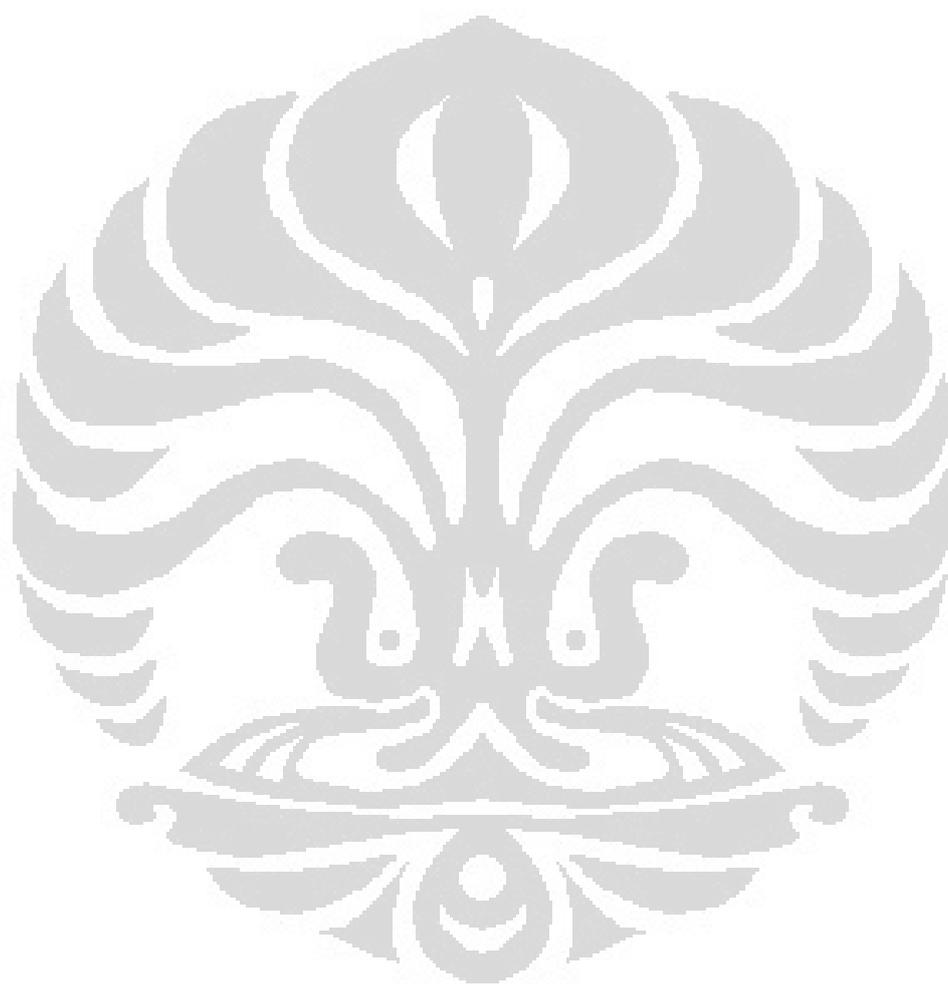
mencakup beberapa unsur, yaitu 1) lingkungan desa yang mencakup wilayah desa; tata guna tanah; fasilitas publik, sarana transportasi dan komunikasi 2) kependudukan; 3) mata pencaharian yang mencakup di bidang wanatani dan sawah dan juga di bidang nonpertanian; 4) sistem pemerintahan desa; 5) pendidikan, agama, dan kepercayaan.

Bab 3 berisi narasi tentang sejarah hutan rakyat, keanekaragaman tanaman hutan rakyat, ekonomi dan rantai produksi hutan rakyat di Bogor.

Bab 4 berisi bagian yang mengulas pola penguasaan hutan rakyat, sistem wanatani hutan rakyat, keterpaduan wanatani, pertanian. dan peternakan di Bogor.

Bab 5 merupakan kesimpulan penelitian yang telah saya lakukan.





Universitas Indonesia

BAB 2

LINGKUNGAN DAN KOMUNITAS DESA BOGORAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang lingkungan dan komunitas Desa Bogor. Faktor-faktor lingkungan (baik fisik maupun sosial) penting untuk diungkapkan mengingat manusia dengan segala aktivitasnya akan mempengaruhi lingkungan hidupnya, dan sebaliknya manusia juga dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya (Soemarwoto, 1997).

2.1. Lingkungan Desa

2.1.1. Wilayah Desa

Desa Bogor termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Di sebelah utara desa ini berbatasan dengan Desa Mungkung yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Kalikajar. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sedayu yang termasuk dalam Kecamatan Sapuran. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Celedok yang termasuk dalam Kecamatan Kaliwiro. Dengan luas total 664,532 Ha, desa ini terletak sejauh 6 km dari ibukota kecamatan dengan jarak tempuh 30 menit dengan kendaraan bermotor, dan 23 km dari ibukota kabupaten dengan jarak tempuh 60 menit dengan kendaraan bermotor. Ketika saya penelitian lapangan, untuk mencapai Desa Bogor, saya lewat jalan dari Desa Sedayu yang bernama jalan Karang Anyar menumpang mobil saudara saya. Jalan yang ditempuh sudah terlihat rusak karena banyak jalanan berbatu sehingga jika ingin melewati jalan tersebut baik jalan kaki ataupun memakai kendaraan harus pelan-pelan apalagi saat cuaca hujan yang menyebabkan jalan tersebut menjadi licin, Tidak ada kendaraan umum yang melewati wilayah ini, hanya ada ojek saja yang beroperasi. Jika ingin memakai jasanya kita membayar tujuh ribu rupiah untuk menuju Dusun Bogor. Dari Karang Anyar membutuhkan lima km perjalanan menuju Dusun Bogor tetapi karena jalannya rusak maka mobil yang saya tumpangi membutuhkan waktu tiga puluh menit untuk melewati jalan tersebut.

Secara administratif, Desa Bogoran terbagi dalam tiga dusun yaitu Dusun Bogoran, Dusun Wadas, dan Dusun Kyuni. Desa Bogoran memiliki topografi bergelombang sampai berbukit. Berdasarkan kondisi geografisnya, desa ini terletak pada ketinggian 700 meter di atas permukaan laut dengan topografi desa bervariasi dari landai sampai bergunung dengan kemiringan lahan 30-110%. Suhu udara di Desa Bogoran sebesar 30°C dan kelembaban udara sebesar 30%. Jumlah hari hujan di Desa Bogoran sebanyak 180 hari dalam setahun, dengan curah hujan tahunan sebesar 4.277 mm, atau rata-rata bulanan sebesar 356 mm.

Pemanfaatan lahan di Desa Bogoran didominasi oleh pemanfaatan berupa tegalan/kebun (50,04%). Pemanfaatan berupa kebun/lahan inilah yang banyak dikenal sebagai *wono* atau hutan rakyat, karena penutupannya yang banyak didominasi tumbuhan berkayu. Kehidupan warga Bogoran banyak bergantung pada lahan hutan rakyat. Warga Bogoran berusaha untuk mengoptimalkan penggunaan lahan ini melalui model tanam campur dengan tujuan memperbanyak hasil hutan rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kondisi pemanfaatan lahan ini didukung dengan potensi warganya, dimana lebih dari 70% penduduknya merupakan petani.

Sebagian besar perkampungan warga memiliki pola pemukiman yang mengelompok. Rumah warga tidak berpagar dan sudah tergolong permanen karena dindingnya berupa tembok. Lantainya ada yang berlapis semen dan juga ubin. Meskipun juga terlihat beberapa rumah yang masih beralas tanah pada seluruh bagian rumahnya. Sebagian besar rumah meski sudah beralas ubin dan semen tetapi bagian dapur rumah masih beralas tanah karena masih menggunakan kayu bakar untuk memasak. Rumah-rumah bilik juga sesekali dapat dijumpai di antara rumah bertembok. Pekarangan rumah walaupun tidak terlalu luas dapat dimanfaatkan oleh warga Bogoran untuk menjemur hasil panen mereka seperti padi, kopi, kapulaga, dan opak.

Di Desa Bogoran terdapat beberapa sungai yang mengalir diantaranya Sungai Kaligarung yang terletak di tengah-tengah antara Dusun Bogoran dan Wadas, Sungai Kaliputih yang merupakan pemisah antara Desa Bogoran dan Desa Mungkung, Sungai Gowong yang letaknya bersumber dari Dusun Kyuni dan mengalir ke Desa Wadas Lintang, Sungai Jurang yang terletak di Dusun Bogoran.

Sungai-sungai tersebut memiliki mata air yang digunakan untuk pengaliran air sawah tadah hujan.



Gambar 2.1 Suasana wilayah Desa Bogoran

2.1.2. Tata Guna Lahan

Sampai dengan akhir tahun 1997, potensi luasan hutan rakyat di Desa Bogoran tercatat seluas 351,315 ha, dengan rincian luasan masing-masing dusun dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1. Luas hutan rakyat Desa Bogoran

No	Dusun	Luas wilayah (ha)	Luas hutan rakyat (ha)
1	Bogoran	210,017	115,790
2	Wadas	246,670	120,590
3	Kyuni	207,845	114,935
Total		664,532	351,315

Diolah dari: *Laporan Kegiatan KTHRS Trikarya, 1997*

Dari tabel 2.1. dapat diketahui bahwa dengan luasan hutan rakyat seluas 351,315 ha, maka kerapatan tanaman adalah sebesar 2.172 batang/hektar.

Selain itu, sifat pemilikan tanah di Desa Bogoran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2. Pemilikan Tanah Desa Bogoran

No.	Sifat Pemilikan	Luas
1	Tanah Kas Desa	0,405 ha
2	Tanah Bersertifikat	60 ha
3	Tanah yang belum bersertifikat	604,127 ha

Sumber : Data Monografi Desa Bogoran, 2011

Tanah kas desa atau biasa disebut *bengkok* merupakan tanah yang dimiliki oleh desa. Tanah ini menjadi sumber penghasilan untuk desa dan dijadikan tambahan penghasilan untuk para perangkat desa yang menjabat saat itu. *Bengkok* untuk perangkat desa sudah diatur pembagiannya sesuai dengan jabatan masing-masing. Dari tabel diatas terlihat bahwa tanah yang belum bersertifikat jauh lebih banyak dibanding tanah yang sudah bersertifikat. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran warga untuk mensertifikasi tanahnya. Tanah yang sudah bersertifikat biasanya disertifikasi oleh pemiliknya dengan alasan untuk jaminan pengajuan kredit kepada bank.

Untuk penggunaan tanah di wilayah Bogoran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3. Pemanfaatan Lahan di Desa Bogoran:

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
1	Sawah irigasi sederhana	30,00	4,51
2	Sawah tadah hujan	11,635	1,75
3	Pekarangan/bangunan	33,874	5,10
4	Tegalan/kebun	332,526	50,04
5	Kolam	0,700	0,11
6	Hutan Negara	226,000	34,01
7	Lain-lain	29,797	4,48
	Total	664,532	100,00

Sumber : Arupa, 2010

Ketika saya berada di lapangan, sedang ada pengukuran kepemilikan tanah yang dilakukan oleh petugas pajak dari Temanggung yang bernama Mas Samsul. Mas Samsul akan mencatat siapa saja warga yang memiliki tanah di Bogoran dan akan ditetapkan nomer pajaknya. Ini dilakukan karena pengukuran tanah oleh petugas pajak terakhir dilakukan di Bogoran pada tahun 1995. Pencatatan dan pengukuran dilakukan secara menyeluruh di Desa Bogoran.

Universitas Indonesia

Karena luasnya Desa Bogoran maka proses pencatatan dan pengukuran dilakukan secara bertahap yang dimulai dari Dusun Bogoran kemudian Dusun Wadas, dan yang terakhir Dusun Kyuni. Proses pencatatan dan pengukuran dilakukan cukup lama. Di Dusun Bogoran saja Mas Samsul melakukannya selama 3 bulan yaitu dari bulan Februari awal hingga April akhir pada tahun 2011. Ini juga dikarenakan saat proses pengerjaannya hanya dilakukan oleh Mas Samsul dan juga bersamaan dengan musim hujan yang membuat Mas Samsul tidak bisa melakukan pekerjaannya dengan maksimal.

Saat pencatatan dan pengukuran tanah, Mas Samsul ditemani Pak Tukijo yang merupakan Kepala Dusun (Kadus) Bogoran dan Pak Prayit yang merupakan staf bagian umum kelurahan. Keduanya dianggap hafal batas-batas kepemilikan dan kegunaan tanah warganya. Beberapa kali saya menemani mereka dalam proses pengukuran dan pencatatan tanah. Ada beberapa warga yang membantu memberitahu tentang batas-batas bidang kepemilikan tanah tersebut. Ketika saya menemani dalam proses pengukuran, saya melihat secara langsung sistem tumpangsari yang dijalankan oleh warga Bogoran dalam memelihara hutannya. Terlihat ada pohon pisang, salak, kelapa, albasia, cabai, singkong, kapulaga, kopi, dan pohon endong yang terkadang dijadikan sebagai pembatas kepemilikan lahan hutan. Saat saya berada di hutan tersebut terlihat banyak pohon albasia yang dibawahnya juga banyak tanaman-tanaman lainnya. Dahulu kopi adalah jenis tanaman utama yang ditanam oleh warga. Akan tetapi sejak tahun 1980 ke atas pohon albasia menjadi tanaman utama karena kayu albasia memiliki nilai jual yang tinggi dan tanaman lainnya dijadikan tanaman sela yang bukan tanaman utama tetapi tanaman tersebut dijadikan tanaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warganya. Hutan rakyat baik dari keadaannya ataupun dari vegetasi yang ditanam memang relatif tidak berubah. Hanya perubahan yang kecil sekali terjadi. Misalnya hutan rakyat yang berada di dekat rumah warga ditebang sedikit untuk dijadikan pekarangan, hutan rakyat yang di dekat sawah dijadikan sawah tetapi hal ini sangat jarang sekali. Kebanyakan yang terjadi bahwa sawah dirubah menjadi lahan hutan rakyat.

Mas Samsul pernah berkata bahwa ia masih membutuhkan proses yang lama dalam mencatat kepemilikan tanah penduduk Desa Bogoran. Ia harus

mengukur dan mencatat satu persatu bidang tanah yang ada di Bogoran. Setelah semua proses selesai, ia harus memverifikasi data yang sudah diolah kepada warga Bogoran di dalam sebuah pertemuan besar yang mengumpulkan seluruh warga. Biasanya pertemuan ini dilakukan di Balai Desa. Masalah akan muncul ketika nantinya ada warga yang tidak setuju dengan data yang dipegang oleh Mas Samsul karena luas tanahnya kurang atau berbeda dari yang dimiliki warga tersebut. Ini bisa saja terjadi karena memang tanah yang sudah disertifikasi di Bogoran masih sedikit seperti yang terlihat pada tabel di atas tadi.

2.1.3. Fasilitas Publik, Sarana Transportasi, dan Komunikasi

Untuk mencapai Desa Bogoran dapat dilalui dengan menggunakan motor, mobil, dan truk. Ada 5 jalan yang bisa dilewati untuk mencapai Desa Bogoran seperti Jalan Karanganyar, Desa Mungkung, Karang Sari, Kalibawang, dan Kaliwiro. Khusus untuk jalan yang melalui Desa Mungkung tidak diperkenankan truk untuk lewat agar jalannya tidak cepat rusak. Keadaan jalan menuju Desa Bogoran cukup rusak terutama jika mengambil jalan melalui Desa Sedayu. Jalan tersebut belum beraspal dan licin ketika hujan turun, maka biasanya kendaraan yang melewati jalan tersebut berhati-hati sekali ketika hujan turun dan setelah hujan turun. Akan tetapi ketika jalan sudah hampir masuk ke Desa Bogoran maka jalan tersebut sudah beraspal.

Desa Bogoran memiliki Balai Desa yang letaknya berada di Dusun Bogoran. Balai Desa Bogoran ini memiliki sejarah yang diceritakan oleh informan saya yaitu Mbah Manten yang merupakan mantan lurah pertama. Ia bercerita kepada saya bahwa pada tahun 1994. Ia baru mendirikan balai desa dan perabotannya, maka dari itu di balai desa saat ini ada tanda SR yang merupakan inisial dari namanya yaitu Sumar. Ia menceritakan bahwa kantor balai desa dulu sebelum dibangun ada di rumah pribadinya yang sampai saat ini ditempatinya. Mbah Manten kembali bercerita tentang keadaan warga Bogoran sejak dulu memiliki pola hidup yang sederhana meskipun memiliki tingkat ekonomi yang berkecukupan atau lebih. Mbah Manten tidak mau terlalu keras (*ngoyo*) dalam bekerja, ia sudah sangat mensyukuri apa yang sudah Allah berikan sampai saat

ini. Ia bercerita bahwa ia dulu memutuskan berhenti sebagai lurah karena ia sudah merasa puas dengan apa yang sudah dicapai. Saat ia berhenti tidak ada konflik yang terjadi sama sekali. Mbah Manten tidak mau saat ia berhenti ada kasus yang sedang terjadi.

Balai Desa ini dipergunakan untuk kegiatan operasional desa mulai dari urusan administrasi desa seperti pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk), perpanjangan KTP, pembuatan surat jual beli tanah, pencatatan dan penyimpanan dokumen pembayaran listrik dan PBB (Pajak Bumi Bangunan) hingga pembagian bantuan untuk para warga. Untuk pembuatan KTP, Pak Kades menegaskan aturan kepada warganya untuk memiliki KTP hanya satu dan tidak boleh ganda. Ketika ada warganya yang sudah bertahun-tahun pergi dari Dusun Bogor karena pekerjaan atau pernikahan sehingga KTP Bogor sudah tidak berlaku lagi. Apabila orang tersebut kembali untuk memperpanjang, ia harus menunjukkan surat keterangan pindah dari wilayah yang bersangkutan. Kasus ini dialami oleh Ibu Parti yang merupakan anak dari Mbah Karto. Ia pindah ke Bogor untuk mengikuti suaminya yang asli Jakarta. Ketika Ibu Parti sedang ada di Bogor dan bermaksud untuk mengurus KTP dan KK (Kartu Keluarga). KTP dan KK keluarga Ibu Parti tidak bisa diperpanjang oleh kelurahan karena Ibu Parti sekeluarga memang sejak lama tinggal di Bogor. KTP yang dimiliki Ibu Parti dan suaminya memang berasal dari Bogor tetapi sudah tidak berlaku lagi karena hanya berlaku sampai tahun 2003 dan tidak pernah diurus lagi untuk diperpanjang. Bu Parti baru sempat mengurus perpanjangan KTP sekaligus membuat KTP anaknya yaitu Tia dan Kiki yang sudah berusia delapan belas dan tujuh belas tahun. Akan tetapi dari pihak Pak Lurah tidak bisa memperpanjang asal-asalan KTP dan KK tersebut karena dikhawatirkan Bu Parti sekeluarga sudah membuat KTP di Bogor sehingga menyebabkan KTP ganda yang bisa menimbulkan kasus pidana. Pak Tukijo (Pak Kadus) datang untuk menjelaskan tentang keadaan tersebut kepada Ibu Parti dan suaminya. Ibu Parti mengerti dan akan membicarakan hal tersebut dengan Pak Lurah dan akan bernegosiasi kembali dengan Pak Lurah.

Untuk pasar yang terdekat dari Desa Bogor adalah Pasar Sapuran dan Pasar Kretek. Saya memiliki pengalaman mengikuti Ibu Parti ke pasar Kretek.

Saat itu akan ada pengajian rutin di rumah keluarganya. Ketika tiba di Pasar Kertek kira-kira pada pukul 10.00 pagi, saya dan Ibu Parti langsung menuju tempat penjualan daging sapi tempat langganan keluarga Mbah Karto. Saya melihat keakraban yang terjadi antara Ibu Parti dan ibu penjual daging. Ibu Parti menjelaskan kalau keluarganya akan mengadakan yasinan dan berniat akan membuat soto daging sapi. Ia diberi bonus cabe oleh penjual tersebut. Lalu setelah membeli daging, Ibu Parti membeli bumbu-bumbu dan juga bahan untuk membuat gado-gado seperti tahu, kangkung, dan kol. Kemudian setelah membeli semuanya maka kami pun keluar pasar dan menuju parkiran motor. Saya teringat kalau Ibu Parti tadi mendapat pesan untuk membeli jamu untuk ayahnya yang sering merasa nyeri. Saya menunggu di dekat parkiran karena jarak ke tempat penjual jamu. Saya menunggu Bu Parti sambil melihat keadaan sekitar pasar. Saya melihat ada macam-macam yang berjualan di depan pasar, ada tukang buah, tukang sayur, toko emas, toko elektronik, dan toko DVD bajakan yang berlomba menyetel lagu keras-keras. Saya melihat ada *dokar* atau biasa dikenal delman, tukang ojek, dan angkot yang ada di depan pasar menunggu penumpang. Tidak lama maka Bu Parti datang dan kami langsung menuju tempat parkiran motor. Ada penjaga parkir yang memakai seragam bertuliskan parkir yang langsung bersiap saat Bu Parti menghampiri motornya. Tukang parkir tersebut membantu Bu Parti mengeluarkan motornya dan Bu Parti membayar seribu rupiah sebagai jasa parkir tanpa harus menunjukkan STNK motornya. Kami lalu pulang. Saya membawa keranjang di belakang motor Bu Parti dan di depan Bu Parti ada juga plastik yang berisi sayur-sayuran.

Sarana komunikasi warga di Desa Bogoran sudah terhitung memadai karena para warga Desa Bogoran sudah memiliki *handphone*, radio, dan televisi. Hampir sebagian besar rumah warga sudah ada televisi dan memiliki *handphone*, bahkan satu orang ada yang memiliki dua *handphone*. *Handphone* dimiliki dari kalangan anak SD hingga orang tua. Mereka menggunakannya untuk saling berkomunikasi baik hanya untuk sekedar mengobrol ringan hingga untuk urusan berjualan hasil hutan rakyat mereka. Ada juga kegunaan *handphone* bagi mereka adalah untuk saling mengabarkan jika ada acara keluarga ataupun acara desa yang harus dihadiri warga, hingga mengabarkan keadaan anggota keluarganya kepada

kerabat jika ada yang sakit, melahirkan, melangsungkan pernikahan, dan juga kabar kematian. Biasanya mereka membelinya di pasar terdekat atau membeli *handphone* bekas milik tetangga atau kerabat yang sedang menjualnya.

Warga Bogoran biasanya mengisi pulsa dari warga yang menjual isi ulang dengan cara elektronik dan bukan dengan voucher fisik. Pengisian pulsa dengan cara elektronik dirasa lebih mudah bagi para warga karena mereka hanya menyebutkan nomer hp yang akan diisi dan langsung membayar biayanya dan pulsa akan terisi secara otomatis. Kebanyakan warga Bogoran tidak mau melakukan pengisian dengan menggunakan voucher fisik karena mereka harus repot menggosok kode voucher yang tertera dan mengirimnya ke nomer tertetu sehingga mereka masih belum mengerti. Untuk penjualan pulsa yang dilakukan oleh kerabat dekat, tidak jarang ada yang berhutang dan membayar pulsa jika sudah memiliki uang seperti yang dilakukan oleh Yohan, keponakan Mbah Karto. Ia sedang kuliah di Yogyakarta tetapi seluruh keluarganya berada di Wonosobo, khususnya Bogoran. Ia berjualan pulsa dan menawarkan kepada seluruh keluarga dan juga teman-temannya untuk membeli pulsa kepadanya. Kebanyakan anggota keluarga Mbah Karto membeli pulsa kepadanya dengan cara memesan pulsa melalui SMS. Mereka tidak langsung membayar dan Yohan mencatat hutang-hutang tersebut. Ketika Yohan sedang ke Bogoran, ia pun langsung menagih hutang-hutang para keluarganya meskipun tidak semua hutang dapat dilunasi.

Di Desa Bogoran, media cetak belum begitu diminati oleh warga Desa Bogoran. Ini dikarenakan kesadaran untuk membaca media cetak seperti koran dan majalah masih sangat minim dan juga jarak Desa Bogoran ke tempat penjualan media cetak tersebut masih tergolong jauh. Para warga harus ke jalan raya terlebih dahulu jika ingin membeli media cetak. Di Desa Bogoran, media tradisional seperti kentongan, sudah tidak pernah digunakan lagi untuk sarana berkomunikasi antar warga. Jika ingin mengumumkan sesuatu kepada warga luas maka digunakan pengeras suara di masjid. Cara lain jika ingin berkomunikasi atau menyampaikan suatu hal tertentu juga dapat melalui tahlilan yang dilaksanakan warga. Untuk pengajian bapak-bapak dilakukan setiap malam Jum'at setelah shalat isya, sedangkan untuk ibu-ibu dilakukan pada hari Kamis sorenya. Biasanya para warga membaca yasinan. Di forum tahlilan tersebut para warga

dapat saling bertukar pengalaman, ide, dan dapat menjalin komunikasi antar warga.

Bapak Wiwi bercerita bahwa keadaan Bogoran masih sangat dingin sebelum ada listrik . Ia bercerita kalau tidak berani mandi kalau tidak pakai air hangat dan kabut masih terlihat sekali. Semenjak listrik masuk desa sekitar tahun 1998 maka keadaan sudah berbeda terutama karena arus mobilisasi ke luar dan masuk desa sudah dapat dilalui dengan banyak kendaraan. Dahulu sebelum listrik masuk desa, mobil masih jarang sekali, ojek masih sangat jarang karena tidak banyak tukang ojek berani melalui jalanan yang berbatu tajam.

Di Dusun Bogoran ada beberapa warung yang dimiliki oleh warganya. Warung tersebut berisi kebutuhan pokok seperti beras, gula, tepung terigu, sabun, dan minyak goreng. Ada juga rokok, jajanan anak-anak, dan opak. Saat saya di warung Ibu Sinah terlihat banyak anak-anak yang jajan. Kebanyakan mereka membeli agar-agar panjang yang dingin dengan harga lima ratus rupiah. Warung biasanya didirikan dari modal para petani yang memiliki hasil panen yang berlebih. Warung biasanya dijaga oleh para istri petani dan juga anak-anaknya yang sudah mengerti berhitung. Pemilik warung di Dusun Bogoran diantaranya adalah kerabat informan saya seperti Ibu Sinah yang merupakan istri Pak Yanto, Pak Afifudin yang merupakan anak Mbah Manten, dan juga Ibu Heni yang merupakan saudara ipar dari Pak Kades. Warung Pak Afifudin memiliki warung yang paling besar diantara warung lainnya. Di warung Ibu Sinah selain menjual berbagai barang kebutuhan, ia juga memiliki mesin jahit karena Ibu Sinah menerima pesanan jahitan dari tetangganya, Ia bercerita kepada saya meskipun terkadang banyak yang jahit tetapi banyak juga yang berhutang. Jika ada warga yang masih berhutang lalu ingin menjahit lagi, Ibu Sinah merasa tidak enak untuk menolaknya, takut dikira sombong. Ibu Sinah bercerita tentang pengalamannya berbisnis tas dan baju yang dijual secara tunai, tetapi tetangga depan rumahnya yaitu Ibu Heni yang merupakan keponakan Ibu Lurah melakukan bisnis yang sama tetapi melalui pembayaran dengan cara menyicil. Warga pun lebih memilih untuk membeli dengan cara menyicil. Semenjak itu Ibu Sinah tidak berbisnis itu lagi. Lalu ia membuka warung meskipun sudah ada warung di depan rumahnya tetapi Ibu Sinah sudah izin terlebih dahulu kepada pemilik warung tersebut. Tidak

lama Ibu Heni ikut membuka warung padahal di sebelahnya sudah ada warung yang sudah lama berdiri, warung tersebut terpaksa ditutup karena merasa tidak enak. Pak Yanto mengatakan kalau orang di sini jika melihat tetangganya maju dalam berusaha langsung diikuti.

2.2. Kependudukan

Penduduk di Desa Bogoran terbagi atas Dusun Bogoran: 146 kepala keluarga (KK), Dusun Kyuni: 260 KK, Dusun Wadas: 250 KK. Sampai bulan Januari 2011, tercatat jumlah penduduk Desa Bogoran total 2175 orang, terdiri dari 1101 laki-laki dan 1074 perempuan. Dari data monografi tersebut dapat diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan penduduk perempuan. Menurut Kades, kaum pendatang yang masuk ke wilayah ini biasanya disebabkan karena pernikahan yang dilakukan antara lelaki dari desa Bogoran dengan perempuan dari luar Bogoran, para perempuan tersebut mengikuti suaminya dan tinggal di Desa Bogoran. Ada juga beberapa pendatang yang bertujuan untuk bekerja di Desa Bogoran dan biasanya mereka bekerja menjadi petani. Ada warga yang pergi dari Desa Bogoran yang bertujuan untuk mencari pekerjaan lebih baik. Ada yang pergi bekerja di Jakarta, luar pulau Jawa seperti Kalimantan dan Sumatera, juga yang bekerja hingga ke luar negeri seperti Malaysia dan Singapura. Biasanya para warga yang pergi diajak oleh para kerabat atau tetangganya yang sudah berpengalaman bekerja di luar Desa Bogoran. Untuk data migrasi ke luar, para aparat desa sulit untuk mencatat secara angka karena arus mobilitas masuk dan keluar penduduk Desa Bogoran cukup tinggi.

Ada beberapa informan saya yang sudah merasakan pergi ke luar Bogoran dengan tujuan bekerja. Di antaranya adalah Ibu Parti, ia merupakan anak Mbah Karto yang memiliki pengalaman merantau ke Jakarta bahkan juga pernah menjadi TKW di Malaysia, Taiwan, dan Singapura. Ibu Parti memperlihatkan kepada saya foto-foto saat dirinya menjadi TKW. Ia bercerita bahwa ia memutuskan ke Jakarta untuk mendaftar ke kepolisian wanita (polwan). Ia mengekos di daerah Condet, Jakarta Timur. Meskipun pada akhirnya ia tidak diterima di kepolisian tetapi ia bertemu dengan Pak Wiwi yang berasal dari suku Betawi yang sedang main ke daerah kosnya tersebut. Mereka menikah di Bogoran

pada tahun 1990. Setelah menikah, Ibu Parti memiliki banyak masalah dengan pernikahannya. Untuk menghindari tekanan yang terus menimpanya maka ia memutuskan untuk menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita). Ia mendaftar dan tinggal di asrama TKW di daerah Condet. Di asrama tersebut ia mendapat perbekalan di antaranya bahasa Mandarin dan juga perbekalan pekerjaan dapur. Ia akhirnya dikirim ke beberapa negara. Ia belajar bahasa setempat sedikit demi sedikit. Ia bekerja sebagai pengasuh jompo (orang yang sudah sangat tua) dan anak kecil. Ia berkata bahwa ketika banyak TKW disiksa dalam pemberitaan media, ia sendiri merasa sangat senang menjadi TKW terutama di Thailand. Ia merasa bahwa majikan dan keluarga majikannya sangat baik kepadanya. Anak-anak kecil disana juga sudah merasa dekat dengannya sehingga Ibu Parti merasa betah tinggal disana. Kalau saja ia tidak ingat kepada anak-anaknya maka ia mungkin tidak akan balik ke Indonesia karena ia sudah sangat sayang kepada majikannya. Di sana Ibu Parti juga mendapat banyak teman baru sesama TKW sehingga jika ada waktu luang mereka akan berkumpul dan berbagi pengalaman. Sampai saat ini hubungan ia dan teman-temannya masih terjaga dengan baik.

Cerita selanjutnya yaitu Pak Udin yang merupakan suami dari Ibu Parsi. Pak Udin pernah bekerja di Jakarta. Ia bekerja serabutan di daerah Kampung Rambutan, Cililitan, dan Tanah Abang pada tahun 1998. Pada saat itu bertepatan dengan peristiwa lengsernya Presiden Suharto maka keadaan di Jakarta saat itu menjadi kacau. Banyak toko yang dijarah dan banyak terjadi pembakaran dimanamana. Kejadian itu membuat Pak Udin merasa sangat ketakutan dan ia tiba-tiba teringat anaknya di kampung dan saat itu juga Pak Udin khawatir akan keselamatan dirinya di Jakarta dan memutuskan untuk pulang ke kampungnya di Wonosobo. Maka jam 11 malam Pak Udin berangkat untuk pulang dan memutuskan untuk tidak kembali ke Jakarta. Selain Pak Udin, pengalaman pergi ke Jakarta juga dialami oleh istrinya yaitu Ibu Parsi. Dua tahun yang lalu ia baru saja pulang dari Jakarta dan bekerja sebagai penjaga kantin di daerah Ancol, Jakarta Utara. Ia memutuskan pulang karena anaknya menangis meminta dirinya pulang. Ia juga memikirkan suaminya yang kerepotan bekerja di ladang dan mengurus kedua anaknya dan juga urusan dapur. Ibu Parsi lebih banyak bercerita tentang anak pertamanya yang menjadi TKW di Malaysia dan sudah menikah

dengan orang Malaysia. Ketika di rumahnya terdapat lukisan perempuan yang ada di dekat meja makan yang merupakan foto dari anak pertamanya yang berada di Malaysia. Dia mengatakan rasa rindunya terhadap anaknya tersebut. Ia juga menceritakan bahwa ia telah memiliki cucu yang hanya bisa dilihat fotonya melalui kiriman surat dari anaknya. Ia berkata bahwa lebih baik anaknya dapat berkumpul semua daripada berjauh-jauhan. Dia menyayangkan padahal ia sudah membesarkan anaknya sedari kecil tetapi anak pertamanya malah jauh pergi meninggalkannya.

Ada berbagai karakter warga yang saya amati saat saya sedang melakukan penelitian. Lima informan saya yaitu Mbah Karto, Pak Emboh, Mbak Sulis, Mbah Manten, dan Ibu Parsi. Mbah Karto merupakan warga Bogor yang memiliki lahan luas dan sudah berusia 71 tahun. Mbah Karto memiliki tujuh orang anak yaitu Pak Sugi, Ibu Parni, Pak Sumarno, Ibu Parti, Pak Yanto, Ibu Yanti, Ibu Karsi. Ibu Parti adalah anak yang keempat. Ibu Parti berusia 41 tahun dan sudah memiliki dua anak yaitu Tia yang sudah berusia delapan belas tahun dan Kiki yang berusia tujuh belas tahun. Suami Ibu Parti bernama Pak Wiwi yang asli Jakarta. Selain itu, Pak Yanto adalah anak kelima dari Mbah Karto. Rumah Pak Yanto berada persis di belakang rumah Mbah Karto. Istrinya bernama Ibu Sinah. Pak Yanto memiliki dua anak, yang pertama bernama Wulan masih kelas enam SD dan yang kedua bernama Ela masih duduk di PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini). Anak-anaknya berbadan tinggi sehingga terlihat lebih dewasa. Anak Pak Yanto yang pertama sudah memakai kaca mata dan sudah memiliki minus empat. Menurut Pak Yanto anaknya sudah memakai kaca mata sejak kelas empat SD dan langsung minus 2,5 saat diperiksa. Itu disebabkan karena anaknya sering menonton TV terlalu dekat.

Informan saya berikutnya bernama Pak Fahrudin atau yang biasa dipanggil Pak Emboh. Pak Emboh adalah sebutan nama kecilnya. Pak Emboh memiliki dua anak yaitu Atun yang sedang duduk di kelas dua SMP dan Kuwat yang masih bersekolah di PAUD. Istri Pak Emboh sedang bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) di Jakarta. Pak Emboh tinggal bersama orang tuanya yakni Mbah Muhson dan istrinya. Mbah Muhson sudah berusia sekitar delapan puluh tahun dan istrinya berusia 75 tahun, sedangkan Pak Emboh sendiri berusia empat puluh

tahun. Mbah Muhson adalah warga asli Bogor tetapi tidak memiliki tanah di hutan rakyat. Mbah Muhson dan Pak Emboh adalah petani pembuat arang. Rumah keluarga Pak Emboh masih beralaskan tanah. Saat saya datang ke rumahnya Pak Emboh, ia sedang merenovasi rumahnya dengan membuat semen untuk alas rumahnya. Rumah bagian depan akan dimiliki oleh Pak Emboh sedangkan rumah bagian belakang ditempati oleh Mbah Muhson. Oleh karena itu, Pak Emboh hanya merenovasi bagian depan rumah tersebut. Renovasi rumah tersebut dikerjakan oleh suami keponakannya Pak Emboh yaitu suami Yuli yang bernama Mas Urip. Yuli adalah anak dari adik bungsu Pak Emboh yang sekarang sedang bekerja di Jakarta. Pak Emboh biasa mengerjakan proses pembuatan arang dari awal hingga akhir bersama ayahnya. Mereka berangkat bersama ke ladang dengan berbonceng sepeda motor milik Pak Emboh. Ketika ia ke ladang bersama Mbah Muhson, istri Mbah Muhson pun menjaga rumah. Istrinya biasanya memasak, menyiapkan makanan untuk dibawa ke ladang, menyapu, memetik sayuran dan kopi di ladang mereka yang dipinjamkan Perhutani, dan juga *menyirih* (memasukkan daun sirih ke dalam mulutnya untuk membersihkan gigi). Kadang istri Mbah Muhson dibantu oleh cucunya yang bernama Yuli jika ia sudah selesai membereskan rumahnya. Yuli masih berusia 19 tahun dan sudah menikah. Ia dan suaminya serta adiknya menempati rumah orang tuanya. Orang tuanya saat ini sedang bekerja di Jambi. Ayahnya bekerja sebagai tukang bangunan sedangkan ibunya menggarap ladang. Yuli membantu memasak dan membereskan rumah keluarga Pak Emboh., sedangkan istri Mbah Muhson terkadang pergi ke ladang hutan negara untuk memetik kopi.

Informan lainnya yaitu Mbak Sulis. Ia adalah warga asli Bogor yang berusia 25 tahun. Ia sudah memiliki anak yang bernama Fani yang berusia enam tahun yang masih bersekolah di PAUD. Ia menikah dengan suaminya yang bernama Mas Ikram saat berusia 19 tahun. Ia merupakan salah satu keluarga muda di Bogor. Mbak Sulis mengerjakan seluruh tugas rumah tangga seperti memasak, mengurus suami dan anaknya, mencuci, menyapu, mengepel lantai sampai mengelola keuangan rumah tangga keluarganya. Kadang juga ia membantu suaminya menjemur hasil ladang seperti kopi dan kapulaga, sedangkan suaminya bekerja di ladang. Mbak Sulis banyak bercerita kepada saya tentang

pengalaman dirinya yang sering sakit-sakitan selama 2 tahun belakangan ini. Ia pernah mengalami operasi usus buntu, memiliki maag yang kronis, kakinya sering kram mendadak, dan cepat lelah. Ia sudah mengunjungi berbagai jenis dokter dan sudah kekenyangan minum obat.

Informan saya selanjutnya adalah Mbah Manten. Ia dipanggil Mbah Manten karena ia merupakan mantan lurah yang masih disegani oleh warga. Nama aslinya adalah Sumar. Ketika ia pulang menunaikan ibadah haji maka ia merubah namanya menjadi Bapak Ahmad Soleh. Ia merubah namanya karena ia ingin seperti orang lain yang merubah namanya menjadi nama yang lebih islami ketika pulang menunaikan ibadah haji. Mbah Manten berumur 58 tahun dan istrinya berumur 57 tahun. Mbah Manten menunaikan haji pada tahun 1994 sedangkan istrinya menunaikan haji pada tahun 2003. Mereka memiliki 3 anak yaitu Syamsiyah, Afifudin, dan Triyogi. Hanya Ibu Syamsiyah saja yang perempuan, sedangkan dua anak lainnya adalah laki-laki. Mbah Manten selalu shalat berjamaah di masjid dekat rumahnya yaitu masjid yang berada di samping rumah Mbah Priyo, sedangkan istrinya tidak selalu shalat di masjid jika ada cucunya yang main ke rumahnya. Mbah Manten merupakan warga asli Bogor. Ia adalah dua bersaudara. Istrinya merupakan warga asli Wadas dan 6 bersaudara, sedangkan lima saudaranya merupakan saudara tiri karena 1 ibu dan beda ayah.

Informan saya yang terakhir yaitu Ibu Parsiyah atau biasa dipanggil Ibu Parsi berusia 44 tahun, sedangkan suaminya yaitu Bapak Mahnudin berusia 47 tahun. Mereka menikah saat ibu Parsi berusia 15 tahun dan Pak Udin (nama panggilan Bapak Mahnudin) berusia 18 tahun. Keluarga Ibu Parsi memiliki 3 anak yaitu Riski yang bersekolah kelas 2 SMP, Riska yang bersekolah kelas 3 SD, dan Rina yang menjadi TKW di Malaysia dan belum pernah kembali lagi ke kampung halamannya. Riski bersekolah di Simpur, sedangkan Riska bersekolah di Wadas. Saat ini Riski sudah diberikan motor oleh ayahnya, sehingga Riski dapat berangkat sekolah naik motor bersama Riska, adiknya. Sebelumnya mereka berjalan kaki menuju sekolah mereka masing-masing. Biasanya Pak Udin dan istrinya sudah berangkat bekerja di ladang milik orang lain dari jam 8 pagi hingga 3 sore. Ia akan membawa bekal makan siang ke ladang jika ladangnya jauh. Akan tetapi jika ladang tempat bekerjanya cukup dekat maka ia akan pulang pada jam

istirahat untuk makan siang di rumahnya. Setelah pulang berladang, biasanya Pak Udin mencari rumput untuk makan kambingnya dan kembali menjelang maghrib. Ketika sudah selesai berladang, Ibu Parsi mempersiapkan makan malam untuk keluarganya dan sekaligus makanan untuk sarapan esok harinya.

Beberapa informan saya banyak bercerita tentang permasalahan keluarga yang mereka hadapi sehingga lama kelamaan saya menjadi mengerti tentang sifat-sifat mereka dan keluarganya. Informan saya yang paling banyak bercerita tentang pengalaman hidupnya adalah keluarga Ibu Parti yang menceritakan tentang keluarga besar Mbah Karto. Saya mengobrol bersama Tia yang merupakan anak dari Ibu Parti. Tia banyak bercerita kepada saya. Ia bercerita bahwa Pak Wiwi yang merupakan ayahnya adalah ayah yang tegas bahkan bisa dibilang galak jika prinsip yang telah ditetapkan dilanggar. Ayahnya tidak suka jika Tia main keluyuran tidak jelas. Jika ia ingin belajar kelompok maka teman-temannya yang harus ke rumahnya. Ia diantar jemput oleh ayahnya sehingga sangat membatasi ruang geraknya. Ayahnya tidak segan untuk main tangan jika Tia dirasa melawannya. Ia pernah dipukuli oleh ayahnya ketika dipergoki sudah punya pacar. Padahal saat itu ia sudah putus dengan pacarnya yang dikenalkan oleh tantenya. Akan tetapi memang Tia masih berhubungan dengan mantan pacarnya tersebut dan SMS mereka dibaca oleh ayahnya dan membuat ayahnya sangat marah. Ayahnya juga sering mengeluarkan kata-kata kasar.

Tia bercerita masalah keluarga besar ibunya yang penuh dengan konflik karena saling mementingkan diri mereka sendiri. Pak Wiwi sudah lama tidak mau menginjakkan kaki di rumah Bu Yanti, adiknya Ibu Parti, anaknya Mbah Karto yang nomor enam, padahal rumahnya persis berada di sebelah rumahnya. Tia bercerita bahwa waktu itu ia pernah ingin dikenalkan oleh temannya Pak Tri, suami dari Ibu Yanti, yang merupakan sesama guru. Ketika mendengar hal tersebut, Pak Wiwi langsung marah sekali dan tidak mengizinkan Tia untuk menginjakkan kaki di rumah Bu Yanti sampai kapanpun. Menurut Tia, Ibu Yanti memang sangat keterlaluannya patuhnya terhadap suaminya. Apapun yang dikatakan suaminya harus dituruti oleh istrinya. Tia bercerita bahwa dulu sebenarnya Pak Lurah sudah sempat melamar Bu Yanti dan lamarannya sudah diterima. Tidak lama kemudian datanglah Pak Tri yang melamar Bu Yanti juga dan atas desakan

kakaknya yang nomor dua yaitu Bu Parni, maka Bu Yanti menerima lamaran tersebut padahal ia seharusnya sudah terikat dengan lamaran Pak Lurah. Sempat ada percekocokan yang terjadi antara Pak Lurah dan Pak Tri tetapi akhirnya Pak Lurah mengalah. Menurut Tia, Bu Yanti didesak oleh kakaknya untuk menikah karena Pak Tri lebih kaya daripada Pak Lurah, padahal Pak Lurah dan Bu Yanti memang sudah suka sama suka.

Ketika di warung Ibu Sinah, saya mengobrol oleh Ibu Sinah, Pak Wiwi, Tia, dan Ibu Parti. Kami membicarakan tentang masalah keluarga Mbah Karto. Menurut Pak Wiwi, anak-anak Mbah Karto selain Ibu Parti terkesan tidak mempedulikan orang tuanya. Mereka tidak mau mengeluarkan uang untuk kesejahteraan orang tuanya. Jika orang tuanya sakit, mereka tidak mau membayar biaya rumah sakit ataupun hanya sekedar membeli obat atau makanan. Saya melihat banyak perselisihan yang terjadi di antara anggota keluarga Mbah Karto. Ini dapat dilihat ketika Pak Wiwi dihidangkan tempe kemul oleh Tia dan ternyata tempe itu dari Ibu Yanti, Pak Wiwi langsung menyingkirkan tempe tersebut dari hadapannya dan terlihat sangat membencinya. Pak Wiwi adalah menantu Mbah Karto yang berasal dari suku Betawi yang terlihat sifatnya ceplas-ceplos, terbuka, dan apa adanya. Pak Wiwi banyak bercerita kepada saya bahwa ia tidak terlalu senang dengan kehidupan saudara kandung istrinya karena mereka sangat mementingkan urusan sendiri dan memperhitungkan timbal balik, bahkan tidak peduli dengan orang tuanya, padahal orang tuanya sudah memberikan warisan kepada seluruh anaknya berupa rumah beserta isinya dan juga lahan beserta isinya. Ibu Parti bercerita kepada saya kalau ada masakan enak di rumahnya selalu diomongin oleh para tetangga karena terkesan sombong, tetapi kalau tidak enak juga diomongin karena akan dikatakan bahwa keluarga Mbah Karto memiliki banyak uang tetapi makannya seperti itu.

Pak Wiwi menuturkan bahwa menurutnya makanan yang dibilang enak oleh warga Bogor, itu adalah makanan yang biasa saja seperti telur, tempe, dan emping. Pak Wiwi tidak suka dengan daging, ayam, dan ikan. Menurutnya, orang di Dusun Bogor terlalu pelit bahkan untuk dirinya sendiri. Seperti soal makanan, mereka tidak mau makan yang mahal-mahal, tetapi kalau ada makanan gratisan langsung berebut, bahkan baju yang mereka pakai adalah baju bekas yang

masih layak pakai yang dijual oleh pedagang yang lewat di Bogor. Baju yang seharusnya untuk acara RT yang merupakan baju batik dipakai untuk segala acara seperti pengajian, kondangan, dan acara-acara lainnya. Pak Wiwi menjelaskan kalau baju yang dipakai Mbah Karto adalah baju yang dibeli olehnya. Menurutnya, jika orangtuanya sakit terkesan tidak ada yang peduli karena mereka hanya berfokus untuk mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya untuk mereka sendiri. Saat ada pengajian di rumah Ibu Parti juga terjadi perselisihan pendapat untuk makanan yang akan disediakan oleh keluarga Ibu Parti. Saat pengajian, Ibu Parti menyediakan soto daging untuk para tetangganya, tetapi ini malah menjadi bahan pembicaraan oleh saudara dan para tetangganya. Ini terjadi ketika Tia sedang memotong lontong, ia berkata ke ibunya kalau tadi *Bude Parni* berbicara untuk apa sih yasinan saja repot-repot membuat soto sapi, katanya hanya membuang-buang uang saja. Tia yang mendengarnya langsung tersinggung, ibu dan ayahnya juga tersinggung dengan ucapan tersebut. Bu Parti berkata kepada saya bahwa ia merasa serba salah karena jika makanannya tidak enak akan menjadi bahan omongan, tetapi jika makanannya enak juga menjadi omongan karena dipikir mau pamer.

Saya banyak mengobrol bersama ayahnya Tia yang sudah 21 tahun menikah dengan ibunya Tia yang sudah cukup lama mengenal kebiasaan keluarga besar Mbah Karto maupun kebiasaan dari warga Bogor. Pak Wiwi yang merupakan ayahnya Tia berkata kepada saya bahwa anak-anaknya Mbah Karto hanya bisa menyuruh untuk membawa Mbah Putri atau istrinya Mbah Karto ke rumah sakit tetapi mereka tidak mau mengeluarkan uang sedikitpun. Mereka juga tidak mau menyumbangkan tenaga untuk merawat Mbah Putri yang sedang sakit dan juga tidak mau membeli makanan atau obat. Saat orang tua sakit hanya Ibu Parti yang paling repot. Saat itu saja, saya melihat Ibu Parti yang mengambil sendiri tensi darah dengan menggunakan motor ke puskesmas di Kyuni. Ibu Parti juga yang selalu menemani Mbah Putri.

Ketika berada di informan saya berikutnya yaitu Pak Emboh, ia banyak bercerita tentang sejarah keluarganya di Bogor. Pak Emboh bercerita bahwa dulu orang tua Mbah Muhson adalah warga asli Bogor. Saat Mbah Muhson berumur lima tahun, kedua orang tuanya meninggal lalu ia dirawat oleh pamannya

yang tinggal di daerah Kembaran yang dekat dengan wilayah Kertek. Mbah Muhson lalu besar dan menikah dengan perempuan yang tinggal di Kembaran. Ia memiliki empat orang anak laki-laki, tetapi ketiga anak laki-lakinya meninggal semua karena sakit dan hanya tersisa Pak Emboh yang merupakan anak laki-laki nomer empat. Lalu saat Pak Emboh masih berusia satu tahun, Mbah Muhson membawa anak dan istrinya ke Bogor karena pamannya menyuruh mereka untuk menempati tanah peninggalan orang tua Mbah Muhson. Akan tetapi saat sampai di Bogor malah tanah tersebut tidak boleh ditempati dan akhirnya ia ditolong oleh istri Mbah Karto untuk menempati tanah kosong miliknya. Ia tidak dikenakan biaya sewa, tanah tersebut boleh ditumpanginya sampai keluarga Mbah Muhson mampu membayarnya. Maka dari hasil membuat arang tersebut, Mbah Muhson mengumpulkan sedikit demi sedikit tabungan yang kemudian dibelikan kambing, lalu beberapa kambing tersebut dibelikan sapi yang kemudian sapi tersebut diberikan oleh Mbah Muhson kepada istri Mbah Karto sebagai tanda bahwa sapi tersebut adalah bayaran untuk membeli tanah yang keluarganya selama ini ditempati.

Informan saya lainnya yaitu Mbak Sulis yang merupakan adik Pak Kades. Mbak Sulis menunjukkan foto-foto pernikahannya dengan Mas Ikram. Dari foto-foto tersebut terlihat bahwa pernikahannya dilakukan di Balai Desa. pernikahannya memakai kostum adat Jawa, dan juga ada tari-tarian tradisional Jawa. Banyak tamu yang datang, dan terlihat beberapa wajah warga Bogor yang sudah saya kenali. Ia juga bercerita bahwa ia menikah ketika usianya masih 19 tahun. Ketika itu Mbak Sulis sebenarnya ingin sekali kuliah tetapi niatnya ditentang oleh ibunya yang menginginkannya untuk langsung menikah dengan Mas Ikram yang saat itu sedang melakukan pendekatan dengannya. Mbak Sulis sebenarnya saat itu sudah memiliki pacar tetapi ia harus mengorbankan keinginannya sendiri dan lebih menuruti keinginan ibunya. Ia bisa mengambil hikmah dan bersyukur sudah bisa sampai dalam tahap ini dengan suaminya yaitu sudah punya rumah sendiri, sedangkan mantan pacarnya malah rumahnya mengalami banjir. Ia juga selalu bersyukur bahwa restu orang tua adalah segalanya. Ia juga banyak bercerita tentang kebiasaan Bu Lurah yang sombong,

malas, munafik (pintar memakai topeng), dan selalu iri kepadanya baik dalam harta ataupun dalam pertemanan.

Mbak Sulis banyak bercerita tentang pengalaman hidupnya yang pahit tetapi itu malah menjadi motivasinya untuk terus memperbaiki kehidupan keluarganya terutama dalam hal ketakwaan terhadap Allah meskipun kadang shalatnya masih bolong-bolong tetapi terus berusaha untuk lebih banyak shalatnya daripada bolongnya. Apalagi ketika ia sehabis jatuh dari motor dan tulang kakinya bergeser. Menurutny, itu merupakan penderitaan untuk dia terutama saat buang air besar (BAB) yang kamar mandinya saat itu masih menumpang ke tetangga. Saat itu suaminya belum begitu peka terhadap kondisinya yang seharusnya dibantu, tetapi sekarang suaminya sudah peka terhadapnya. Ketika ia sedang sakit, suaminya mau membantu menyapu, cuci piring. Ia merasa bersyukur karena memiliki suami yang telah memiliki kesadaran untuk sedikit membantunya. Ia merasa sedih ketika ia dicaci dan dihina oleh keluarganya sendiri. Ia tidak pernah dendam, tetapi hanya membekas dan akan terus diingat. Ia tetap ingin melakukan hal-hal baik dan menjadikan hinaan tersebut sebagai motivasi untuk dirinya agar dapat bangkit dan terus memperbaiki diri. Ia hanya terus menjaga keutuhan keluarganya, terutama suaminya yang terus mendukungnya. Ia juga tidak pernah lupa untuk terus meminta kepada Allah dengan terus berdoa ketika sedang shalat. Ia selalu percaya bahwa kesakitan yang dialaminya selama ini akan menciptakan kebahagiaan untuknya dan keluarganya. Mbak Sulis tidak mau memanjakan anaknya meskipun Fani merupakan anak satu-satunya. Hal itu terlihat pada pengalaman saya ketika berada di rumahnya. Ketika saya, Fani, dan Mbak Sulis sedang menonton TV. Fani terlihat ingin menguasai TV tetapi ibunya tidak mau kalah akhirnya Fani menangis dan tidak ditanggapi oleh ibunya. Saya mendengar Fani meminta maaf kepada ibunya sambil menangis. Akhirnya bapaknya yang sedang istirahat di kamar kemudian bangun untuk memandikan Fani yang mau mengaji. Fani kemudian pergi mengaji, dan tidak menangis lagi.

2.3. Mata Pencaharian Hidup

Masyarakat Desa Bogor merupakan masyarakat petani. Lebih dari separuh penduduk desa tersebut berprofesi sebagai petani. Komposisi masyarakat Bogor usia produktif menurut jenis pekerjaannya dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4. Jenis Pekerjaan di Desa Bogor

No	Pekerjaan	Jumlah (jiwa)
1	Petani Pemilik	600
2	Buruh Tani	49
3	Pengusaha	21
4	Peternak	500
5	Buruh bangunan	55
6	Pedagang	19
7	TKI	10
8	Pegawai Negeri Sipil / TNI	12
9	Lain-lain	216
Jumlah		1.482

Diolah dari: *Kelurahan Sapuran Dalam Angka*, Januari 2011

Dalam tabel 2.4. diatas terdapat angka 216 orang warga yang dalam jenis pekerjaannya disebutkan lain-lain. Penyebutan lain-lain ini dapat dibagi dalam beberapa kelompok, antara lain:

1. Kelompok ibu rumah tangga. Sebagian perempuan yang bersuami menyebutkan dirinya sebagai petani, namun sebagian yang lain menyebut dirinya ibu rumah tangga, meskipun dalam kesehariannya mereka juga mengolah lahan bersama dengan suami dan anak-anaknya.
2. Kelompok *blandong*. yaitu tenaga yang menyertai pedagang kayu dalam pembelian hasil hutan rakyat. Kelompok ini terdiri dari *kenek* dan kuli angkut.
3. Tukang ojek. Alat transportasi dari dan ke Bogor, selain kendaraan bak terbuka adalah ojek. Dan di desa tersebut terdapat beberapa orang yang sehari-hari melayani masyarakat dengan kendaraan roda duanya.
4. Pengangguran. Kelompok ini merupakan kelompok pemuda yang tidak banyak jumlahnya. Sebenarnya, meskipun tidak memiliki pekerjaan tetap para pemuda ini sesekali juga membantu orang tua mereka di lahan.
5. Anak-anak yang berusia diatas 10 tahun dan belum bekerja karena masih

sekolah, serta beberapa warga yang berusia lanjut dan sudah tidak aktif bekerja lagi.

2.3.1. Wanatani dan Sawah

Mata pencaharian penduduk Bogor yang utama adalah sebagai petani hutan, selain itu ada juga yang bekerja sebagai peternak, pedagang, guru, tukang bangunan, dan usaha jasa. Dari data monografi tercatat bahwa jumlah petani pemilik yang berjumlah 600 orang, sementara jumlah buruh petani hanya berjumlah 49 orang. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sebagian besar petani di daerah ini memiliki lahan miliknya yang dikerjakan sendiri dan juga tenaga penggarap. Khusus di Dusun Bogor, meskipun warganya paling sedikit tetapi memiliki kepemilikan lahan yang paling luas dibanding Dusun Kyuni dan Dusun Wadas. Ini dapat dilihat dari banyak warga Dusun Bogor yang memiliki lahan di dalam dusun dan di luar dusun. Kadang terjadi kekurangan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk pengolahan lahan di Bogor.

Pola pemanfaatan lahan yang biasa dikembangkan masyarakat di hutan rakyat adalah pola tanaman campur dengan beragam variasi ketinggian tajuk. Pola tanaman semacam ini memungkinkan petani menanam tanaman jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek secara bersamaan baik dilihat dari panen pertamanya atau periode panennya. Variasi jenis tanaman pada hutan rakyat berkaitan erat dengan variasi kebutuhan masyarakat yang beragam. Tanaman cabe yang bisa dipetik 15 hari sekali dan kapulogo yang dapat dipanen sebulan sekali diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan harian keluarga petani hutan rakyat. Kebutuhan jangka menengah dipenuhi dari hasil tumpangsari kopi dan salak. Setiap tahun kopi berbuah, sementara salak dapat dipetik hasilnya setiap dua bulan, kecuali periode April-Juni setiap tahun. Tanaman kayu oleh petani dijadikan tabungan untuk menjaga keperluan jangka panjang yang membutuhkan biaya besar, seperti: hajatan, biaya mengawinkan anak, biaya sekolah, pembangunan rumah, naik haji, dan lain sebagainya. Pola panen kayu yang dilakukan adalah tebang pilih disesuaikan dengan tingkat kebutuhan. Pola tebang pilih ini memungkinkan lahan tidak dalam keadaan kosong sepanjang tahun, karena hanya tanaman-tanaman tertentu dalam jumlah yang terbatas yang akan

dipanen. Setelah panen, mereka akan segera mengganti tanaman itu dengan tanaman baru, sehingga pola peremajaan tanaman berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan. Dalam menjalankan pertaniannya, para petani hampir sebagian besar menggunakan pupuk kandang yang diperoleh dari kotoran ternak.



Gambar 2.2. Kegiatan para petani Bogor

2.3.2. Non-Pertanian

Pekerjaan di luar bidang pertanian dapat dilihat dari data monografi di atas yaitu PNS, buruh bangunan, pedagang, TKI, pengusaha, dan peternak. Dalam kehidupan sehari-hari, seorang petani tidak hanya mengandalkan kegiatan bertani saja, tetapi juga memiliki pekerjaan sampingan, seperti beternak, mencari atau mengumpulkan kayu bakar dan rumput. Untuk ternak, mayoritas warga memelihara kambing, ayam kampung, dan entok. Hampir setiap rumah memiliki ternak-ternak tersebut. Dari kotoran ternak ayam kampung dan kambing, warga memanfaatkannya untuk keperluan pupuk kandang. Mayoritas petani menggunakan pupuk kandang untuk tanaman mereka karena mereka tidak perlu

lagi membeli pupuk dan bisa diambil dengan mudah dari rumah mereka sendiri, walaupun masih ada juga yang membeli pupuk kimia. Pemeliharaan ternak, terutama ternak kambing berfungsi sebagai tabungan. Ada juga ternak yang lainnya seperti sapi dan kerbau. Kerbau digunakan petani untuk membajak sawah. Ternak tersebut biasanya dipelihara dalam kandang agar tidak merusak tanaman-tanaman yang ada di kebun-kebun sekitar rumah. Ternak sapi sudah jarang dilakukan oleh warga Desa Bogoran, ini dikarenakan harga sapi sudah jatuh karena harga sapi impor yang jauh lebih murah dibanding harga sapi lokal. Dahulu para warga banyak yang memelihara sapi, tetapi sudah lima tahun belakangan ini harga sapi tidak bagus dan kalau dihitung-hitung malah rugi, sehingga para warga menjadi jarang yang memelihara sapi.

Saya memperhatikan hampir semua rumah warga ada kayu-kayu yang bertumpuk di samping rumah mereka. Kayu tersebut digunakan untuk memasak. Warga mengambil ranting kayu dalam jumlah banyak dan ditumpuk-tumpuk untuk persediaan warga memasak dalam jangka waktu berbulan-bulan. Saat saya hampir sampai di rumah Pak Kades saya melihat ada sebuah rumah yang di depan rumahnya menumpuk ranting kayu yang banyak sekali. Saat saya tanyakan kepada warga yang bersangkutan ternyata kayu tersebut akan digunakan untuk memasak. Kayu tersebut sengaja diambil banyak karena akan mengadakan hajatan sehingga akan memasak dalam jumlah yang besar. Saat saya tanyakan mengapa mereka tidak memakai gas padahal sudah ada konversi gas di dusun ini. Mereka beralasan para warga sudah terbiasa menggunakan ranting kayu bakar untuk memasak karena dapat diambil sendiri oleh warga di hutan mereka dan didapatkan secara gratis, sedangkan jika warga menggunakan gas maka harus membeli tabung gas secara terus menerus. Banyak para warga yang menukar tabung gas tiga kg yang mereka miliki dengan panci penanak nasi. Biasanya warga menggunakan kompor gas pada saat bulan puasa agar lebih praktis. Ada juga beberapa warga terutama informan saya seperti keluarga Mbah Karto, Mbak Sulis, dan Pak Kades yang memiliki dua sisi dapur. Dapur yang satu memakai kompor gas dan yang satunya memakai kayu bakar. Mereka berkata bahwa mereka menggunakan kompor gas hanya untuk memasak yang ringan-ringan saja seperti menggoreng telur dan memasak lauk pauk yang hanya sebentar. Akan

tetapi jika ada acara atau memasak banyak mereka akan menggunakan kayu bakar. Ini dikarenakan mereka mau menghemat pengeluaran karena kayu bakar bisa mereka dapatkan secara gratis dari hutan mereka tetapi kalau memakai kompor gas harus memakai tabung gas yang dibeli dengan harga yang menurut mereka cukup mahal.

Saya melihat Ibu Parsi memasak menggunakan kayu bakar padahal ada kompor dan tabung gas yang tidak terpakai di rumahnya. Ia berkata bahwa ia mendapatkan tabung gas tersebut gratis saat ada pembagian tabung gas secara massal oleh pemerintah saat awal pencanangan program konversi dari minyak tanah hingga gas. Ibu Parsi bercerita bahwa banyak warga Bogor yang menjual tabung gas mereka kepada para tengkulak dan ditukarkan dengan penanak nasi. Mereka menjualnya karena merasa tidak mampu untuk terus menerus memakai kompor gas, maka mereka memakai kayu bakar saja untuk memasak. Di samping itu, mereka juga merasa takut jika tabung gasnya meledak.



Gambar 2.3. Ternak yang ada di Bogor

2.4. Sistem Pemerintahan Desa

Setiap kepala desa yang dipilih menjabat untuk kurun waktu 6 tahun dan maksimal menjabat 2 kali atau 12 tahun. Kepala desa dipilih secara langsung oleh warga dengan diadakannya pemilihan yang diadakan oleh panitia. Panitia pemilihan itu dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan dari pemerintah desa yang disebut Pelaksana Jabatan (PJ). BPD tersebut membuat peraturan pemilihan yang mengacu dari aturan yang ada. Pada awalnya panitia membuka pendaftaran, lalu ada tes administrasi.

Syarat administrasi untuk pemilihan Kepala Desa yang paling utama adalah ijazah minimal SLTA atau sederajat, Syarat lainnya adalah SKCK, surat keterangan dari pengadilan yang menerangkan bahwa belum pernah dituntut dengan ancaman minimal 5 tahun, dan surat dari dokter bahwa calon tersebut bebas dari narkoba. Setelah tes administrasi, proses selanjutnya adalah para calon membayar biaya pendaftaran. Saat Bapak Sukoco (Kades saat ini) mendaftar bersama calon lainnya harus membayar biaya total sekitar 12 juta rupiah dan karena saat itu terdapat 4 calon maka masing-masing calon membayar 3 juta rupiah. Lalu setelah batas akhir penyerahan administrasi maka diadakan seleksi, dilihat apakah calon tersebut terpenuhi atau tidak. Jika dirasa sudah terpenuhi persyaratannya maka para calon dikumpulkan oleh panitia untuk mencari kesepakatan waktu pemilihannya. Nomor pilihan ditentukan dengan cara diundi untuk dipakai di alat peraga dan surat suara. Setelah itu dilakukan penghitungan suara seperti tata cara pemilihan normalnya. Dahulu, surat suara bukan berisi foto calon tetapi berupa lambang-lambang seperti padi, jagung, ketela. Semakin banyak calon maka semakin banyak lambang di kertas suara tersebut. Pemilihan dilakukan dengan cara dicoblos.

Menurut Pak Kades pemilihan Kepala Dusun diadakan setiap 12 tahun sekali. Ini berbeda dengan pemilihan Kades yang dilaksanakan 6 tahun sekali. Kepala Dusun (Kadus) dipilih berdasarkan tes uji kompetensi yang dilakukan oleh panitia pemilihan melalui proses pengajuan diri. Pemilihan Kadus tidak dipilih secara langsung oleh warga tetapi secara tes tertulis. Awalnya para Kadus mendaftar terlebih dahulu lalu melakukan tes tertulis yang dilaksanakan di desa. Meskipun tesnya di desa tetapi soal tersebut berasal dari kabupaten. Pemilihan Kadus diseleksi lewat beberapa persyaratan dan ujian tertulis yang berisi tentang pengetahuan tentang dusunnya, Wonosobo secara umum dan juga pengetahuan ideologi. Dalam seleksi Kadus ini memiliki panitia pemilihan yang dibentuk oleh kecamatan. Kades memiliki hak untuk memberhentikan Kadus jika dianggap tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Teknis pemilihan Kadus seperti ini banyak mendapat protes dari warga karena warga tidak bisa memilih secara langsung Kadus untuk wilayah mereka sendiri.

Menurut Kades untuk pemilihan Kadus di Desa Bogor, agar mengikuti tata cara yang ada yang sesuai dengan peraturan karena jika suatu saat ada kericuhan maka ada pihak dari atas yang membantu tetapi jika sudah tidak mengikuti aturan yang ada maka hanya akan menimbulkan konflik berkepanjangan. Semenjak awal, Kades sudah memberikan pengertian ke warga untuk melakukan pemilihan sesuai dengan aturan yang ada dan jika memang suatu saat ada masalah dan ingin menjatuhkan Kadus tersebut, para warga dapat menyampaikan keluhannya kepada Bupati. Sistem pemilihan Kadus seperti ini kadang menimbulkan masalah saat para warga protes karena calon yang mengajukan diri adalah orang yang tidak disetujui oleh warganya. Kadang ada calon yang didukung oleh warga tetapi tidak lulus dalam tes tertulisnya dan harus terus mengulang tes tersebut karena jika hasil tesnya dibawah enam puluh maka orang tersebut tidak lulus. Akan tetapi ada calon yang tidak didukung warga tetapi lulus dalam tes tersebut maka kedua calon ini akan saling berseteru mempertahankan argumen mereka masing-masing. Menurut Kades, kepala dusun yang saat ini menjabat di Dusun Bogor yang bernama Bapak Tukijo pada awal menjabat kurang disetujui oleh warga karena geraknya lamban dalam menjalankan dusun. Ini dikarenakan Kadus ini kurang berpengalaman berorganisasi sehingga kurang peka terhadap warganya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu maka Kadus Tukijo dapat diterima oleh masyarakat karena ia banyak memperbaiki diri sehingga dapat memperbaiki kualitas pelayanannya sebagai Kadus.

Pak Kades bercerita kepada saya bahwa dahulu Kadus dan RW diisi oleh dua orang yang berbeda. Kadus memiliki tugas untuk menangani masalah yang menyangkut budaya seperti kehidupan sosial masyarakat, kesenian, dan juga kegotong-royongan, sedangkan Pak RW memiliki tanggung jawab ke urusan administrasi. Kades digaji tetap oleh pemerintah, sedangkan Kadus diberi gaji dari uang pemasukan yang diatur oleh Kades. Setelah enam bulan Kades menjabat atau sekitar tahun 2007 maka ia menggabungkan tugas-tugas RW dan Kadus pada satu orang. Kebetulan saat itu ketiga RW di setiap dusun mengajukan pengunduran diri maka itupun dijadikan momen untuk membuat kebijakan menggabungkan menjadi satu antara RW dan Kadus yang hanya dipegang oleh

satu orang. Pak Kades melakukan tindakan karena menganggap banyak warga yang terkadang bingung dengan perbedaan tugas antara Kadus dan Ketua RW.

Di Dusun Bogoran ada empat RT, di Dusun Kyuni ada tujuh RT, dan di Dusun Wadas ada delapan RT. Ketua Rukun Tetangga (RT) dipilih secara langsung oleh warga. Gaji RT berasal dari dana ADD (Alokasi Dana Desa) yang didapat dari kabupaten. Pak Kades bercerita, tahun lalu (2010) Desa Bogoran mendapat dana ADD sebesar 114 juta dan tahun ini (2011) sebesar 121 juta. 70% dari dana tersebut untuk dana operasional desa dan 30% untuk pemberdayaan masyarakat. Dana pemberdayaan masyarakat diantaranya untuk pengentasan kemiskinan, kesehatan, dan infrastruktur. Menurut Pak Kades, ia setuju dengan otonomi yang diberikan kabupaten dengan dana ADD ini karena desa diberikan hak secara penuh untuk mengelola desanya dengan dana tersebut. Lembaga yang berhubungan langsung dengan dusun Bogoran di antara lain BPD, PKK, Karang Taruna tetapi sudah tidak terlalu aktif lagi, Gapoktan, Lembaga Keuangan Mikro yang mendapatkan dana dari Departemen Pertanian yang diberikan kepada anggota dari Gapoktan.

Pak Kades bercerita tentang dana yang didapat dari PNPM Mandiri. Ia bercerita bahwa tahun kemarin Bogoran mendapat dana pembangunan fisik sekitar 240 juta. Sebelum pemberian dana tersebut para Kades diharuskan mengajukan proposal terlebih dahulu tentang kebutuhan desa masing-masing. Pemberian dana ini ada dua macam yaitu dana untuk pembangunan fisik yang bersifat hibah dan dana untuk pemberdayaan yang bersifat pinjaman. Desa yang masih memiliki hutang dengan PNPM Mandiri tidak boleh mengajukan kembali proposal dan tidak bisa mendapatkan dana bantuan untuk pembangunan desa. Saat tahun 2009 Desa Bogoran masih memiliki hutang senilai enam puluh juta. Saat itu Pak Kades merasa dilematis apakah akan tetap dengan keadaan terus berhutang atau mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah hutang tersebut sehingga dapat mengajukan proposal kembali ke PNPM Mandiri. Akhirnya saat itu Pak Kades memutuskan untuk melunasi hutang tersebut dengan menggunakan strategi. Pak Kades nekat untuk meminjam uang senilai enam puluh juta dalam dua tahap ke Bank BRI dengan menggadai harta pribadinya. Tahapan yang pertama senilai 35 juta dilunasi dalam jangka waktu enam bulan dengan bunga lima juta lalu

selanjutnya 25 juta dilunasi dengan bunga lima juta dalam waktu enam bulan. Tentu saja sebelum mengambil keputusan ini Pak Kades sudah merundingkan terlebih dahulu kepada warganya karena ini adalah untuk kepentingan warganya dan agar tidak terjadi salah paham pada waktu kedepannya. Meskipun ada perbedaan pendapat akhirnya warga memutuskan untuk meminjam uang kepada bank karena untuk uang sejumlah itu tidak ada warga yang mampu meminjamkannya.

Setelah hutang selesai Pak Kades dapat mengajukan proposal ke PNPM Mandiri. Ia lebih mengutamakan pembangunan fisik untuk desanya meskipun Desa Bogoran juga mendapatkan dana pemberdayaan senilai tiga puluh juta. Desa Bogoran untuk saat itu mendapatkan dana yang lumayan besar dibanding desa lainnya di Kecamatan Sapuran. Desa lain mendapat dana yang tidak besar karena dalam pengajuannya memang hanya memberikan anggaran yang kecil. Pak Kades Bogoran memiliki strategi untuk membangun desanya yaitu mengajukan anggaran yang besar agar dapat membangun fisik desanya terutama jalan. Ia bercerita bahwa saat ini desanya baru saja mendapatkan lima proyek yang diajukannya ke kecamatan yang bernilai hampir 500 juta. Akan tetapi ada desa yang tidak dapat proyek sama sekali yaitu Desa Karang Sari. Saat rapat di kecamatan hampir saja ada ribut karena kepala Desa Karang Sari kecewa kepada Pak Camat, tetapi reaksi Pak Camat hanya senyum-senyum saja. Pak Kades tidak menampik bahwa kelancaran pengajuan proyeknya di kecamatan tidak terlepas dari kelincahannya memanfaatkan jaringan. Ia selalu bersikap terbuka dengan warganya ataupun dengan atasannya sehingga komunikasi dapat lebih lancar.

Pak Kades bercerita juga bahwa ada Desa Sedayu yang hanya mendapat dana kecil untuk pembangunan desanya karena ia memilih Bupati yang tidak banyak didukung oleh desa-desa lain pada umumnya. Ini dapat terlihat di awal masuk jalan Desa Sedayu banyak jalan yang rusak, keadaan ini berbeda sekali dengan Desa Bogoran yang sudah halus aspalnya. Dahulu ternyata Kepala Desa Sedayu adalah seorang preman yang cukup ditakuti oleh warganya. Pak Kades bercerita, sampai sekarang tidak terlihat kinerja yang baik karena jarang sekali masuk kantor dan tidak berbuat banyak untuk warga desa dan pembangunan desanya. Menurut Pak Kades, jaringan memang sangat penting dalam

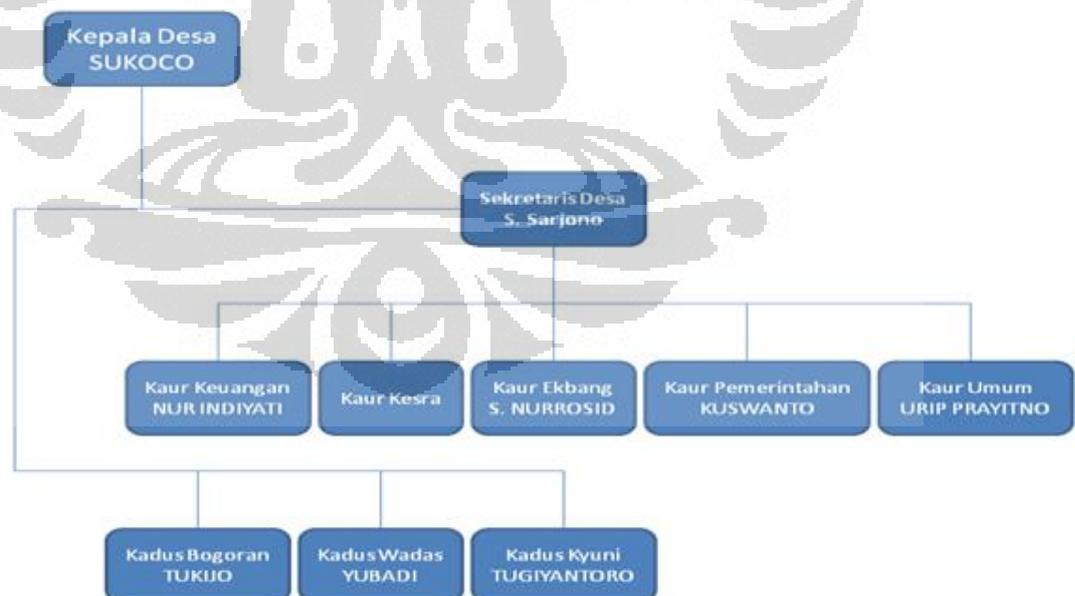
menjalankan tugasnya sebagai kepala desa. Banyak desa yang tidak mendapat bantuan dana pembangunan desa karena kepala desa tersebut tidak mampu membentuk jaringan dengan baik. Pak Kades dalam menjalankan tugasnya memang sedikit idealis untuk membangun desanya dengan cara yang memakmurkan warganya. Maklum saja, Pak Kades adalah mantan aktivis di suatu LSM. Pak Kades bercerita bahwa saat awal menjalankan tugasnya sebagai kepala desa sebagai mantan aktivis beliau sangat terkejut dengan realita yang ada, seperti misalnya banyak dana yang turun yang ternyata harus dipotong oleh oknum-oknum di atasnya. Akan tetapi dari keadaan tersebut memberikan banyak pelajaran yang berharga untuknya. Ia terus berusaha menemukan strategi untuk terus memajukan desanya tanpa “menginjak” warganya. Menurut Pak Kades, saat turunnya dana dari PNPM Mandiri, ia tidak mendapat komisi apa-apa. Ia hanya berfokus bagaimana dana tersebut juga dapat melunasi hutang ke bank BRI.

Saat program pembangunan jalan di Dusun Kyuni berlangsung, seharusnya para pekerja pembangunan aspal jalan dibayar dua puluh ribu per orang per hari. Akan tetapi dalam realitanya kepala Dusun Kyuni malah tidak membayar sama sekali para pekerja tersebut dan menyuruh warganya untuk bergotong royong secara sukarela. Setelah warga mendengar kabar bahwa mereka seharusnya dibayar para warga langsung marah dan mencaci Kepala Desa Bogoran karena dianggap telah menipu mereka dan banyak prasangka buruk ditujukan kepada Kades. Menurut Kades, saat keributan itu berlangsung Pak Kades malah menjauh dari dusun tersebut karena dikhawatirkan keributan tersebut menghentikan program pembangunan jalan yang sedang dibangun warga. Oleh karena itu, daripada menimbulkan kekacauan yang terlalu jauh Pak Kades mendiamkan terlebih dahulu peristiwa itu sampai pembangunan jalan tersebut selesai. Pembangunan tersebut berlangsung dari bulan November 2010-Februari 2011. Saat pembangunan sudah selesai maka Pak Kades mengumpulkan warga Dusun Kyuni untuk mendiskusikan masalah tersebut. Perkumpulan tersebut dihadiri oleh 30 orang warga, kepala dusun dan juga para sesepuh yang dituakan. Menurut Kades sebenarnya saat itu ia menyuruh Pak Kadus (Kepala Dusun) untuk mengundang sembilan puluh orang warganya tetapi ternyata hanya tiga puluh orang. Setelah itu Pak Kades memulai pertemuan dengan menjelaskan

semua yang terjadi. Pak Kades menjelaskan bahwa sebenarnya beliau sudah memerintahkan Kadus untuk membayar pekerja pembangunan jalan tersebut tetapi ternyata Pak Kadus malah menyimpang dari perintah dan memprovokasi warga sehingga timbul keributan. Pak Kades menerapkan prinsip untuk selalu terbuka dengan warganya. Ia selalu mengutamakan transparansi baik kepada warganya maupun kepada atasannya. Ia juga bersifat terbuka dengan adanya kritik dan saran yang diajukan oleh warganya.

Pak Kades bercerita tentang Kadus Wadas yang belum lama ini diberhentikan karena tindakan korupsi yang dilakukannya terhadap dana pembangunan dusunnya. Dengan terpaksa Pak Kades menyita rumahnya untuk mengganti uang desa yang telah dikorupsi, yang telah ditandatangani sebagai tanda persetujuan oleh Kadus tersebut. Rumah tersebut disita karena hanya itu satu-satunya harta yang ia miliki. Hasil korupsinya selama ini diperuntukkan untuk berjalan-jalan ke luar dusun untuk kepentingan pribadi. Saat ini Kepala Dusun diisi oleh Kadus sementara.

Tabel 2.5. Bagan Perangkat Desa Bogor





Gambar 2.4. Perangkat desa di Bogoran

2.5. Pendidikan, Agama, dan Kepercayaan

Tingkat pendidikan warga Desa Bogoran tergolong cukup tinggi. Ini bisa dilihat dari hampir sebagian besar anak usia sekolah dapat bersekolah hingga tingkat SLTA. Tingkat pendidikan ini disebabkan karena sudah terciptanya kesadaran para orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya agar dapat menjadi anak yang membanggakan orang tuanya. Jarak yang jauh antara rumah dan sekolah tidak menghalangi semangat orang tua untuk mengantarkan anak-anaknya yang masih kecil untuk bersekolah. Seperti anggota keluarga Pak Emboh yaitu, Atun dan adiknya Yuli yang bernama Puji. Mereka biasa pulang sekolah pada pukul 12.00 WIB. Atun dan Puji bersekolah di Wadas dan mereka berjalan kaki ke sekolahnya selama 1 jam perjalanan.

Di Dusun Bogoran belum ada sekolah setingkat SD, SMP, SMA yang dibangun. Hanya ada bangunan PAUD yang diperuntukkan untuk anak-anak usia dini yang berada di samping Balai Desa Bogoran. Sekolah SD, SMP, SMA ada di luar Dusun Bogoran seperti di Dusun Wadas dan di Desa Sedayu sehingga anak yang bersekolah harus melakukan perjalanan yang cukup jauh ke sekolah mereka. Ada yang diantar motor oleh orang tuanya ataupun anggota keluarga lainnya. Ada

juga yang diantar oleh orang tuanya dengan berjalan kaki. Tidak jarang ibu yang mengantar anaknya sekolah juga sekaligus menggendong anaknya yang masih kecil. Ada juga yang bersekolah dengan beramai-ramai berjalan kaki bersama teman-temannya. Di Dusun Bogoran hanya sedikit sekali warganya yang melanjutkan tingkat pendidikannya ke Perguruan Tinggi. Saya baru mengetahui hanya ada sedikit warga yang sedang kuliah diantaranya satu-satunya bidan yang ada di Dusun Bogoran. Ia melanjutkan sekolah kebidanannya karena mendapat bantuan dari institusi. Lainnya yaitu anaknya Ibu Parni yang sedang kuliah setingkat D3 di Yogya, kuliahnya karena kemauan anaknya sendiri dan Ibu Parni termasuk mampu dalam membiayai kuliah anaknya tersebut. Selain itu, ada Yohan yang sedang menempuh kuliah S1 Komunikasi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ia memang anak yang berkemauan keras untuk menggapai mimpinya. Saat kuliah ia tidak ingin merepotkan orang tuanya soal biaya. Oleh karena itu, Yohan mencari biaya kuliah dengan berjualan pulsa dan juga membantu kerabatnya berjualan baju. Ada juga keluarga informan saya yaitu suaminya Mbak Sulis yang bernama Mas Ikram. Mas Ikram saat ini sedang mengikuti Paket C untuk kesetaraan SMA. Ia mengikuti paket C selama 6 bulan dengan biaya 2,5 juta. Awalnya Mas Ikram kurang berminat untuk mengikuti paket C, tetapi atas desakan temannya maka ia mau untuk mengikuti paket C. Ia percaya bahwa dengan ia mengikuti paket C maka ia dapat memiliki kesempatan untuk mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik. Ia juga berkata bahwa ia berniat untuk maju sebagai calon kepala desa di periode berikutnya.

Menurut keterangan Pak Kades, dalam hal agama dan kepercayaan, agama yang paling banyak dipeluk oleh warga Desa Bogoran adalah agama Islam Nahdatul Ulama (NU). Ada juga yang Islam Muhammadiyah dan Kristen di Dusun Kyuni sekitar 10% warga. Kristen hanya terdapat di Dusun Kyuni dan terdapat gereja disana. Kristen di Kyuni merupakan peninggalan dari jajahan Belanda. Pak Kades berkata, Dusun Wadas dan Bogoran tidak terpengaruh agama Kristen karena warganya cukup kuat bertahan memeluk agama Islam. Menurut Pak Kades, dari para perangkat desa terus melakukan sosialisasi agar warga dapat terus hidup rukun. Pak Kades bercerita, akhir-akhir ini banyak kasus keributan antar pemeluk agama di berbagai daerah. Masalah yang pernah terjadi antar umat

beragama di Desa Bogoran antara lain terjadi di Kyuni yaitu ada beberapa laki-laki Kristen yang menghamili perempuan muslim sehingga pihak pria hanya mau menikahi perempuan tersebut jika perempuan itu mau masuk Kristen. Pertentangan dari peristiwa ini biasanya datang dari orang tua pihak perempuan yang tidak setuju jika anaknya masuk Kristen. Hal tersebut dilakukan tidak hanya satu laki-laki Kristen tetapi ada beberapa yang membuat para warga menjadi curiga kalau hal tersebut merupakan sesuatu yang disengaja. Pada akhir 2008 sempat terjadi keributan karena ada laki-laki Kristen dari Desa Bogoran menghamili wanita dari Desa Sedayu. Laki-laki ini memaksa agar perempuannya mau masuk Kristen, tetapi timbul pertentangan yang sangat keras dari pihak keluarga perempuannya. Kericuhan yang terjadi sudah bukan masalah antara dua orang laki-laki dan perempuan yang hamil saja tetapi sudah menyangkut masalah agama yang diperselisihkan oleh dua desa. Pak Kades pun ikut turun tangan dan memberikan pilihan kepada pihak laki-lakinya agar mau masuk agama Islam jika memang tidak ingin memancing keributan yang lebih besar lagi. Laki-laki itu akhirnya terpaksa masuk Islam karena setelah memeluk agama Islam ia menjadi Kristen kembali dan hal itu pun menyakiti hati warga.

Menurut Pak Kades, warga Desa Bogoran masih memiliki kebiasaan kunjungan ke makam-makam keramat. Para warga melakukan bersih-bersih makam pada setiap 70 hari sekali pada hari Jum'at Kliwon. Biasanya diadakan pada hari Jum'at Kliwon. Makam-makam keramat yang ada biasanya adalah sesepuh-sesepuh awal berdirinya desa Bogoran ini. Di Dusun Bogoran ada Mbah Cobowo yang merupakan pembuka Dusun Bogoran. Di Dusun Wadas ada Mbah Cokrohadikusumo atau biasa disebut Mbah Mandir. Untuk saat ini para warga Bogoran sudah sedikit sekali yang meletakkan sesajen, sesajen hanya ditempatkan di rumah-rumah masing-masing warga dengan membakar kemenyan. Dulu ada tempat khusus untuk meletakkan sajen tetapi sekarang sudah tidak ada lagi semenjak awal tahun 90-an. Jika melakukan kunjungan warga hanya membawa bunga dan ditabur di makam tersebut.

Saat saya ke Bogoran dan tinggal disana saya masih melihat beberapa warganya masih percaya dengan "orang pintar". Seperti misalnya yang dialami oleh Ibu Parti yang memiliki anak bernama Kiki. Kiki adalah anak yang memiliki

sakit keterbelakangan mental. Ibu Parti bercerita semenjak usia 10 tahun Kiki sering kejang hingga sekarang. Ia tidak nyambung kalau diajak berbicara dan terkadang mengulang-ulang omongannya. Ia terkadang mengamuk sendiri dan memaksa agar keinginannya dituruti. Saat saya datang ke rumah Mbah Karto, Kiki sedang mengeluhkan sandalnya yang putus dan meminta ganti. Ia tidak mau memakai sandal yang putus ataupun baju yang robek. Sehari ia bisa berganti pakaian berulang kali. Akhirnya ia digantikan sandal oleh ibunya. Menurut ibunya sandalnya seminggu sekali putus disebabkan karena langkah kakinya yang tidak digerakkan seperti orang normal. Ibu Parti bercerita bahwa ia sudah berulang kali mengobati anaknya. Ia sudah mencoba berobat kemana saja seperti ke Banten, Jakarta, Jawa Barat, berbagai daerah Jawa Tengah. Ia sudah mencoba berobat ke dokter, alternatif, sampai ke dukun tetapi belum ada perkembangan yang baik. Menurut dokter, ia mengalami penyumbatan syaraf di otaknya sehingga otaknya tidak dapat mengalami perkembangan dengan baik dan sering mengalami kejang. Akan tetapi jika berobat ke dukun, dukun tersebut mengatakan bahwa Kiki mengalami gangguan setan sejak orangtuanya mengontrak di sebuah rumah di Bogor yang sudah lama tidak ditempati. Ibu Parti sudah pasrah meskipun dia terkadang malu dengan omongan tetangganya atau saudaranya yang mencibir Kiki bahkan mengatakan bahwa ia itu gila, idiot, atau omongan lainnya yang tidak enak.

Hal lain juga terjadi pada istri Mbah Karto yang mengalami sakit. Istri Mbah Karto jatuh sakit karena ia menderita darah tinggi akibat terlalu banyak mengkonsumsi daging yang merupakan sisa pengajian yang dilakukan di rumah Ibu Parti. Mbah putri atau istri Mbah Karto tambah linglung, ia jadi pikun dan sering marah-marah. Ternyata saat diperiksa Ibu Bidan, tensinya mencapai 210. Ia menderita darah tinggi, tetapi ia tidak mau dikontrol di rumah sakit karena ia tidak mau dirawat. Ketika mbah putri masih sakit, suami Ibu Parti mencoba menyembuhkan lewat “orang pintar” yang dipercaya dapat menyembuhkan pasien dengan doa-doa khusus yang biasanya lewat perantara air putih yang telah didoakan. Ketika sakitnya tidak kunjung sembuh maka mbah putri berniat untuk menyumbangkan uang sebesar lima juta rupiah kepada panti asuhan dan juga membagikan uang untuk lima orang tetangganya masing-masing lima puluh ribu

yang dirasa pantas untuk mendapatkan uang tersebut. Sumbangan tersebut dimaksudkan dari niat mbah putri sendiri untuk kesembuhannya. Ibu Parti dan Ibu Karsi membagikan uang tersebut dengan mengunjungi rumah tetangga tersebut masing-masing. Pak Wiwi bercerita kepada saya bahwa ia bersyukur karena Mbah Putri akhirnya mau menyumbangkan hartanya untuk orang lain. Ia berkata bahwa Mbah Putri sejak dari dulu tidak pernah sedikitpun mengeluarkan zakat apalagi sedekah.

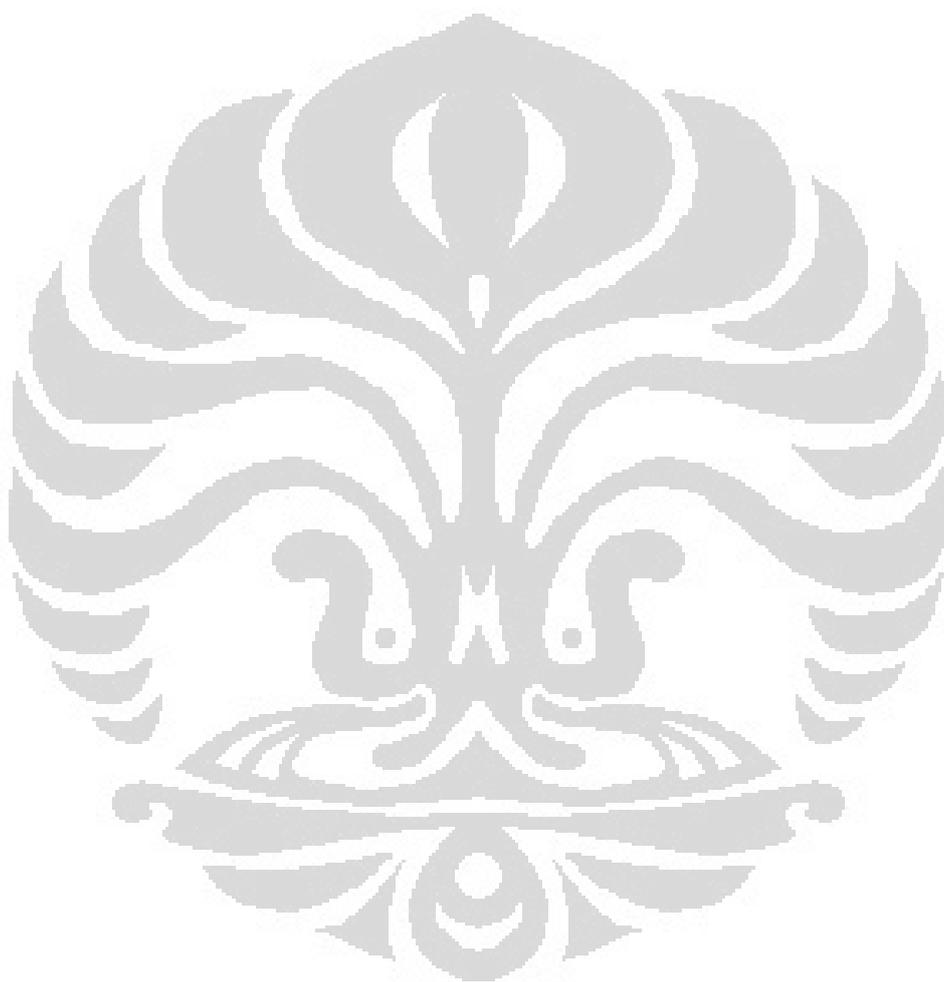
Selain itu, Mbak Sulis bercerita bahwa keluarga Pak Kades tidak pernah melakukan shalat kecuali pada shalat Ied. Menurutnya, keluarga Mbah Karto juga tidak pernah melakukan shalat, kecuali Mbah Karto yang sering shalat berjamaah di masjid. Menurut Mbak Sulis, keluarganya Mbah Karto kadang masih makan darah daging sapi yang seharusnya itu haram dalam agama Islam. Cerita Mbak Sulis tentang keluarga Mbah Karto tersebut memang saya alami sendiri ketika tinggal selama beberapa hari di rumah keluarga Mbah Karto. Saya belum pernah melihat anggota keluarga Mbah Karto melaksanakan shalat. Ketika saya sedang berbincang-bincang dengan keluarganya di jumat siang, saat masuk waktu shalat jumat, anak dan menantunya Mbah Karto tidak ada yang shalat, kecuali Mbah Karto sendiri.

Di Bogor secara rutin mengadakan pengajian setiap hari Kamis. Untuk pengajian ibu-ibu diadakan hari Kamis sore selepas shalat Ashar, sedangkan untuk para bapak-bapak diadakan pada hari Kamis malam yang biasanya dimulai selepas shalat Isya. Saya sendiri telah mengikuti beberapa kali pengajian diantaranya di rumah Ibu Parti dan Mbak Santi. Di rumah Mbak Santi, pengajian yang didatangi kira-kira dua puluh orang ibu-ibu dimulai dengan sambutan memakai bahasa Jawa, lalu dilanjutkan dengan membaca doa-doa. Setelah itu dimulai membaca surat Yasin yang dipimpin oleh Mbak Sulis. Setelah pembacaan Yasin, bersama-sama dilanjutkan dengan shalawatan. Pembacaan yasin, shalawat, doa, dan juga jatah rumah yang didatangi saat yasinan dilakukan dengan orang yang berbeda-beda dan digilir tiap pertemuan, jadi setiap orang memiliki giliran. Setelah selesai pembacaan shalawatan, pengajian pun selesai dan dilanjutkan dengan makan bersama.

Di Bogor, memang waktu shalat Ashar lebih lama dari normalnya. Untuk shalat Ashar, jadwal sebenarnya adalah pukul 15.20 tetapi adzan baru dikumandangkan pada pukul 16.20, dengan kata lain lebih lambat satu jam dari jadwal yang seharusnya. Saat saya tanyakan kepada warga, mereka menjelaskan bahwa adzan tersebut sengaja dilambatkan agar memberi waktu para warga yang kebanyakan adalah petani untuk bersih-bersih di rumah sebelum melakukan shalat berjamaah di mushola. Akan tetapi lain halnya dengan adzan shalat maghrib yang dikumandangkan lebih cepat dari jadwal yang sebenarnya. Di jadwal sebenarnya maghrib pada pukul 17.45, tetapi adzan maghrib sudah dikumandangkan pada pukul 17.35. alasannya adalah untuk memberi waktu melakukan dzikir dan doa yang lebih panjang dan juga memberi waktu persiapan untuk pengajian yang dilakukan setelah shalat isya. Saat waktu shalat maghrib beberapa warga Bogor mengutamakan shalat berjamaah di masjid terutama pada Kamis malam karena imam (pemimpin) shalat mengadakan doa bersama setelah melakukan shalat untuk para warga Bogor yang sudah meninggal. Salah satunya yaitu Mbak Sulis yang selalu mengutamakan shalat maghrib di masjid dekat rumahnya terutama pada malam Jum'at. Pada Kamis malam, terlihat lebih banyak orang yang datang dibanding shalat berjamaah pada hari lainnya. Di shaf wanita, ada 12 wanita yang mengikuti shalat saat itu termasuk saya dan Mbak Sulis. Terlihat para jamaah sangat khusyuk melakukan shalat dan membacakan doa-doa tersebut.



Gambar 2.5. Masjid dan kegiatan pengajian rutin di Bogor



BAB 3

HUTAN RAKYAT BOGORAN

3.1. Sejarah Hutan Rakyat

Istilah Hutan Rakyat sudah lama digunakan dalam program-program pembangunan kehutanan dan disebut dalam UU Pokok Kehutanan (UUPK) tahun 1967 dengan terminologi “hutan milik”. Di Jawa, hutan rakyat dikembangkan pada tahun 1930-an oleh pemerintah kolonial. Setelah itu, mereka melanjutkan pada tahun 1952 melalui gerakan “Karang Kitri”. Secara nasional, pengembangan hutan rakyat selanjutnya berada di bawah payung program penghijauan yang diselenggarakan pada tahun 1960-an dimana Pekan Raya Penghijauan I diadakan pada tahun 1961. Sampai saat ini hutan rakyat telah diusahakan di tanah milik yang diakui pada tingkat lokal (tanah adat). Di dalam hutan rakyat ditanami aneka pepohonan yang hasil utamanya bisa beraneka ragam. Untuk hasil kayu misalnya sengon, jati, akasia, mahoni, dan lain sebagainya. Selain itu yang hasil utamanya adalah getah antara lain kemenyan dan damar. Sementara itu yang hasil utamanya buah antara lain kemiri, durian, kelapa, dan bambu. (Suharjito dan Darusman, 1998).

Dalam kepustakaan ilmu kehutanan dapat ditemukan istilah hutan rakyat. Hutan rakyat ini dapat mencakup hutan individu, kelompok, hutan keluarga, hutan kolektif. Dengan demikian membuat klasifikasi tentang hutan dapat bermacam-macam dengan dasar klasifikasi yang berbeda, namun konsisten dan sepadan (apakah menurut jenis, habitat, status hak, atau pelaku). Istilah hutan rakyat tidak dikenal dalam bahasa kelompok-kelompok masyarakat pengelola hutan, meskipun dalam UU kehutanan disebutkan bahwa hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik lazim disebut hutan rakyat. Kata lazim disini menurut pihak pembuat UU, tetapi tidak lazim dalam masyarakat. Istilah yang digunakan berbeda-beda dalam masyarakat. (Dephut, 1974).

Unsur-unsur hutan rakyat dalam materi dan penjelasan UU Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 dicirikan antara lain :

- a. Hutan yang diusahakan sendiri, bersama orang lain, atau badan hukum.

- b. Berada di atas tanah milik atau hak lain berdasarkan aturan perundang-undangan.
- c. Dapat dimiliki berdasarkan penetapan Menteri Kehutanan.

Selain itu, sasaran pembangunan hutan rakyat adalah lahan milik dengan kriteria: (Jaffar, 1993)

1. Areal kritis dengan keadaan lapangan berjurang dan bertebing yang mempunyai kelereng lebih dari 30%
2. Areal kritis yang telah ditelantarkan atau tidak digarap lagi sebagai bahan pertanian tanaman pangan semusim.
3. Areal kritis yang karena pertimbangan khusus seperti untuk perlindungan mata air dan bangunan pengairan yang perlu dijadikan areal tertutup dengan tanaman tahunan. Lahan milik rakyat yang karena pertimbangan ekonomi lebih menguntungkan bila dijadikan hutan rakyat daripada untuk tanaman semusim.

Bogoran memiliki sejarah tersendiri tentang keberadaan hutan rakyat di wilayahnya. Menurut Awang, dkk (2007) sejarah hutan rakyat di Bogor dibagi dalam beberapa waktu yaitu:

Jaman Belanda;

Para petani masih menanam tanaman pertanian semusim seperti jagung dan ketela pohon. Banyak lahan yang masih berwujud semak belukar karena luasnya lahan yang dimiliki dan terbatasnya tenaga kerja. Beberapa lahan dijadikan sawah tadah hujan. Banyaknya hama babi hutan seringkali menyebabkan petani tidak mendapatkan panen. Di lahan milik pemerintah Hindia Belanda, *Boshzewen* menanam sengan yang kemudian bijinya beterbangan ke lahan milik masyarakat. Oleh masyarakat, biji yang tumbuh dirawat dan dipelihara. Beberapa tanaman kayu yang telah ada pada waktu itu adalah suren, mei, dadap, dan mindi. Sementara masyarakat juga telah mengambil buah petai, kelapa, papaya, dan pisang, untuk keperluan rumah tangga.

Jaman Jepang;

Budidaya tanaman kopi dimulai. Bibit diperoleh dengan membeli di pasar. Pada waktu inilah pola campuran antara tanaman kehutanan dan perkebunan meskipun cara perawatannya masih minimal. Hanya tempat-tempat dimana kopi atau sengon akan ditanam sajalah yang dibersihkan dari rumput dan belukar. Jumlah batang yang ditanam tidak terlalu banyak. Sengon (nama lokal besiah atau kolbi) dipergunakan sebagai naungan kopi, sementara tanaman kayu yang lain seperti suren dan dadap ditanam sebagai tanaman tepi. Beberapa lahan juga masih bertanam dengan tanaman pangan semusim.

Dekade lima puluhan;

Harga kopi mulai membaik, meskipun cara penjualannya masih sulit. Para petani mengangkutnya dengan berjalan kaki ke pasar yang letaknya cukup jauh.

Tahun enam puluhan;

Introduksi tanaman yang memperkaya pola campuran dimulai. Tanaman-tanaman introduksi tersebut adalah cengkeh, kemukus, suruh, kapulogo, dan panili. Para petani juga telah mulai mencampurkan tanaman di bawah tegalan seperti cabe, jemu, dan empon-empon, selain masih juga mempertahankan tanaman jagung dan ketela pohon.

Akhir tahun tujuh puluhan;

Sebuah tradisi lahir. Keinginan untuk saling membantu meringankan pekerjaan dalam bentuk kerja bersama yang dikenal dengan sebutan *stralan*. Terus berkembang di tahun berikutnya. Saat ini petani bersedia membayar sejumlah uang untuk mempekerjakan sebuah kelompok dalam pekerjaan-pekerjaan di lahannya. Cara pembayaran yang dilakukan pun bervariasi. Ada yang langsung dibayarkan dan ada yang dibayarkan tahunan menjelang lebaran. Tidak heran, kalau masyarakat menganggap kegiatan ini sekaligus untuk menabung, meskipun kerja bersama yang tidak melibatkan nilai rupiah juga masih bertahan.

Awal Sembilan puluhan;

Pabrik-pabrik pengolahan kayu sengon mulai didirikan di Kecamatan Sapuran. Kondisi ini menyebabkan permintaan kayu sengon semakin tinggi, sehingga masyarakat semakin bergairah untuk menanam sengon di lahannya. Seiring dengan hal ini teknik budidaya sengon yang lebih baik semakin menjadi

perhatian masyarakat karena pada dasarnya mereka ingin mengotimalkan lahan semaksimal mungkin.

3.2. Keanekaragaman Tanaman Hutan Rakyat

Hutan rakyat tidak bisa dilihat secara sederhana hanya dari kondisi tegakan yang ada. Awang dkk. (2002) berpendapat bahwa kupasan tentang hutan rakyat seharusnya dilihat dari perspektif sistem penggunaan lahan, arti hutan rakyat menurut masyarakat, dan dengan melihat dimana lokasi hutan rakyat tersebut. Beberapa manfaat dari hutan rakyat antara lain dapat merehabilitasi dan meningkatkan produktifitas lahan-lahan kritis dan lahan-lahan produktif, membantu masyarakat dalam menyediakan kayu bahan bangunan dan bahan baku industri, memperbaiki tata air dan lingkungan, dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pemilik/penggarap hutan rakyat.

Di Bogor terdapat hutan negara dan hutan rakyat. Total lahan hutan di seluruh desa adalah 660 ha yang terdiri dari 223 ha hutan negara dan 477 ha merupakan lahan milik masyarakat. Dari 477 ha tersebut dibagi ke 2 bagian yaitu 70% merupakan lahan hutan rakyat dan 30% merupakan sawah dan ladang. Hutan rakyat merupakan sebetangan lahan luas yang dimiliki oleh masyarakat yang kepemilikannya dibatasi dengan berbagai tanda pembatas. Di Bogor biasanya tanda pembatas merupakan pohon mahoni. Pohon mahoni dijadikan sebagai batas karena pohon mahoni kurang baik tumbuh di tengah hutan sehingga hanya ditanam di tepi hutan saja. Tanaman yang ditanam di hutan rakyat Bogor menggunakan teknik tumpang sari yaitu menanam berbagai macam jenis tanaman dalam satu bidang lahan. Jenis tanaman yang ditanam di antaranya adalah albasia (sengon), kopi, cabe, daun singkong, dan beberapa jenis tanaman lainnya.

Penanaman pepohonan di tanah milik masyarakat oleh pemiliknya, yang tanamannya sekarang dikenal sebagai hutan rakyat, merupakan salah satu butir kearifan masyarakat agraris dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk berikut kebutuhannya, serta semakin terbatasnya kepemilikan tanah, peran hutan rakyat bagi kesejahteraan masyarakat semakin penting. Pengetahuan tentang kondisi tanah dan faktor-faktor lingkungannya untuk dipadukan dengan pengetahuan mengenai jenis-jenis pohon

yang akan ditanam untuk mendapatkan hasil yang diharapkan oleh pemilik lahan, merupakan faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan hutan rakyat. Berbagai jenis pohon dan tanaman yang disajikan dalam tulisan ini dapat beradaptasi pada berbagai jenis dan kondisi tanah dan iklim, tumbuh cepat, dan tidak memerlukan pemeliharaan insentif, sehingga cocok untuk dibudidayakan dalam bentuk hutan rakyat.

Dalam mendeskripsikan jenis tanaman apa saja yang ada di hutan rakyat Bogor, saya merujuk pada pandangan Scott yaitu petani memiliki orientasi yang dominan kepada subsistensi (Scott, 1981:19). Mereka lebih mengutamakan apa yang dianggap aman dan dapat diandalkan dalam jangka panjang. Prinsip “dahulukan selamat” (*safety first*) adalah hal yang utama. Persoalan-persoalan seperti keuntungan yang dapat diperoleh dari investasi, hasil tiap unit lahan, produktifitas kerja, pada hakikatnya merupakan persoalan nomor dua. Petani lebih mementingkan kegiatan-kegiatan subsistensi yang rutin sudah terbukti memadai di waktu lampau, daripada berusaha mencari keuntungan. Petani Bogor menentukan jenis tanaman yang ditanam sesuai dengan pengalaman-pengalaman mereka semasa hidupnya. Mereka memilih tanaman yang aman untuk diproduksi. Salah satu tanaman yang dapat membuat mereka aman adalah kayu albasia. Petani yang memiliki lahan pasti menanam kayu albasia untuk tabungan jangka panjang mereka seperti untuk naik haji, keperluan sekolah, bahkan untuk membeli mobil. Di Dusun Bogor, sudah banyak yang sudah melakukan ibadah haji. Semua warga yang melaksanakan haji merupakan hasil dari menjual kayu albasia. Tahun 2011 sudah ada 11 orang yang pergi haji di dusun ini.

Meskipun petani terkesan mengurung diri dalam lingkup kebutuhan subsistensinya, bukan berarti mereka tidak menjalin hubungan dengan masyarakat di sekitarnya. Redfield (1985) mengajukan konsep *peasant community* yang olehnya didefinisikan sebagai suatu “... masyarakat kecil yang tidak terisolasi, dan tidak memenuhi semua kebutuhan hidup penduduknya, tetapi yang di satu pihak mempunyai hubungan horizontal dengan komuniti-komuniti petani lain di sekitarnya, tetapi di pihak lain juga secara vertikal dengan komuniti-komuniti di daerah perkotaan”. Salah satu petani Bogor bernama Pak Yanto. Pak Yanto adalah anak kelima dari Mbah Karto. Rumah Pak Yanto berada persis di belakang

rumah Mbah Karto. Ia merupakan petani yang sangat bekerja keras dan tekun dalam menjalani pekerjaannya sebagai petani. Ia menanam banyak macam tanaman di kebunnya untuk tujuan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk menabung. Ia menanam berbagai sayur-mayur, buah-buahan, dan tanaman obat-obatan untuk digunakan sendiri dan untuk dijual dalam jangka waktu pendek. Pak Yanto menjelaskan bahwa rata-rata penghasilannya per bulan adalah 1,5 juta per bulan. Tanaman yang dijual oleh Pak Yanto diantaranya kopi, albasia, kapulaga, dan cabai rawit. Penghasilannya tersebut dipergunakan untuk kebutuhan makan sehari-hari keluarganya, membeli barang-barang yang dijual di warung, sekolah untuk kedua anaknya, dan membeli tanah. Ia juga menanam kayu untuk menabung dalam jangka panjang. Pak Yanto juga ingin melaksanakan haji, saat ini ia sudah menabung dari menanam kayu albasia. Menurut Pak Yanto, untuk harga kayu albasia (utama) (dalam kubik/m²):

10-15 : Rp.275 ribu

15-19 : Rp. 400 ribu

20-25 : Rp. 600 ribu

Penanaman albasia normalnya adalah lima tahun, sedangkan penanaman kayu lainnya seperti suren, mahoni, dan nangka adalah lima belas tahun. Untuk pohon nangka jika sudah berusia 30-50 tahun maka dapat dijual hingga Rp.1 juta per kubik. Nangka juga dapat dimanfaatkan daunnya. Untuk bibit albasia biasanya dibeli di penjual Pasar Sapuran. Perbedaan penanaman kayu antara hutan negara dan hutan rakyat adalah jika di hutan negara ditanam damar dan pinus, sedangkan di hutan rakyat ditanam kayu albasia.

Ada beberapa kategori tanaman yang berada di Bogor yang dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.1. Jenis Tanaman Berdasarkan Ketinggian Tajuk

No	Variasi Tajuk	Ketinggian Tajuk	Tanaman
1	Tanaman bertajuk tinggi	> 5 meter	Albasia, mahoni, mindi, kelapa, petai, rambutan, durian, klengkeng, waru, suren
2	Tanaman bertajuk sedang	1-5 meter	Salak, kopi, pisang, kaliandra
3	Tanaman bertajuk rendah	< 1 meter	Jahe, cabai, kunyit, talas

Sumber : Awang, dkk, 2005

Tabel 3.2. Jenis Tanaman Berdasarkan Jangka Waktu Panen

No	Variasi Waktu Panen	Jangka Waktu	Tanaman
1	Tanaman jangka panjang	>6 tahun	Albasia, mahoni, suren, nangka, waru
2	Tanaman jangka menengah	2-5 tahun	Salak, alpokat, kopi, kelapa, petai, jengkol, durian, cengkeh
3	Tanaman jangka pendek	<1 tahun	Pisang, jahe, kunyit, talas, jagung, singkong

Sumber : Awang, dkk, 2005

Tabel 3.3. Jenis Tanaman Berdasarkan Periode Panen

No	Variasi Periode Panen	Periode Panen	Tanaman
1	Tanaman jangka panjang	>1 tahun	Albasia, mahoni, suren
2	Tanaman jangka menengah (musiman)	6 bulan-1 tahun	Cengkeh, kemukus, kopi, petai, melinjo, jahe, kunyit, rambutan, alpokat, durian
3	Tanaman jangka pendek (harian dan bulanan)	<6 bulan	Cabai, salak, kelapa, kapulaga, pisang

Sumber : Awang, dkk, 2005

3.3. Ekonomi dan Rantai Produksi Hutan Rakyat

Pada umumnya semua hutan termasuk hutan rakyat dapat memiliki fungsi konservasi, lindung, dan produksi. Menurut Salim (2003), fungsi konservasi berarti mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Fungsi lindung berarti mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi (penerobosan) air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Fungsi produksi berarti mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Pembangunan hutan rakyat secara prinsip bertujuan untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat melalui pengembangan sumber daya hutan. Dengan demikian, hutan rakyat mempunyai posisi yang sangat strategis, baik ditinjau dari segi jaminan ketersediaan bahan baku kayu, perlindungan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Pengembangan hutan rakyat diarahkan kepada usaha-usaha rehabilitasi dan konservasi lahan di

Universitas Indonesia

luar kawasan hutan negara, penganeekaragaman hasil pertanian yang diperlukan oleh masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, penyediaan kayu sebagai bahan bangunan, bahan baku industri, penyediaan kayu bakar, usaha perbaikan tata air dan lingkungan serta sebagai penyangga bagi kawasan hutan negara.

Walaupun hutan rakyat mempunyai potensi dan peranan yang cukup besar, namun hutan rakyat di Jawa pada umumnya hanya sedikit yang memenuhi luasan minimal sesuai dengan definisi hutan (minimal 0,25 ha), hal ini disebabkan karena rata-rata kepemilikan lahan di Jawa sangat sempit. Sempitnya kepemilikan lahan setiap keluarga ini mendorong pemiliknya untuk memanfaatkan seoptimal mungkin dengan membudidayakan tanaman-tanaman yang bernilai tinggi dan cepat menghasilkan (Awang, 2005). Pengembangan hutan rakyat berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan baik dalam skala pekarangan, tegalan, kebun, sawah dan sebagainya. Umumnya tanaman padi dan palawija serta jenis tanaman pertanian lainnya sebagai penghasil utama namun dalam perkembangannya diusahakan kombinasi jenis tanaman yang meliputi tanaman pangan, buah-buahan dan tanaman tahunan, serta tanaman kehutanan yang kemudian dikenal dengan istilah agroforestri.

Bagi pemiliknya, hutan rakyat merupakan bagian penting dan tak terpisahkan dalam kehidupan mereka. Pola pemanfaatan dan interaksi warga dengan hutan rakyat cukup beragam dan berbeda-beda satu sama lain, tergantung kondisi kesuburan tanah, kultur masyarakat secara umum, dan kebijakan lokal kabupaten yang terkait dengan pembangunan hutan rakyat. Namun demikian secara umum teridentifikasi bahwa hutan rakyat memegang peranan penting dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat desa. Sebagian besar warga Bogor daerah tersebut menggantungkan hidupnya pada hutan rakyat.

Dalam menjelaskan rantai ekonomi produk hutan rakyat di Bogor, saya merujuk pada pendapat Kroeber mengenai petani yaitu petani adalah suatu masyarakat terbagi (*part societies*) dengan kebudayaan terbagi (*part culture*). Mereka hidup di daerah pedesaan dan berdekatan dengan kota-kota pasar. Petani membentuk sebuah bagian kelas dari sebuah populasi yang lebih besar, yang biasanya juga mengandung pusat-pusat kota. Bila dibandingkan dengan masyarakat yang masih sederhana, petani tidaklah terisolasi dan tidak memenuhi

kebutuhannya sendiri (*self sufficient*). Saya setuju dengan pendapat Kroeber di atas karena dalam menjalankan rantai ekonomi produk yang dihasilkan dari hutan rakyat, petani tidak bisa melepaskan hubungan mereka dengan penduduk kota.

Dalam menganalisis hubungan antara petani yang tinggal di pedesaan dengan penduduk kota juga dijelaskan oleh Foster yang melihat hubungan tersebut dari sisi yang sedikit berbeda. Ia mengarah pada struktur atau hubungan antara desa dan kota (atau negara). Foster (1967: 8) melihat petani memiliki kontrol yang sangat sedikit atas kondisi-kondisi yang mengatur hidup mereka. Petani menempati tingkat sosial-ekonomi yang sangat rendah dan menemukan bahwa keputusan-keputusan mendasar yang mempengaruhi hidup mereka dibuat dari luar masyarakatnya. Petani tidak hanya miskin, tetapi secara relatif juga tidak berdaya, atau setidaknya mereka melihat dirinya sebagai yang tidak berdaya. Dari segi kepemimpinannya petani juga lemah. Dengan menyadari bahwa mereka kekurangan kontrol politik yang efektif atas diri mereka, petani mencari alat pembantu struktural yang memungkinkan mereka memaksimalkan peluang-peluang sangat kecil yang dimiliki. Dua alat pembantu yang senantiasa dipergunakan petani adalah dengan melalui pola hubungan yang bersifat patron-klien dan dengan menciptakan suatu hubungan kekerabatan yang bersifat fiktif. Petani berusaha mencari orang yang lebih kuat dari dirinya seperti penduduk kota, tokoh agama, dan sebagainya, yang dapat dijadikan pelindung mereka. Dapat pula mereka membuat suatu hubungan kekerabatan yang memiliki posisi dan kedudukan sederajat di pemukiman lainnya. Demikian pula dalam ekonomi dan religi. Petani tunduk terhadap kesatuan sosial yang lebih besar dari mereka, yang dalam hal ini adalah kota. Secara emosi dan sejarah kebudayaan, petani juga memiliki keterikatan pada dan pokoknya dibentuk oleh kota. Banyak unsur-unsur kebudayaan kota yang telah mereka serap.

Pola distribusi produk hutan rakyat warga Bogor dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: ketersediaan sarana transportasi, hari pasaran, dan musim panen. Secara umum terdapat empat pola penjualan barang dari Bogor ke luar desa yaitu dengan; dibawa ke depo, tebasan kontan, didatangi pedagang, dan dijual ke pasar. Keterbatasan sarana transportasi di dusun ini menyebabkan hasil produksi dari Dusun Bogor tidak dapat dipasarkan ke luar desa setiap hari. Alat

transportasi yang khusus melayani angkutan produk hanya tersedia pada saat hari pasaran di Pasar Sapuran yaitu Wage dan Pahing. Pada saat musim panen produk tertentu, pedagang dari luar desa akan membawa angkutan untuk mengangkut produk-produk desa ke luar.

Berikut gambaran pola penjualan produk tanaman hutan rakyat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.4. Pola Penjualan Produk Tanaman Hutan Rakyat

No	Cara penjualan	Tempat transaksi	Pembeli	Produk Hutan Rakyat
1	Dibawa ke depo	Depo kayu	Pengepul di desa	Kayu albasia, mahoni, nangka, suren
2	Tebasan kontan	Lahan	Pengepul di desa Pembeli lokal Pedagang luar desa	Kayu albasia, mahoni Bambu Padi, petai, ketela, manis janganan, singkong
3	Didatangi bakul	Rumah	Pedagang luar desa	Padi, kopi, kapulaga, salak, jahe, kunyit, merica, pisang, kelapa, singkong, vanili
4	Dijual ke pasar	Pasar	Pedagang pasar, konsumen langsung	Kopi, kapulaga, salak, jahe, kunyit, merica, petai, pisang, cabai, jagung, merica, vanili

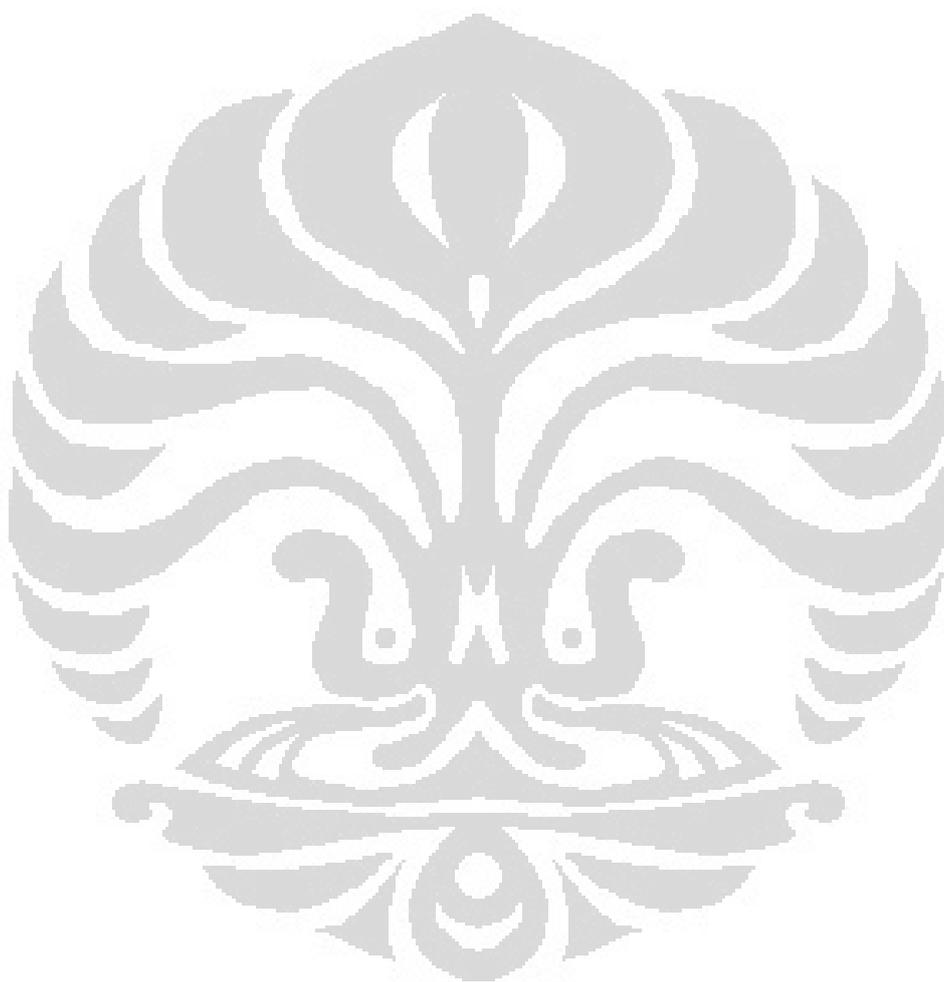
Sumber : Awang, dkk. 2005.

Ada beberapa pengalaman petani Bogor yang berkaitan pada rantai ekonomi dan produk hutan rakyat yang terjadi di Bogor. Pak Yanto bercerita kepada saya bahwa ia menghasilkan 7 ton gabah dengan harga Rp.250 ribu per kuintal. Dari tujuh ton tersebut, dua ton disimpan dan lima ton dijual ke tengkulak. Untuk tahun ini, harga kopi 18 ribu per kg. Menurutnya, jika ia memanen kopi, ia menyimpan dalam jangka waktu cukup lama. Ini dikarenakan

semakin lama kopi disimpan, maka kualitasnya semakin bagus dan harganya semakin mahal. Perbandingan harga kopi basah dan kering yaitu 1:4, jadi harga kopi yang sudah kering 4 kali lebih tinggi dibandingkan dengan kopi basah.

Untuk petani pembuat arang seperti Pak Emboh, saat pembuatan arang kemarin, ia bisa menghasilkan 1.360 kg dalam 45 karung. Ia sendiri yang mengangkut karung arang tersebut ke rumahnya. Ia menghabiskan waktu 2,5 hari untuk pengangkutannya karena ia mengangkutnya sendiri. Arang tersebut dijual ke Kota Wonosobo kepada pedagang arang yang sudah biasa membeli arang Pak Emboh. Pak Emboh dan Mbah Muhson sudah membeli kayu di lima tempat di Dusun Kyuni. Semakin jauh letak ladang dari jalan raya maka harga kayu yang dijual semakin murah karena mempertimbangkan ongkos bensin motor yang dihabiskan akan semakin mahal jika jarak ladang semakin jauh dari jalan raya. Selisihnya bisa sampai 250 ribu - 300 ribu rupiah. Ia menjelaskan bahwa ia biasanya mengantongi untung pembuatan arang sekitar satu juta rupiah dengan proses pembuatan arang yang memakan waktu dua puluh hari. Sehingga kalau dirata-rata ia dan ayahnya masing-masing mendapat 25 ribu per hari dan itu belum termasuk pengeluaran bensin yang dipakai untuk bolak balik dari rumah ke ladang.

Mbak Sulis dan suaminya mempekerjakan warga di ladangnya. Di ladang Mbak Sulis, ia mempekerjakan tiga orang, sedangkan di ladang Mas Ikram, mempekerjakan empat orang. Pekerja tersebut mengerjakan pekerjaan seperti menanam, memanen, dan membat rumput. Untuk menambah pemasukan keluarganya, ia bercerita kepada saya bahwa terkadang ia membeli kopi basah lalu ia keringkan sendiri. Mbak Sulis lalu menjualnya ke pasar dan mendapatkan untung dari penjualan tersebut. Ia dapat membeli ladang sendiri dari hasil penjualan kayu yang merupakan warisan dari orang tuanya.



BAB 4

PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT BOGORAN

4.1. Pola Penguasaan Hutan Rakyat

Hutan rakyat dalam pengertian UU No.41/1999 tentang kehutanan adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik. Definisi ini diberikan untuk membedakannya dari hutan negara, yaitu hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak milik atau tanah negara. Hutan rakyat atau hutan milik adalah semua hutan yang ada di Indonesia yang tidak berada di atas tanah yang dikuasai oleh pemerintah, dimiliki oleh masyarakat, proses terjadinya dapat dibuat oleh pemerintah, dimiliki oleh masyarakat, proses terjadinya dapat dibuat oleh manusia, dapat juga terjadi secara alami, dan dapat juga karena rehabilitasi lahan kritis. (Jaffar, 1993:26).

Berdasarkan kepemilikan jenis lahan, usaha tani yang dilakukan oleh petani hutan rakyat secara fisik memiliki pola tanam yang sangat beragam. Walaupun begitu, sebagian besar hutan rakyat pada umumnya menggunakan pola tanam campuran (wanatani), yaitu campuran tanaman pangan dengan tanaman kayu-kayuan. Menurut Munawar (Awang, 2001), berdasarkan pola tanam, hutan rakyat diklasifikasikan menjadi 3 yaitu :

- a. Penanaman di sepanjang batas milik
- b. Penanaman di teras bangku
- c. Penanaman di seluruh lahan milik

Pola-pola tersebut dikembangkan masyarakat sesuai dengan tingkat kesuburan dan ketersediaan tenaga kerja. Tujuan pengembangan pola-pola ini adalah dalam rangka meningkatkan produksi lahan secara optimal, baik dilihat dari nilai ekologi ataupun ekonomi. Sementara itu berdasarkan Rencana Pengembangan Hutan Rakyat yang disusun oleh Kanwil DIY, pola-pola hutan rakyat meliputi kayu-kayuan, buah-buahan, HMT (Hijau Makanan Ternak) dan campuran, kebun, pangan, dan hortikultura serta tegalan (Awang, 2001).

Karakteristik hutan rakyat adalah bersifat individual, berbasis keluarga, tidak memiliki manajemen formal, subsisten, dan hanya sebagai tabungan bagi

keluarga pemilik hutan rakyat (Awang, dkk, 2002). Kepemilikan hutan rakyat berasal dari warisan orang tua dan juga dari jual beli. Pada zaman penjajahan Belanda dulu, semua hutan yang ada di Bogor adalah milik masyarakat Bogor yang dibagi dalam beberapa lahan yang masih sangat luas. Pada saat itu pemerintah Belanda mengeluarkan perintah untuk mengganti atap-atap rumah warga yang sebelumnya beratap ijuk diganti dengan genteng dari tanah liat. Perintah ini dimaksudkan karena atap ijuk menyebabkan penyakit yang berasal dari tikus sehingga Pemerintah Belanda memaksa warga Bogor untuk mengganti atap tersebut. Pada saat itu keadaan warga Bogor sangat miskin karena mereka sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Akibatnya, ketika program penggantian atap rumah itu dilakukan maka banyak warga Bogor terpaksa menjual lahan hutan mereka untuk membayar genteng kepada Pemerintah Belanda. Hutan yang telah dijual oleh warga Bogor kepada Pemerintah Belanda menjadi hutan negara. Sehingga istilah hutan terbagi menjadi hutan negara dan hutan rakyat hingga sekarang. Saat ini untuk melegalkan kepemilikan hutan rakyat dari proses jual beli ialah melalui tingkat desa. Di Bogor dikenakan biaya sebesar 2% dari total harga jual beli tanah tersebut.

Untuk saat ini, kepemilikan lahan hutan rakyat yang paling besar dimiliki oleh warga dari Dusun Bogor meskipun penduduknya lebih sedikit dibanding dusun lainnya. Warga Bogor menggunakan uang yang dimilikinya untuk membeli lahan hutan sehingga kepemilikan lahan hutan dijadikan investasi untuk meningkatkan ekonomi masyarakatnya. Di Dusun Bogor tingkat ekonominya lebih baik dibandingkan warga dusun lainnya yang berada di Desa Bogor. Menurut Kades, di Dusun Bogor hampir 80% warganya sudah memiliki lahan hutan sendiri meskipun luas kepemilikannya berbeda-beda tiap orangnya. Harga jual tanah di Dusun Bogor pun relatif tinggi dibanding dusun lainnya. Menurut informan saya yaitu Mbak Sulis berkata bahwa harga tanah di Bogor sudah mencapai Rp 115 ribu per meter sedangkan harga tanah di Kyuni dan Wadas adalah Rp 50 ribu per meter. Menurutnya kesejahteraan warga Bogor lebih baik dibanding dengan warga Dusun Kyuni dan Wadas. Ia bercerita bahwa warga Kyuni dan Wadas memiliki pola hidup seperti orang kota. Mereka sudah malas untuk berladang dan juga mereka makannya maunya yang enak-enak. Di Wadas

dan Kyuni, yang kaya terlihat kaya sekali tetapi yang miskin, miskin sekali. Masih banyak warga Wadas dan Kyuni yang makan nasi tiwul. Mbak Sulis menuturkan bahwa kepemilikan tanah di Wadas dan Kyuni banyak dijual ke warga Dusun Bogoran. Warga Bogoran merupakan warga yang memiliki sifat pekerja keras dalam melakukan pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, Pada jam kerja yaitu sekitar pukul 08.00-15.00 di Bogoran sangat jarang terlihat orang. Hanya anak-anak kecil saja dan beberapa ibu yang terlihat karena mayoritas warga Bogoran sedang berada di lahan tempat mereka bekerja. Perekonomian warga Bogoran pun lebih baik dibandingkan Dusun Kyuni dan Dusun Wadas. Hal ini terlihat di Bogoran dari keadaan semua rumah sudah layak huni, sedangkan di dusun lain masih ada rumah yang tidak layak huni.

Dalam menjelaskan mekanisme masyarakat petani saya merujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh Scott dan Redfield. Scott memberikan sebuah model normatif yang menggambarkan kehidupan ekonomi petani yang dekat dengan pola hubungan sosial yang pantas, wajar, dan adil. Menurut Scott, prinsip “*norm of reciprocity*” dan jaminan subsistensi minimal berada dalam pola hubungan itu. Lalu Redfield (1985: 88) melukiskan kehidupan petani sebagai suatu “kehidupan yang baik” dari nilai-nilai petani yang berlaku. Menurut George Stuart, seperti dikutip Redfield (1985: 90), salah satu pola hubungan itu adalah sikap intim dan hormat terhadap tanah yang menganggap pekerjaan pertanian sebagai pekerjaan yang baik dan kegiatan komersialisasi sebagai pekerjaan yang tidak terlalu baik. Bagi petani yang seluruh hidupnya tergantung dari hasil tanah garapan, tanah dianggap sebagai tanah pusaka (*heirloom land*) dan tidak sekadar simbol apalagi mata dagangan (*commodity*). Dilihat dari cara-cara penguasaan dan perlakuan petani atas tanah – dan bukan dari kepemilikan tanah – terlihat adanya kedekatan hubungan petani dengan tanah sebagai aset hidupnya. Pola relasi antara tanah dan kehidupan petani tersebut oleh Redfield digambarkan sebagai suatu dunia yang dipenuhi sikap hidup tipikal. Dalam arti, tanah adalah sumber penghidupan petani yang utama walaupun bukan berarti pemilikan tanah kemudian menjadi sesuatu yang secara khusus menjadi tuntutan. Pendapat ini tercermin di kehidupan petani di Bogoran. Petani hutan memiliki pola pikir yang sederhana terhadap hutan rakyat yaitu mereka hidup dari hutan sehingga hutan itu

harus dikelola dengan baik agar hutan itu dapat terus menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pola pikir ini menyebabkan mereka tidak membiarkan adanya lahan kosong di hutan karena lahan kosong dapat menyebabkan mereka tidak memiliki pendapatan dan juga dapat menimbulkan erosi dan kerusakan lingkungan. Masyarakat hutan ini melihat hutan sebagai kehidupannya.

Warga Bogoran adalah warga agraris yang sudah menjadikan pekerjaannya sebagai kebudayaan turun menurun yang sulit untuk diubah apalagi dihilangkan. Budaya agraris Bogoran memiliki hubungan yang sangat erat dengan lingkungannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya interaksi warga terhadap hutan. Hutan bagi mereka adalah sumber dan tempat kehidupan mereka sehingga harus diolah dan dijaga dengan baik. Contohnya, ketika saya melakukan penelitian, para warga Bogoran terutama yang berusia tua menganggap pekerjaan mereka sebagai petani adalah kegiatan mereka sehari-hari. Jika mereka tidak bekerja walau sehari saja maka akan terasa sakit seluruh badannya. Oleh karena itu, walaupun hujan turun deras atau sedang sakit maka mereka tetap bekerja agar tetap merasa sehat. Mbah Karto dan istrinya baru berhenti bekerja di ladang dikarenakan kondisi fisik mereka yang sudah sering sakit-sakitan. Mbah Karto dan istrinya sering merasa sakit nyeri di bagian kaki dan tangannya. Sejak istri Mbah Karto terkena *stroke* ringan maka ia tidak lagi pergi ke ladang atau yang biasa disebut warga Bogoran yaitu *ngalas*. Sementara itu, Mbak Sulis memiliki pola yang berbeda untuk kepemilikan lahan hutan rakyatnya. Mbak Sulis dan suaminya memiliki lahan sekitar 2 ha. Mbak Sulis memiliki lahan seluas 0,75 ha, sedangkan suaminya memiliki lahan seluas 1 ha. Sisanya lahan seluas 0,25 ha merupakan tanah yang dibeli setelah mereka menikah.

Sementara itu, ada petani di Bogoran yang tidak memiliki lahan milik sendiri sehingga ia harus bekerja pada orang lain yaitu Pak Emboh. Ia dan ayahnya dulu bekerja sebagai petani penggarap lahan milik orang lain. Hingga suatu saat Pak Emboh jatuh sakit karena memaksakan diri untuk bekerja saat hujan deras dan akhirnya harus masuk rumah sakit untuk dirawat. Semenjak itulah ia dan ayahnya bertekad untuk membuat arang saja agar waktu bekerja yang dijalankan bisa lebih fleksibel. Jika dirasa akan turun hujan maka mereka segera

pulang meskipun saat itu masih siang. Sementara itu, ia merasa kasihan terhadap fisik ayahnya yang sudah tua. Meskipun ia membuat arang dan tidak menjadi petani yang melakukan cocok tanam, tetapi Pak Emboh tetap mengandalkan hutan rakyat sebagai sumber penghasilannya. Ini karena bahan baku pembuatan arang yaitu batang pohon yang ditanam di hutan rakyat. Pak Emboh dan ayahnya menebang kayu di pohon kopi yang sudah mereka beli. Mereka hanya membeli kayunya saja di ladang milik orang lain sehingga harus menebang kayu tersebut sendiri. Ia membelinya dengan harga yang beragam, tergantung kepada lokasi ladang tersebut. Pak Emboh dan Mbah Muhson (ayah Pak Emboh) sudah membeli kayu di lima tempat di Dusun Kyuni. Semakin jauh letak ladang dari jalan raya maka harga kayu yang dijual semakin murah karena mempertimbangkan ongkos bensin motor yang dihabiskan akan semakin mahal jika jarak ladang semakin jauh dari jalan raya. Selisihnya bisa sampai 250 ribu – 300 ribu rupiah.

Warga Bogoran juga saling melindungi satu sama lain secara tidak langsung. Ini terlihat ketika penelitian, saya melihat banyak motor yang diletakkan begitu saja oleh petani. Mereka tidak khawatir motor tersebut akan hilang tetapi mereka percaya bahwa sesama petani mereka akan saling memantau dan menjaga barang-barang berharga milik mereka seperti motor tersebut. Mereka juga menjaga hutannya agar tidak gundul untuk menjaga kelestarian hutannya. Setiap tahunnya pada penanaman kayu ada saja kayu yang sakit maka harus ditebang. Jika ditebang satu kayu maka harus ditanam empat kayu jadi tidak mungkin gundul. Kegiatan pelestarian tersebut membuat Bogoran mampu memenangkan lomba juara satu sebagai desa dengan pengelolaan hutan rakyat terbaik pada tahun 1997. Saat memenangkan lomba tersebut listrik belum masuk desa, saat itu warga Bogoran masih menggunakan lampu tempel. Semua makanan didapat dari kebun dan masih banyak ternak yang hidup. Program listrik masuk desa di Bogoran baru dimulai pada tahun 1998.

Kepemilikan hutan warga Bogoran juga didapatkan dari sistem peminjaman lahan yang diberikan oleh Perhutani. Setiap KK (Kepala Keluarga) memiliki jatah tanah yang dipinjamkan kepada warga agar tanah tersebut dapat ditanami tanaman dan dirawat, sedangkan dari Perhutani sendiri hanya menanam pohon pinus dan damar. Jatah tersebut dibagi-bagi oleh perhutani dan letak

tanahnya dipetak-petakkan dan diberi nomor lalu diundi untuk menentukan siapakah yang akan dipinjamkan lahannya sesuai dengan nomor masing-masing. Ada yang mau menerima hasil kocokan tersebut dan mengolah lahannya tetapi banyak juga warga yang tidak mau mengolah lahan yang dipinjamkan karena hasil kocokan menentukan bahwa lokasi lahannya sangat jauh dari rumah mereka. Menurut Mbak Sulis, sistem peminjaman lahan di Perhutani untuk warga menggunakan sistem bagi hasil yaitu 60% untuk warga dan 40% untuk Perhutani. Mbak Sulis juga mendapat jatah dari Perhutani. Awalnya di ladang Perhutani tersebut hanya berupa tanah kosong, kemudian ia menanam kayu dan kopi. Selain itu, istri Mbah Muhson menceritakan kepada saya bahwa keluarganya juga mendapat jatah lahan kosong dari Perhutani. Ia menanam kopi di ladang hutan negara. Pak Emboh mendapatkan tanah yang dekat dengan rumahnya sehingga ia dapat dengan mudah menanam dengan tanaman kopi, cabe, talas, durian. Sementara itu, Mbah Muhson mendapatkan lahan yang sangat jauh sekali sehingga lahan tersebut diberikan kepada orang lain karena ia tidak sanggup menggarapnya mengingat kondisi fisiknya yang sudah tidak terlalu kuat.

4.2. Sistem Wanatani Hutan Rakyat

Istilah hutan rakyat merupakan fenomena yang relatif baru untuk Indonesia. Oleh karena itu dalam UUPK No.5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan, perihal istilah hutan rakyat juga belum dimasukkan secara proporsional. Di dalam UU tersebut istilah yang digunakan adalah 'hutan milik', yaitu lahan milik rakyat yang ditanami dengan pepohonan. (Simon, 1998 dalam Awang, 2001). Sementara itu Departemen Kehutanan mendefinisikan hutan rakyat adalah : 'Suatu lapangan di luar hutan negara yang didominasi oleh pohon-pohonan, sedemikian rupa sehingga secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta lingkungannya' (Dephut, 1998). Definisi ini sesungguhnya hanyalah untuk membedakan hutan yang tumbuh di lahan negara dan lahan milik rakyat. Menurut Kamus Kehutanan (1990), hutan rakyat adalah : 'Lahan milik rakyat atau milik adat atau ulayat yang secara terus menerus diusahakan untuk usaha perhutanan yaitu jenis kayu-kayuan, baik tumbuh secara alami maupun hasil tanaman'.

Tujuan pembangunan hutan rakyat adalah: (Jaffar, 1993)

1. Meningkatkan produktivitas lahan kritis atau areal yang tidak produktif secara optimal atau lestari.
2. Membantu penganekaragaman hasil pertanian yang dibutuhkan oleh masyarakat
3. Membantu masyarakat dalam penyediaan kayu bangunan atau bahan baku industri serta kayu bakar
4. Meningkatkan pendapatan masyarakat tani di pedesaan sekaligus meningkatkan kesejahteraannya

Memperbaiki tata air dan lingkungan, khususnya pada lahan milik rakyat yang berada di kawasan perlindungan daerah hulu DAS.

Hutan rakyat tidak bisa dilihat secara sederhana hanya dari kondisi tegakan yang ada. Awang berpendapat bahwa kupasan tentang hutan rakyat seharusnya dilihat dari perspektif sistem penggunaan lahan, arti hutan rakyat menurut masyarakat, dan dengan melihat dimana lokasi hutan rakyat tersebut (Awang, dkk, 2002). Sekarang ini kita jarang menemui usaha tani masyarakat yang tidak bersimbiosis dengan tanaman keras, khususnya usaha tani masyarakat pedesaan di Jawa. Di suatu hamparan lahan terlihat adanya simbiosis antara tanaman pangan, tanaman pakan ternak, dan tanaman pohon-pohonan. Hal ini merupakan hasil kebudayaan masyarakat pedesaan yang akhirnya mampu membentuk ekologi tersendiri di pedesaan. Secara lansekap¹, usaha tani pedesaan terlihat adanya kesatuan ekosistem penggunaan lahan di pedesaan. Hanya saja jika kita menganalisis lebih dalam, ada perbedaan fokus antara usaha tani dengan usaha tanaman keras. Masyarakat tidak selalu menanam tanaman keras di pertanian, namun hanya jenis tanaman tertentu yang sudah dikenal saja. Artinya, perhatian masyarakat hanya pada pohon-pohon yang sudah terdomestikasi² di desa saja.

¹ Lansekap adalah pandangan secara menyeluruh terhadap satuan unit batang lahan

² sudah dibudidayakan di dalam masyarakat

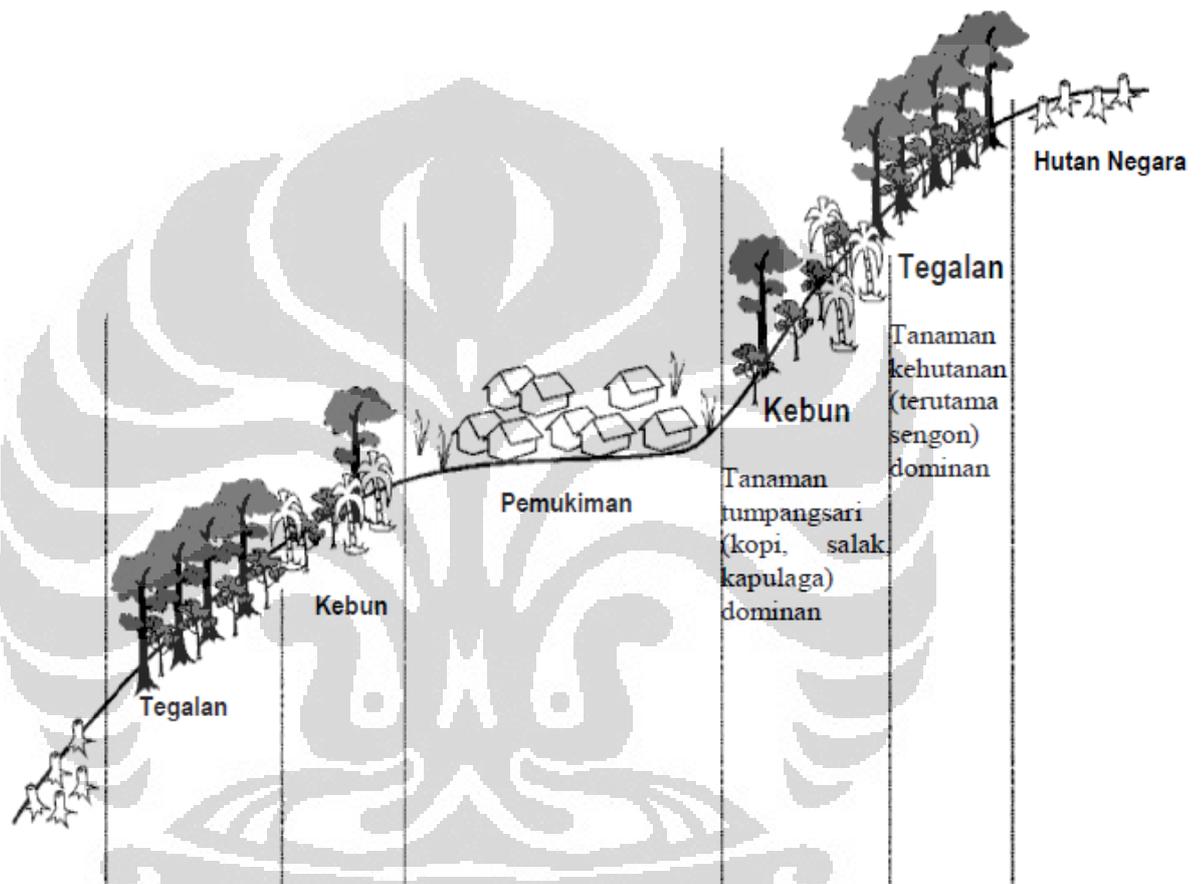
Ketersediaan pohon-pohon di areal usaha tani di pedesaan memiliki dua peran yaitu: (1) pohon berperan memelihara dan memperbaiki lingkungan fisik dalam rangka melestarikan tanaman pertanian dengan cara memperbaiki asupan nutrisi³ lahan energi dan (2) pohon juga berfungsi melestarikan sumber-sumber ekonomi keluarga di pedesaan. Pada sisi lain, keberadaan pohon-pohonan dapat menjamin hak penggunaan di hamparan lahan pertanian. Bahkan jenis pohon tertentu memiliki arti budaya dan terkait dengan upacara keagamaan di komunitas masyarakat tertentu (Arnold, 1995⁴). Menurut Warner (1991), jenis pohon-pohonan dapat mendorong dan mempercepat atau meningkatkan perputaran nutrisi bahan makanan tanah yang akan menghasilkan nilai ekonomi bagi kehidupan masyarakat petani subsisten. Keuntungan keberadaan pohon-pohon di lahan pertanian yaitu memberikan naungan pada tanaman pertanian serta perlindungan dari hujan besar dan serangan angin. Di daerah tropis basah komposisi tanaman yang tumbuh di lahan kering pekarangan (*home garden*) yang bersimbiosis dengan komponen tanaman lain dan ternak dapat membantu memelihara nutrisi dan struktur tanah, menciptakan iklim mikro, dan meningkatkan produktivitas lahan.

Petani yang melakukan usaha pertanian di Bogor adalah orang desa yang bercocok tanam di daerah pedesaan. Selain mengarahkan kegiatan pada usaha memenuhi kebutuhan rumah tangga sendiri, mereka juga mengarahkan kegiatan pada usaha tani. Usaha ini dilakukan dengan mengombinasikan faktor-faktor produksi yang dibeli, kemudian memasarkan hasil produksinya itu setelah mereka memiliki surplus. Seandainya tidak memperoleh surplus, petani memasarkan hasil pertanian karena terpaksa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat dihasilkan sendiri (Koentjaraningrat, 1984). Penduduk pedesaan memelihara dan mengembangkan tanaman di sekitar pemukiman bertujuan menyediakan kebutuhan barang dan jasa keluarga. Kebutuhan barang dan jasa tersebut antara lain: bahan pangan, bahan bakar, pakan ternak, bahan bangunan rumah, dan komoditas yang dapat dijual. Tentu saja pohon-pohon tersebut dapat melindungi tanah dan tanaman pertanian dari kerusakan. Hal ini

³ seresah dari bahan ranting dan daun memberikan nutrisi untuk tanah dalam bentuk karbon organik dan mineral yang lain

⁴ lihat J.E.Michael Arnold. 1995. *Framing the Issues*

seperti yang terjadi di Bogor, warganya mengelola hutan rakyat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka dan untuk mendapatkan pendapatan dengan menjual hasil panen tanaman mereka. Pada aspek sistem penggunaan lahan, hutan rakyat yang ada di Bogor terletak pada sistem penggunaan lahan kebun dan tegalan. Sketsa sistem penggunaan lahan dapat dilihat dalam gambar.



Gambar 4.1. Sketsa sistem penggunaan lahan di Bogor

Sumber : Awang, dkk, 2002

Pengembangan hutan rakyat berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan baik dalam skala pekarangan, tegalan, kebun, sawah dan sebagainya. Umumnya tanaman padi dan palawija serta jenis tanaman pertanian lainnya sebagai penghasil utama namun dalam perkembangannya diusahakan kombinasi jenis tanaman yang meliputi tanaman pangan, buah-buahan dan tanaman tahunan, serta tanaman kehutanan yang kemudian dikenal dengan istilah agroforestri. Menurut Fandeli dalam AruPA (Awang, dkk, 2002), agroforestri

Universitas Indonesia

adalah suatu sistem pertanaman yang merupakan kegiatan kehutanan, pertanian dan atau perikanan, ke arah usaha tani terpadu sehingga tercapai optimalisasi penggunaan lahan. Achil mengatakan bahwa agroforstri merupakan bentuk usaha tani dalam rangka pengelolaan hutan serbaguna yang menyelaraskan antara kepentingan produksi dengan kepentingan pelestarian, berupa perusahaan secara bersama atau berurutan jenis-jenis tanaman pertanian, bentuk lapangan pengembalaan, jenis tanaman kehutanan pada suatu lahan (Satjapradja, 1981).

Mayoritas warga Bogoran bekerja sebagai petani hutan. Mereka bekerja setiap hari dari hari Senin hingga Minggu baik laki-laki ataupun perempuan. Mereka ada yang bekerja di lahan sendiri ataupun di lahan milik orang lain. Warga yang sudah memiliki lahan juga ada yang bekerja di lahan milik orang lain. Sistem pembayaran untuk petani Bogoran terbagi dalam dua cara yaitu pembayaran tahunan dan pembayaran harian. Untuk pembayaran tahunan, mereka biasanya bekerja dalam kelompok-kelompok dalam suatu lahan dari hari Senin hingga Kamis. Untuk pembayaran tahunan ini mereka biasanya menyebut dengan sistem *stralen*. Honor yang mereka dapatkan adalah 20 ribu per hari dan dibayar setiap awal puasa tiap tahunnya. Cara pembayaran ini dimaksudkan untuk tabungan Hari Raya Idul Fitri. Pada pembayaran tahunan, setiap petani yang bekerja di suatu lahan dicatat kehadirannya oleh ketua kelompoknya untuk penghitungan honor mereka. Untuk pembayaran tahunan biasanya para petani hutan ada yang mendapat honor hingga Rp 2,5 juta tetapi ada juga yang hanya Rp 500 ribu, tergantung pada seringnya petani itu bekerja. Untuk pembayaran harian biasanya para petani bekerja pada hari Juma'at hingga hari Minggu. Untuk bayaran harian sebesar Rp 15 ribu. Jam kerja para petani adalah jam 08.00 - 15.00.

Ibu Parsi bercerita tentang pengalamannya mengikuti *stralen*. Ia bercerita bahwa ia sedang mengikuti kelompok tani yang bekerja di ladang milik orang lain dan dibayarnya setiap awal bulan puasa. Kelompoknya beranggotakan 15 orang wanita, dan ini merupakan anggota kelompok paling banyak diantara lainnya. Kebiasaan dalam pengerjaan *stralen* yaitu bekerja bersama-sama. Sebelum pukul 08.00 anggota satu *stralen* akan menunggu anggota lainnya untuk berjalan bersama-sama menuju tegalan. Semua anggota *stralen* harus datang tepat waktu.

Banyak para petani yang bekerja dalam sistem *stralen* melakukan izin untuk tidak masuk dalam hari tertentu karena mereka mendapat tawaran untuk bekerja di ladang orang lain. Jika memang ada anggota yang tidak bisa hadir maka ia wajib memberi tahu anggota satu kelompok *stralen* atau kepada ketua kelompoknya. Penawaran pemilik lahan kepada petani untuk bekerja di ladangnya dilakukan di jalan saat bertemu atau melalui telpon. Jika petani sanggup atas permintaan pemilik lahan tersebut maka ia harus menaati janjinya. Cara tersebut disebut cara sembarang dengan upah 15 ribu per hari.

Di dalam tegalan terdapat pembagian kerja bagi pria dan wanita. Pria bertugas mengerjakan pekerjaan berat seperti memotong kayu, menggotong kayu, dan juga mencangkul. Untuk para wanita melakukan pekerjaan yang lebih ringan seperti menanam, memanen, dan juga membersihkan lahan. Saya lihat banyak para kakek dan nenek yang masih bekerja baik di ladang sendiri atau di ladang orang lain. Mereka terlihat sehat dan tidak pernah mengeluh. Mereka merasa senang melakukan pekerjaannya sebagai petani karena semenjak kecil mereka sudah terbiasa melihatnya dari orang tua mereka. Petani menganggap hutan adalah sumber kehidupan mereka sehingga mereka harus merawat hutan tersebut agar terus bisa mendapatkan penghasilan dari hutan tersebut dan bisa diturunkan ke keturunan mereka kelak. Di Bogoran, para petani yang sedang bekerja di ladang hanya berhenti bekerja saat makan siang. Biasanya mereka sudah membawa bekal sendiri dari rumah. Jika turun hujan mereka sudah menyediakan mantel plastik yang bisa dibeli di pasar dengan harga tiga ribu. Terkadang saya melihat para ibu membawa anak-anak mereka yang sudah berusia 8-10 tahun. Anak-anak tersebut hanya membantu ibu mereka mencari kayu bakar dan mencari rumput. Di Dusun Bogoran anak-anak tidak dijadikan pekerja karena merasa kasihan kalau anak-anak harus dipekerjakan.

Mbah Karto adalah warga yang memiliki lahan terluas di Bogoran. Ia membayar petani yang bekerja di ladangnya dengan honor 20 ribu per hari jika tidak mendapat makan siang, sedangkan 15 ribu per hari jika mendapat makan siang. Untuk *stralen* yang dibayar pertahun, Mbah Karto membayar 25 ribu per hari. Salah satu anak Mbah Karto, yaitu Pak Yanto menanam semua tanamannya sendiri. Ia dan istrinya mengerjakan pekerjaan yang mereka bisa lakukan sendiri.

Ia membayar orang lain untuk membantu membersihkan rumput dan memanen. Ia mengaku harus berusaha sehemat mungkin dalam mengelola uangnya agar dapat ditabung. Ia membayar pekerjaanya dengan cara harian yaitu 15 ribu per hari untuk perempuan dan 20 ribu per hari untuk laki-laki. Untuk tenaga yang membantunya memanen, ia mengambil warga yang merupakan keponakan-keponakan dari istrinya yang berasal dari Temanggung.



Gambar 4.2. Kegiatan Pak Yanto ketika menjemur padi yang baru dipanennya

Berbeda dengan Mbah Karto dan Pak Yanto, anak Mbah Karto lainnya yaitu Ibu Parti, ia memang sejak lama mengikuti suaminya tinggal di Bogor. Ia menyerahkan lahan yang didapat dari orang tuanya seluas tiga ha untuk diurus oleh orang lain sesama warga Bogor. Di lahan Bu Parti, warga yang menumpang untuk menanam harus membersihkan dan merawat ladangnya Bu Parti dan tidak digaji karena warga tersebut sudah mendapatkan hasil dari tanaman-tanaman yang ditanam di lahan Bu Parti.

4.3. Keterpaduan Wanatani, Pertanian, dan Peternakan

Dalam falsafah kultur di Jawa, kata “wono” tidak hanya berarti hutan sebagaimana yang kita kenal. *Wono* atau *alas* dalam pemahaman ini berarti sumber daya (*resource*) yang bermanfaat bagi penyediaan pangan, kegiatan

peternakan, sumber mata air, dan kebutuhan hidup lain. Itu sebabnya dalam konteks pertanian, masyarakat wilayah ini tidak mengenal sistem tanaman monokultur atau tanaman satu jenis, mereka menanam aneka tanaman baik tanaman keras, buah, hingga tanaman pangan. Untuk mendukung pertanian di lahan hutan maka masyarakat juga memelihara hewan ternak, terutama kambing. Kotoran kambing merupakan bahan baku utama untuk pembuatan pupuk organik yang akan digunakan untuk menyuburkan tanaman pangan dan kayu di hutan. Sebaliknya, masyarakat juga menanam tanaman-tanaman pakan ternak.

Dalam melihat fenomena ini saya ingin merujuk kepada beberapa pendapat mengenai ekologi yang melihat hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Pendapat tersebut antara lain Otto Soemarwoto (1978) menjelaskan bahwa makhluk hidup dengan segala aktivitasnya mempengaruhi lingkungan hidup dimana ia berada, dan sebaliknya makhluk hidup juga dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya, sehingga ada hubungan timbal balik di antara keduanya. Hubungan timbal balik itu membentuk suatu sistem yang disebut ekosistem⁵. Demikian juga halnya dengan manusia yang selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Lingkungan hidup manusia itu dapat dibagi atas lingkungan biotis dan abiotis. Lingkungan biotis seperti tumbuhan, hewan, dan manusia, sedangkan lingkungan abiotis seperti tanah, air, udara, dan sebagainya. Lingkungan hidup manusia tidak hanya ditentukan oleh jenis dan jumlah benda hidup dan mati, melainkan juga oleh manusia dan kelakuannya. Untuk mendukung kehidupannya, manusia juga harus menggunakan unsur-unsur dalam lingkungan hidupnya, seperti udara untuk bernafas, air untuk minum, dan seterusnya. Dengan demikian lingkungan hidup bukan hanya tempat untuk hidup melainkan juga sebagai sumber daya. Pendapat lainnya yaitu menurut Geertz (1983) ketidakpastian pada pendekatan determinisme lingkungan dan posibilisme berpangkal pada kekurangan dalam konsepsi yang memisahkan karya manusia dan proses alam menjadi dua bidang pengaruh (*sphere*) yang berlainan, yaitu “kebudayaan” dan “lingkungan” kemudian berusaha melihat bagaimana

⁵ Ekosistem adalah sistem atau kesatuan yang berfungsi yang terdiri atas lingkungan fisik maupun organisme yang hidup di situ. Sebuah ekosistem terdiri atas lingkungan fisik berikut organisme yang hidup di dalamnya. Sistemnya terpelihara oleh kogiatan-kegiatan organisme dan oleh proses-proses fisik, seperti erosi dan penguapan (Haviland, 1988).

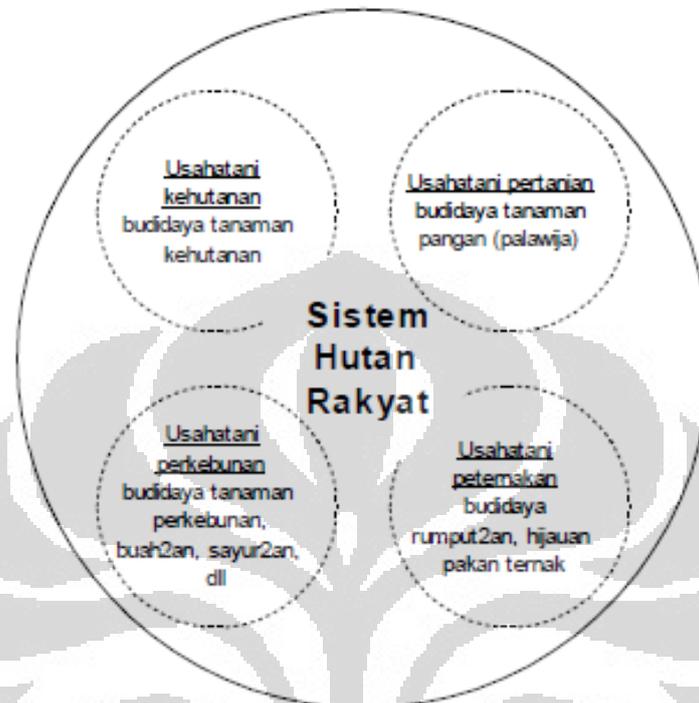
keseluruhan kedua bidang itu masing-masing saling mempengaruhi. Sedangkan pendekatan ekologis berusaha mencapai spesifikasi yang lebih tepat mengenai hubungan antara kegiatan manusia, transaksi biologis, dan proses alam tertentu, yang semuanya tercakup ke dalam satu sistem analisis, yaitu ekosistem. Konsep ekosistem menekankan saling ketergantungan antara kelompok organisme hidup yang merupakan suatu komunitas dengan keadaan alam yang bersangkutan.

Dari kedua pendapat teori tersebut terlihat bahwa di Dusun Bogoran telah terjadi hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya. Keduanya saling melengkapi satu dengan yang lain sehingga menjadi sebuah perpaduan. Bagi masyarakat Bogoran, bertani adalah berhutan dan sebaliknya. Dalam kehidupan sehari-hari kebutuhan rumput untuk ternak, daun, kayu bakar, kayu perkakas, umbi-umbian untuk makan, dapat selalu dicukupi dari keberadaan hutan. Keberadaan hutan bagi mereka juga berarti sumber mata air untuk kebutuhan makan, kebutuhan rumah tangga, dan mengairi lahan pertanian. Masyarakat Bogoran menggantungkan hidupnya pada hutan rakyat. Hutan rakyat dapat memenuhi kebutuhan harian, kebutuhan jangka menengah, dan kebutuhan jangka panjang untuk warganya.

Pola usahatani yang memadukan kegiatan kehutanan, perkebunan, pertanian, dan peternakan tersebut membentuk suatu sistem usahatani hutan rakyat yang terpadu. Dari perspektif tentang hutan rakyat dalam sistem penggunaan lahan dan sistem mata pencaharian seperti yang dijelaskan di atas, maka keduanya sama-sama menempatkan hutan rakyat sebagai sebuah "sistem". Dengan melihat hutan rakyat sebagai sebuah sistem, maka akan terlihat bahwa sesungguhnya hutan rakyat di Bogoran terbentuk dari beberapa sub-sistem usahatani (lihat gambar). Beragam tanaman yang dibudidayakan dalam sebidang lahan, berbaur, saling mengisi, menjadi satu kesatuan yang utuh, membentuk ekosistem hutan rakyat. Dari sudut pandang lain, usahatani hutan rakyat di Bogoran bisa juga dilihat sebagai sebuah sistem yang merupakan perpaduan antara beberapa unsur sebagai berikut: (1) kondisi sumberdaya alam yang ada; (2) kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi; (3) sumberdaya manusia yang tersedia; (4) pengetahuan, teknologi, dan *skill* yang dikuasai; (5) sejarah, budaya, dan kearifan lokal yang terbentuk; (6) pasar yang tersedia; dan (7) dukungan yang

diberikan oleh pihak luar (Awang, dkk, 2007).

Diagram 4.1. Usahatani Pembentuk Sistem Hutan Rakyat



Sumber : Awang, dkk, 2002

Hutan bagi mereka adalah sumber kehidupan dan sumber penghasilan utama. Untuk salah satu warga Bogor, Mbah Manten, pencapaiannya sampai saat ini yaitu telah menunaikan ibadah haji dan dapat membeli rumah untuk anak-anaknya. Hal ini merupakan hasil dari penjualan kayu yang ditanam di ladangnya. Mbah Manten bercerita bahwa ia memiliki tanah kurang lebih sepuluh ha. Awalnya ia hanya memiliki tanah dua ha yang merupakan tanah warisan dari orang tuanya. Ia akhirnya membeli tanah sebanyak dua puluh kali hingga akhirnya memiliki tanah sepuluh ha. Saat ini ia dan istrinya mengurus tanah seluas tiga ha saja karena tanah yang lain sudah dibagikan kepada tiga anaknya. Masing-masing anaknya diberikan dua ha dan sebuah rumah. Lain halnya dengan informan saya lainnya yaitu Pak Udin, suami Ibu Parsi, menuturkan bahwa di rumahnya ada lima kambing yang diletakkan di kandang samping rumahnya. Dua kambing diantaranya merupakan titipan, sedangkan tiga kambing lainnya adalah milik sendiri. Pak Udin mendapatkan warisan tanah seluas 250 m² dari ayahnya Pak

Udin yang dikelola keluarganya hingga saat ini. Rumah yang ditempatinya baru dibeli sekitar lima tahun yang lalu, sebelumnya keluarga Pak Udin tinggal di rumah orang tuanya yang letaknya di dekat rumah Mbah Karto. Ia bercerita kepada saya setelah ia menikah ia baru bisa membeli rumahnya yang dibeli dengan harga Rp 800 ribu dan tanah senilai Rp 12,5 juta. Uang tersebut dikumpulkan dari hasil bertani. Motor yang dimiliki oleh keluarga Pak Udin baru dibeli sekitar lima bulan yang lalu dengan menjual delapan kambing yang dimilikinya. Di ladang yang dimiliki oleh Pak Udin terdapat kapulaga, kopi, albasia, singkong, cabai, talas, dan pohon pisang. Pak Udin dan istrinya bekerja setiap hari. Pak Udin bekerja stralan di ladang milik Mbah Karto.

Untuk keluarga Mbak Sulis juga mendapatkan penghasilan utamanya yaitu dari berladang. Untuk non kayu :

Kapulaga (dipanen 2 bulan sekali) : Rp.400 ribu

Kopi (1 tahun sekali) : Rp.500 ribu

Untuk kayu : 5 tahun : 20 juta

1 tahun : 4 juta

Untuk panen padi di sawah (4 bulan sekali) : Rp. 200 ribu (dari ladang mba sulis)

Rp.400 ribu (dari ladang mas ikram)

Mbak Sulis jarang membeli sayur karena ia memetik sayuran dari kebunnya sendiri. Pengeluarannya berkisar 500 ribu per bulan. Uang tersebut dikeluarkan untuk makan dan memberikan sumbangan jika melayat orang yang meninggal, menghadiri pernikahan, dan menjenguk orang yang sakit. Mbak Sulis mengaku bahwa ia tidak mau bermewah-mewah dalam makan sehari-hari agar ia dapat menyisihkan uangnya untuk ditabung. Ia mengeluarkan untuk listrik yang satu bulannya sekitar Rp 30 ribu dan gas Rp 13 ribu. Ia dapat menghemat gas karena jika ia memasak banyak maka ia menggunakan *pawon* (dapur) yang menggunakan kayu bakar untuk memasak. Ia menggunakan gas hanya untuk memasak yang sederhana-sederhana saja. Akhir-akhir ini Mbak Sulis sakit-sakitan sehingga ia harus sering berobat ke dokter, untuk bulan kemarin saja ia harus mengeluarkan Rp 500 ribu untuk berobat ke dokter.

BAB 5

KESIMPULAN

Hutan rakyat merupakan salah satu bentuk guna lahan dominan yang ada di Bogoran. Total lahan hutan di seluruh desa Bogoran adalah 660 ha dan diantaranya 477 ha merupakan lahan milik masyarakat. Dari 477 ha dibagi ke dalam 2 bagian yaitu 334 ha (70%) merupakan lahan hutan rakyat dan 143ha (30%) merupakan sawah dan ladang. Ini menunjukkan bahwa hutan rakyat di Bogoran merupakan hutan yang di budidaya oleh warganya karena sebagian besar wilayahnya merupakan hutan rakyat.

Hutan rakyat tersebut terdiri dari berbagai jenis tanaman. Dari berbagai jenis tanaman tersebut, hutan rakyat dapat memenuhi kebutuhan harian, kebutuhan jangka menengah, dan kebutuhan jangka panjang warganya. Kebutuhan jangka pendek terpenuhi dari panen tanaman jangka pendek seperti cabai, kapulaga, salak, kelapa, pisang, dan lain lain. Kebutuhan jangka menengah terpenuhi dari hasil panen tahunan seperti ketela, kemukus, kopi, cengkeh, petai, melinjo, jahe, kunyit, durian, rambutan, alpokat dan lain lain, sedangkan kebutuhan jangka panjang berupa tanaman kayu-kayuan seperti kayu sengon (albasia), mahoni, dan suren. Hutan rakyat ini menjadi sumber produk hutan rakyat, penghasilan warganya, dan juga sumber pakan ternak.

Hutan rakyat di Bogoran sudah sejak lama dikelola oleh warganya. Ini disebabkan karena wanatani adalah bidang pekerjaan utama warga Bogoran sejak dahulu. Lebih dari separuh warganya menggantungkan hidupnya pada pertanian. Dengan topografinya yang bergelombang bahkan cenderung berbukit-bukit, petani di Bogoran pada umumnya tidak dapat membudidayakan sawah.

Pengusahaan hutan rakyat di Bogoran merupakan serangkaian kegiatan usaha yang meliputi kegiatan produksi, pemanenan, pemasaran/distribusi, dan industri pengolahan. Hutan rakyat di Bogoran sudah sejak lama memberikan sumbangan ekonomi maupun ekologis kepada pemiliknya maupun kepada masyarakat sekitar. Dari segi manfaat ekonomi, banyaknya kegiatan usaha hutan rakyat berimplikasi pada banyaknya pihak/tenaga kerja yang bisa ditampung

dalam kegiatan pengusahaan hutan rakyat di Bogor. Tanaman yang ditanam oleh petani memiliki beragam variasi tergantung kepada kebutuhan para petani itu sendiri. Tanaman tersebut menjadi sumber penghasilan utama bagi petani dan juga sumber pakan ternak mereka. Tanaman tersebut akan dikonsumsi sendiri dan dijual ke tengkulak dan pasar. Hasil dari penjualan tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam jangka pendek dan juga untuk tabungan jangka panjang yang membutuhkan biaya besar, seperti hajatan, biaya pernikahan anak, biaya sekolah, pembangunan rumah, naik haji, dan lain sebagainya.

Warga Bogor tidak hanya menyadari pentingnya arti hutan secara ekonomi. Mereka juga sadar akan pentingnya nilai ekologis hutan bagi kehidupan mereka. Prinsip kelestarian ekologi juga terlihat dari mekanisme permudaan hutan di Bogor. Dalam melakukan penebangan sengon, misalnya, petani lebih memilih tidak menebang seluruh tegakan yang ada. Disamping umurnya yang tidak sama, model tebang habis akan menjadikan tanah terdegradasi dan perlu waktu untuk memulihkannya. Upaya nyata yang lain terlihat ketika warga melakukan permudaan hutan. Setiap tegakan sengon yang ditebang, petani menggantinya dengan tiga buah tanaman baru. Bibit tanaman ini berasal dari permudaan alami yang kemudian dipindahkan tempatnya. Masyarakat petani menanam pohon di lereng-lereng perbukitan agar sawah mereka tidak kekeringan, agar desa mereka tidak tertimpa longsor, dan agar mereka tetap mendapat cukup air.

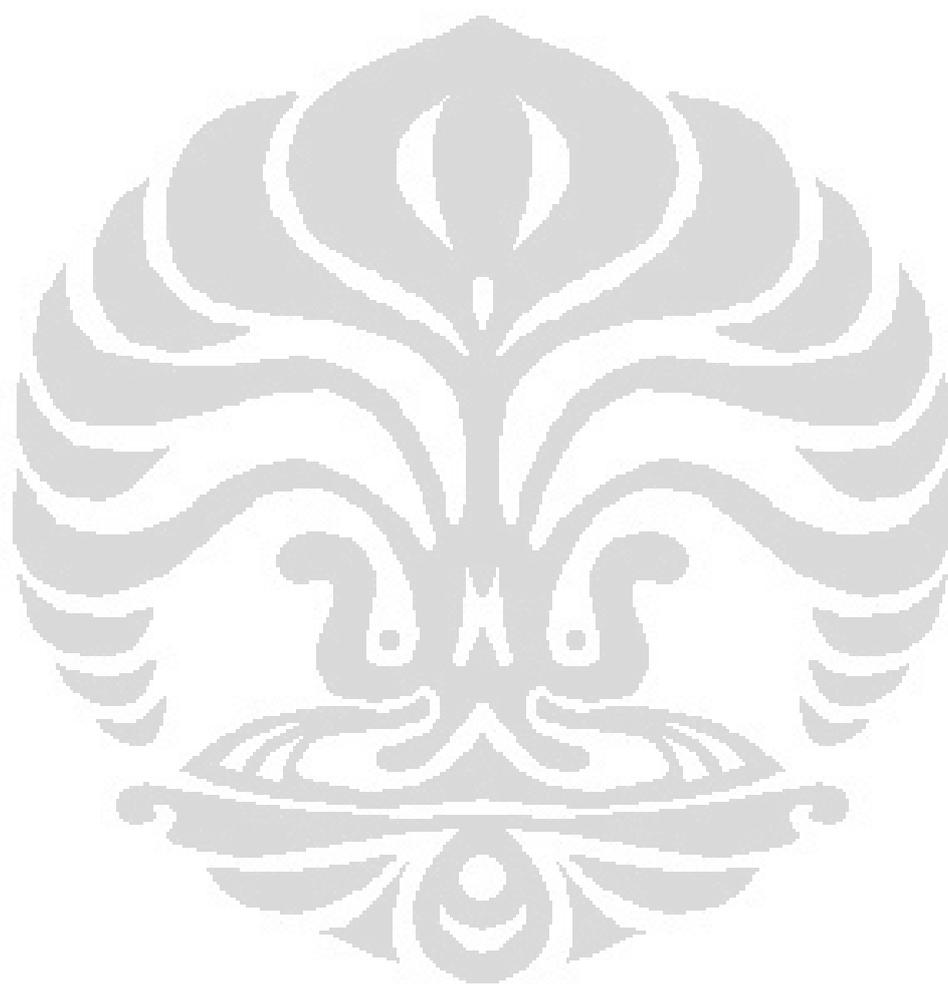
Warga Bogor memiliki hubungan yang sangat erat dengan lingkungannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ini dapat ditunjukkan dengan melihat interaksi masyarakatnya terhadap hutan. Hutan bagi mereka adalah sumber dan tempat kehidupan sehingga harus diolah dan dijaga dengan baik. Warga Bogor juga saling melindungi dan menjaga barang-barang berharga mereka satu sama lain seperti motor yang diletakkan begitu saja di pinggir jalan. Mereka percaya bahwa sesama petani akan saling memantau dan menjaga barang-barang mereka. Relasi sosial yang erat terjadi antar warga Bogor. Mereka membentuk kelompok tani yang berisi petani perempuan dan laki-laki yang memiliki tugas pekerjaan yang berbeda-beda. Mereka saling membantu mencari info pekerjaan kepada sesama petani baik untuk bekerja

Universitas Indonesia

tahunan ataupun harian. Mereka juga saling bergotong royong untuk acara keluarga besar, merenovasi rumah ataupun kegiatan lainnya yang membutuhkan tenaga yang banyak.

Petani hutan di Bogor memiliki pola pikir yang sederhana terhadap hutan rakyat yaitu mereka hidup dari hutan sehingga hutan itu harus dikelola dengan baik agar hutan itu dapat terus menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pola pikir ini menyebabkan mereka tidak membiarkan adanya lahan kosong di hutan karena lahan kosong dapat menyebabkan mereka tidak memiliki pendapatan dan juga dapat menimbulkan erosi dan kerusakan lingkungan. Warga Bogor melihat hutan sebagai kehidupannya.





DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adi, Juni, dkk. *Hutan Wonosobo: Keberpihakan yang Tersendat*. Yogyakarta: BP Arupa. 2005. Katalog Dalam Terbitan (KDT).
- Andayani, W. 2002. *Analisis finansial potensi sengon rakyat pola agroforestry di Kabupaten Wonosobo*. Jurnal Hutan Rakyat 4 (2): 1-23.
- Awang, S.A. 2001. *Gurat Hutan Rakyat di Kapur Selatan*. Pustaka Kehutanan Masyarakat, Yogyakarta: DEBUT 2001
- Awang, S.A, dkk. 2002. *Hutan Rakyat, Sosial Ekonomi, dan Pemasaran*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press
- Awang, S.A. 2005. *Petani, Ekonomi, dan Konservasi Aspek Penelitian dan Gagasan*. Yogyakarta: Pustaka Hutan Rakyat, Press Debut
- Awang, S.A dkk. 2007. *Unit Manajemen Hutan Rakyat: Proses Konstruksi Pengetahuan Lokal*. Sleman: Banyumili Art Network
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2006. *Potensi Hutan Rakyat Indonesia 2003*.
- Darusman, D. dan D. Suharjito. 1998. *Kehutanan Masyarakat: Beragam Pola Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Dawson, Ian K., A. Lengkeek., J.C. Weber., dan R. Jamnadass. 2009. *Managing genetic variation in tropical trees: linking knowledge with action in agroforestry ecosystems for improved conservation and enhanced livelihoods*. Biodivers Conserv 18:969-986.
- de Foresta, H., dkk. 2000. *Ketika Kebun Berupa Hutan-Agroforest Khas Indonesia-Sumbangan Masyarakat bagi Berkelanjutan*. Bogor, Indonesia: ICRAF.
- Departemen Kehutanan. 1974. *Informasi Perundang-Undangan Nasional di Bidang Kehutanan*. Jakarta: Penerbit Biro Hukum dan Organisasi Sekjen Dephut
- [Dephutbun] Departemen Kehutanan dan Perkebunan. 1998. *Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dan Perkebunan*. Jakarta
- Dwiprabowo, H. dan H. Prahasto. 2002. *Alokasi penggunaan lahan di Daerah Aliran Sungai dan prospek hutan rakyat*. Jurnal Hutan Rakyat 4 (3): 17-38.

- Emerson, M Robert. 1995 *Writing Ethnographic Fieldnote*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Haeruman, H. Hardjanto, E. Suhendang, dan S. Basuni. 1986. *Penyusunan sistem monitoring hutan rakyat di Jawa Barat*. Laporan penelitian. Institut Pertanian Bogor.
- Hairiah, K., Sardjono M.A., dkk. 2003. *Pengantar Agroforestri. Bahan Ajaran Agroforestry 1*. World Agroforestry Centre (ICRAF). Bogor.
- Hardjanto. 2000. *Beberapa ciri pengusaha hutan rakyat di Jawa. Dalam Suharjitno (Penyunting). Hutan Rakyat di Jawa perannya dalam perekonomian desa. Program penelitian dan pengembangan kehutanan masyarakat (P3KM). hlm. 7-11*. Bogor.
- Jaffar, E.R. *Pola Pengembangan Hutan Rakyat sebagai Upaya Peningkatan Luasan Lahan, dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Propinsi DIY*. Yogyakarta: Makalah pada pertemuan Persaki Propinsi DIY pada tanggal 17 Juli 1993
- Jahi, Amri. 1998. *Komunikasi Massa dan Pembangunan Pedesaan di Negara-negara Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Jakarta: Gramedia.
- Koentjaraningrat. 1967. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: PT. Dian Rakyat.
- Koentjaraningrat. 1984. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka
- Kottak, Conrad Phillip. 1991. *Anthropology: The Exploration of Human Diversity*. USA: McGraw-Hill, Inc.
- Kroeber, A.L. 1948. *Anthropology*. New York: Harcourt, brace and Co.
- Marzali, Amri. 1998. *Konsep dan Kajian Masyarakat Pedesaan di Indonesia, Jurnal Antropologi Pembangunan Indonesia (54): 85-95*.
- M. Taufik JP, 2008; *Hutan Rakyat: Karya Besar Orang-orang Besar. Studi Kasus Kabupaten Gunungkidul. Dokumen Sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari*
- Munggoro, W. Dhani. 1998. *Sejarah dan Evolusi Pemikiran Komuniti Forestri, Seri Kajian Komuniti Forestri, Seri 1 Tahun 1 Maret 1998*

- Nair, P.K. Ramachandran. 2007. *Agroforestry for Sustainability of Lower-Input Land-Use Systems*. dalam *Journal of Crop Improvement*. Haworth Food & Agricultural Products Press Vol.19, Hal: 25-47.
- Popkin, Samuel E. 1986. *Petani Rasional*. Jakarta: Yayasan Padamu Negeri.
- Redfield, Robert. 1985 *Masyarakat Petani dan Kebudayaan*. Jakarta: Rajawali.
- Reksohadiprojo, S. 1994. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Energi*. Yogyakarta: Penerbit BPFE
- RJHR [Redaksi Jurnal Hutan Rakyat]. 2001. *Jurnal Hutan Rakyat 3 (3): i-ii*.
- Salim, Agus. 2006. *Teori dan Paradigma Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Scott, James C. 1981. *Moral Ekonomi Petani (terj.)*. Jakarta: LP3ES
- Soemarwoto, Otto. 1997. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.
- Soendjoto, MA., Suyanto, Hafiziannoor, Purnama, A., Rafiqi, A., Sjukran, S., 2008. *Keanekaragaman Tanaman Hutan Rakyat di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan*. *Biodiversitas*. Vol.9.No.2. hal. 142-147.
- Solahuddin, Soleh. 2009. *Pertanian: Harapan Masa Depan Bangsa*. Bogor: IPB Press.
- Suhardono, 2003. *Pengelolaan Hutan Rakyat di Wonosobo*. *Jurnal Hutan Rakyat* 5(1):1-8.
- Suharjito, D., A. Khan, W.A. Djatmiko, M.T. Sirait, dan S. Evelyn. 2000. *Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Kehutanan Masyarakat.
- Suhendar, Endang dan Yohana Budi Winarni. 1998. *Petani dan Konflik Agraria*. Bandung: Yayasan Akatiga.
- Sukardayati. 2006. *Potensi Hutan Rakyat di Indonesia dan Permasalahannya*. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan
- Udawatta, Ranjith P., J.J. Krstansky., G.S. Henderson., dan H.E. Garrett. 2002. *Agroforestry Practices, Runoff, and Nutrient Loss: A Paired Watershed Comparison*. In *J. Environ. Qual.* 31:1214-1225.
- Warta kebijakan. 2003. *Perhutanan Sosial*. CIFOR-Center International Forest Research. No.9. Februari 2003.

Wolf, Eric R. 1996. *Petani: Suatu Tinjauan Antropologis*. Jakarta: Rajawali.

Wahyuningsih, L. 1993. *Peranan hutan rakyat sengon (*Paraserianthes falcataria* (L.) Nielsen terhadap pendapatan masyarakat di kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah*. Skripsi S-1, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor (tidak dipublikasikan).

Widjayanto, W. 1992. *Metode pengaturan hasil hutan rakyat *Acacia auriculiformis* A.Cunn. studi kasus di Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan Madura*. Skripsi S-1, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor (tidak dipublikasikan).

ARTIKEL

M. Chehafudin. 02 August 2010 . *Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasis Masyarakat (PSDHBM) Wonosobo: Desentralisasi yang tersendat*.

MEDIA ONLINE

Tim Arupa. March 4th, 2002 03:10 PM. *Hutan Rakyat Wonosobo : Kearifan Rakyat yang Menjadi Sumber Inspirasi Perda No. 22/2001*. Diakses pada 9 September 2011 pukul 15-00 (<http://www.arupa.or.id/download/konspsdhbm.pdf>)

Suprpto, Edi (ARuPA). *Hutan Rakyat: Aspek Produksi, Ekologi, dan Kelembagaan*. Disampaikan pada Seminar Nasional Kontribusi Pengurangan Emisi Karbon dari Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat Secara Lestari dan Berkelanjutan. Seminar diselenggarakan oleh FWI, di Grand Cemara Hotel Jakarta, 29 Juli 2010. diakses pada tanggal 13 April 2012 pukul 11.00 (<http://arupa.or.id/hutan-rakyat-wonosobo/>)

Pusat Inventarisasi dan Statistik Kehutanan, Departemen Kehutanan dengan Direktorat Statistik Pertanian, Badan Pusat Statistik. 2004. *Potensi Hutan Rakyat Indonesia 2003*. Jakarta. Diakses pada 9 Mei 2012 pada pukul 10.00 (http://www.dephut.go.id/INFORMASI/BUKU2/PHRI_03/PHRI_03.htm),

Sukardayati. 2006. *Potensi Hutan Rakyat Indonesia dan Permasalahannya*. Seminar hasil Litbang Hasil Hutan 2006 : 49-57. Bogor. Diambil dari (www.docstoc.com/docs/32896996/POTENSI-HUTAN-RAKYAT-DI-INDONESIA-DAN-PERMASALAHANNYA)

Tim Arupa. Oktober 2004. *Belajar dari Rakyat: Membangun Sistem Tata Kelola Hutan yang Berkeadilan*. diakses pada tanggal 13 April 2012 pukul 09.00 <http://groups.yahoo.com/group/berita-lingkungan/message/4658>

<http://arupa.or.id/belajar-dari-rakyat-2/> diakses pada 18 September 2011 pukul 19.00

<http://www.dephut.go.id/files/3.pdf> diakses pada 1 Oktober 2011 pukul 20.00

http://www.arupa.or.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=39 diakses pada 15 oktober pukul 16.00

<http://warungkoe.com/saasharefile/KonstruksiPengetahuanUnitManajemenHutanRakyat.pdf> diakses pada 20 September 2011 pukul 18.45
hermanwafom.files.wordpress.com/2010/01/agroforestri.docx diakses pada 10 Januari 2012 pukul 11.00

<http://arupa.or.id/hutan-rakyat-2/> diakses pada tanggal 13 April 2012 pukul 10.00

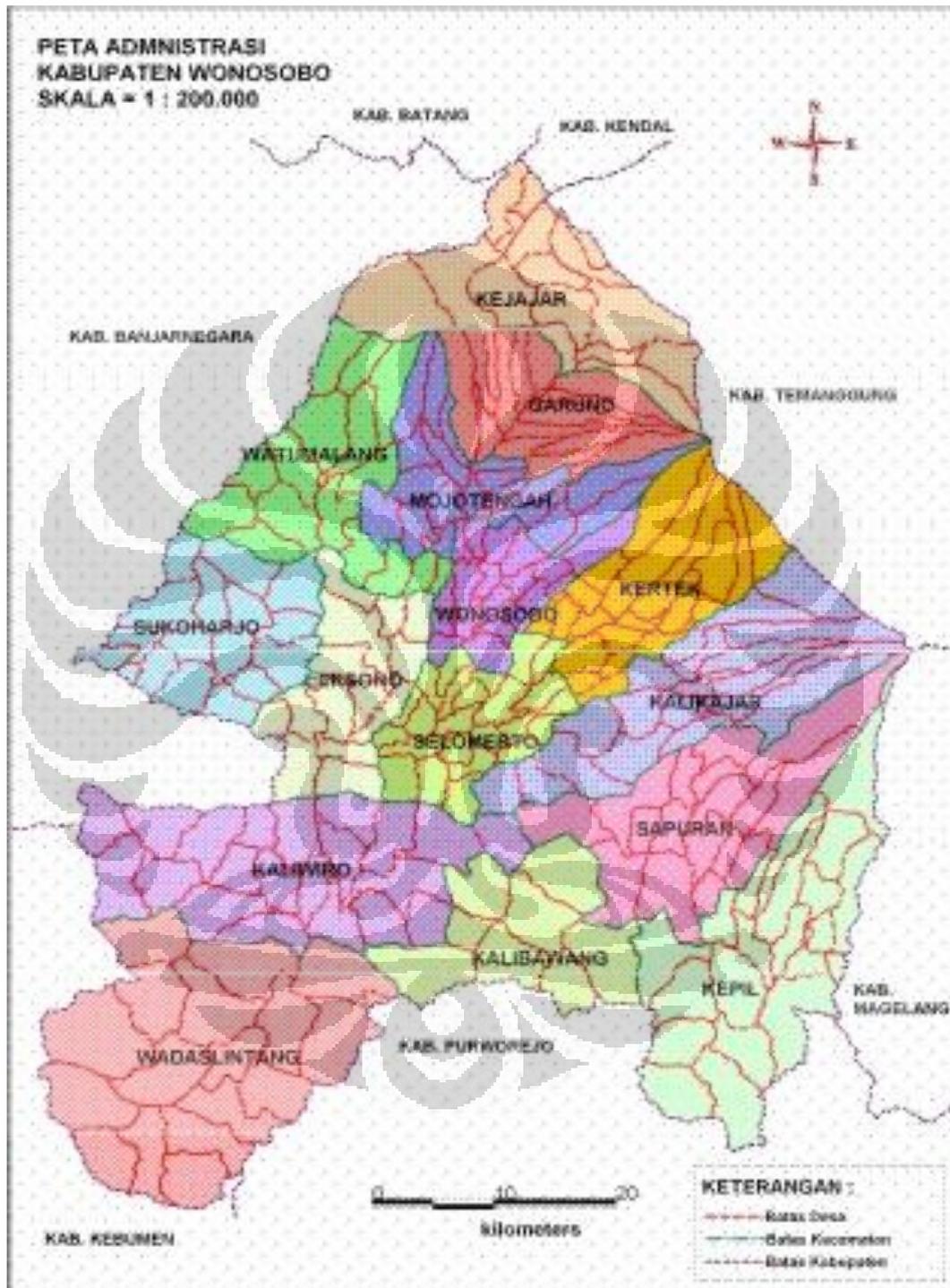


LAMPIRAN I
PETA ADMINISTRASI PROVINSI JAWA TENGAH



Sumber: <http://linakeren.files.wordpress.com/2010/09/peta-jawa-tengah.gif>

LAMPIRAN II
PETA ADMINISTRASI KABUPATEN JAWA TENGAH



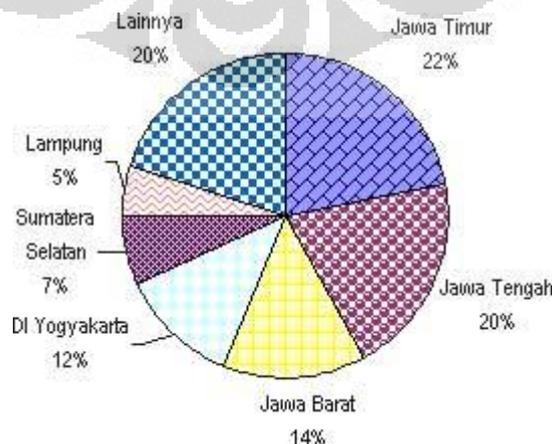
Sumber : www.google.com

LAMPIRAN III
POTENSI HUTAN RAKYAT INDONESIA TAHUN 2003

1. Potensi Tanaman Akasia di Indonesia

Tabel 1. Populasi Pohon Tanaman Akasia Yang dikuasai/ Diusahakan Rumah
Tangga

Uraian		Rumah Tangga Kehutanan			RT Usaha BMU		
		Jumlah RTK	Jumlah Pohon	Jml Phn Siap Tebang	Jumlah RT Usaha	Jumlah Pohon	Jml Phn Siap Tebang
JAWA							
a.	Absolut	891.711	22.611.068	7 730 365	195.944	13.710.687	5.558.898
b.	Persentase						
	•Thd total	75,85	70,62	64,05	83,40	75,88	65,49
	•Siap tebang			34,19			40,54
c.	Rata-rata		25,36	8,67		69,97	28,37
LUAR JAWA							
a.	Absolut	283.903	9.409.011	4.339.330	38.989	4.359.249	2.929.836
b.	Persentase						
	•Thd total	24,15	29,38	35,95	16,60	24,12	34,51
	•Siap tebang			46,12			67,21
c.	Rata-rata		33,14	15,28		111,81	75,15
INDONESIA							
a.	Absolut	1.175.614	32.020.079	12.069.695	234.933	18.069.936	8.488.734
b.	Persentase						
	•Thd total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	•Siap tebang			37,69			46,98
c.	Rata-rata		27,24	10,27		76,92	36,13

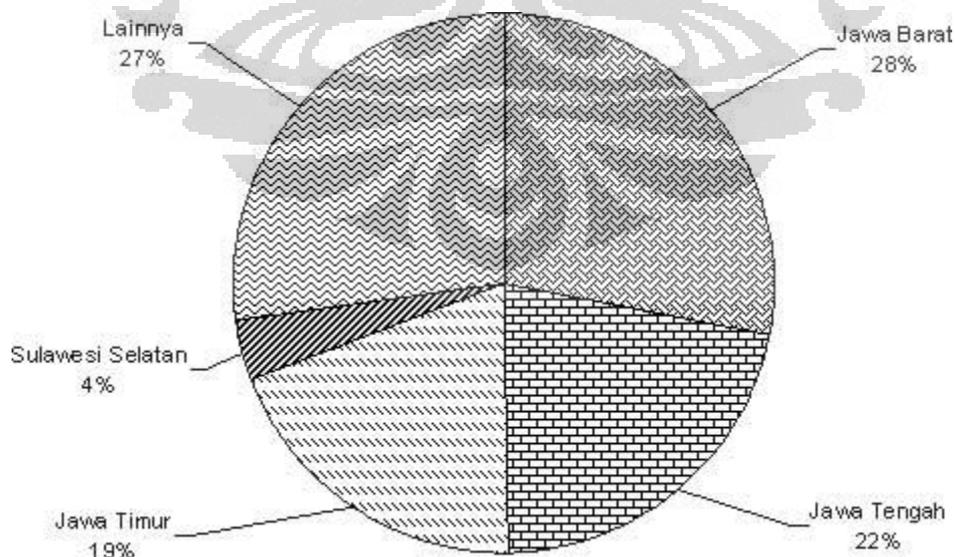


Gambar 1. Potensi Akasia di Indonesia

2. Potensi Tanaman Bambu di Indonesia

Tabel 2. Populasi Rumpun Tanaman Bambu Yang dikuasai/ Diusahakan Rumah Tangga

Uraian		Rumah Tangga Kehutanan			RT Usaha BMU		
		Jumlah RTK	Jumlah Rumpun	Jml Rpn Siap Tebang	Jumlah RT Usaha	Jumlah Rumpun	Jml Rpn Siap Tebang
JAWA							
a.	Absolut	357.492	29.139.388	21.161.547	389.169	17.974.175	1.617.844
b.	Persentase						
	•Thd total	75,69	76,83	75,89	74,62	78,70	77,08
	•Siap tebang			76,62			70,20
c.	Rata-rata		8,15	5,92		46,19	32,42
LUAR JAWA							
a.	Absolut	1 148.806	8.786.890	6.721.780	132.349	4.865.497	3.751.487
b.	Persentase						
	•Thd total	24,31	23,17	24,11	25,38	21,30	22,92
	•Siap tebang			76,50			77,10
c.	Rata-rata		7,65	5,85		36,76	28,35
INDONESIA							
a.	Absolut	4.725.298	37.926.278	27.883.327	521.518	2. 839.672	16.369.331
b.	Persentase						
	•Thd total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	•Siap tebang			73,52			71,67
c.	Rata-rata		8,03	5,90		43,79	31,39



Gambar 2. Potensi Bambu di Indonesia

3. Potensi Tanaman Cendana di Indonesia

Tabel 3. Populasi Pohon Tanaman Cendana Yang dikuasai/ Diusahakan Rumah Tangga

Uraian		Rumah Tangga Kehutanan			RT Usaha BMU		
		Jumlah RTK	Jumlah Pohon	Jml Phn Siap Tebang	Jumlah RT Usaha	Jumlah Pohon	Jml Phn Siap Tebang
JAWA							
a.	Absolut	753	8.384	2.374	243	4.915	1.966
b.	Persentase						
	•Thd total	10,27	12,64	11,62	8,61	15,76	11,38
	•Siap tebang			28,32			40,00
c.	Rata-rata		11,13	3,15		20,23	8,09
LUAR JAWA							
a.	Absolut	6.582	57.947	18.051	2.578	26.270	15.303
b.	Persentase						
	•Thd total	89,73	87,36	88,38	91,39	84,24	88,62
	•Siap tebang			31,15			58,25
c.	Rata-rata		8,80	2,74		10,19	5,94
INDONESIA							
a.	Absolut	7 335	66 331	20 425	2 821	31 185	17 269
b.	Persentase						
	•Thd total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	•Siap tebang			30,79			55,38
c.	Rata-rata		9,04	2,78		11,05	6,12

4. Potensi Tanaman Jati di Indonesia

Tabel 4. Populasi Pohon Tanaman Jati Yang dikuasai/ Diusahakan Rumah Tangga

Uraian	Rumah Tangga Kehutanan			RT Usaha BMU			
	Jumlah RTK	Jumlah Pohon	Jml Phn Siap Tebang	Jumlah RT Usaha	Jumlah Pohon	Jml Phn Siap Tebang	
JAWA							
a.	Absolut	2.340.139	50.119.621	11.506.947	1.342.156	3.277.011	10 440 343
b.	Persentase						
	•Thd total	76,68	62,88	62,38	78,92	69,59	61,65
	•Siap tebang			22,96			31,95
c.	Rata-rata		21,42	4,92		24,35	7,78
LUAR JAWA							
a.	Absolut	711.574	29.592.858	6 .939.077			